

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Setiap daerah memiliki karakteristik sumberdaya pembangunan yang relatif berbeda. Oleh karena itu desain perencanaan pembangunan harus sesuai dengan karakteristik sumberdaya pembangunan yang dipunyai daerah. Pada gilirannya diharapkan terwujud optimalitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks pemikiran inilah UU No 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional mewajibkan setiap daerah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berbasis potensi sumberdaya pembangunan yang dipunyai oleh setiap daerah.
2. Penyusunan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 - 2025 pada hakekatnya merupakan representasi dan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang diposisikan sebagai dokumen yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) yang disusun sekali dalam 5 tahun dan acuan dalam merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan. Program dan Kegiatan yang ada dalam RKPD merupakan dasar dalam menyusun RAPBD.
3. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang secara normatif memiliki hak dan kepentingan untuk memberikan pemikiran dan visinya terhadap corak dan warna pembangunan kabupaten Padang Pariaman untuk 20 tahun mendatang. Secara teknis operasional RPJP kabupaten Padang Pariaman disusun melalui tahapan: (1) penjangkaran aspirasi dan pemikiran-pemikiran seluruh komponen masyarakat melalui lokakarya; (2) penyusunan draft awal RPJPD oleh tim teknis dan Tim Ahli dari Perguruan Tinggi; (3) penyempurnaan rancangan awal RPJPD melalui kegiatan Musrenbang dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat; (4) pengesahan dan penetapan RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025 oleh DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun ke depan yang ditetapkan dengan maksud memberikan kerangka dasar dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya RPJPD ini, cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama dapat diwujudkan. Dokumen RPJPD Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara partisipatif, aktif, sinergis, terpadu dan koordinatif sesuai tugas pokok, peran dan fungsi untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan serta bertumbuh di segala bidang.
2. Di samping itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005-2025 merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 adalah untuk :
 - a. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah kabupaten Padang Pariaman.
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar kecamatan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari.
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
 - d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat sebagai modal dasar pembangunan.
 - f. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
 - g. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Tahunan.
 - h. Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lima Tahunan yang merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahunan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Padang Pariaman ini adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Lingkungan Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
21. Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

1.4 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1. Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam periode yang sama 2005–2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007.
2. RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini selanjutnya merupakan acuan utama dalam penyusunan RPJM kabupaten Padang Pariaman untuk periode waktu 5 tahunan sesuai dengan masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
3. RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
4. RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satua Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk setiap tahunnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman memberikan gambaran mengenai kondisi masa depan yang diharapkan dan ingin diwujudkan dalam segala sektor dan bidang pembangunan. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan sistematika dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu juga dilakukan beberapa pengembangan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman ini untuk perbaikan serta disesuaikan dengan kondisi daerah. Berdasarkan pedoman dan pertimbangan tersebut, maka sistematika dan tata urutan RPJP Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Daerah dan Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB III : Prediksi Pembangunan Daerah
- BAB IV : Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- BAB V : Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah
- BAB VI : Penutup

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan daerah harus didasari oleh analisis kondisi umum yang berkaitan dengan seluruh aspek fisik dan non fisik daerah. Informasi yang dihasilkan dari analisis ini menggambarkan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Geomorfologi .

1. Secara geografis, Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km². Kabupaten Padang Pariaman terbentang antara 0°11' hingga 0°30' Lintang Selatan dan 98°36' hingga 101°53' Bujur Timur. Luas Kabupaten Padang Pariaman setara dengan 3,15 persen luas daratan Provinsi Sumatera Barat. Luas ini merupakan luas kabupaten terkecil diantara kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Sejumlah kebijakan telah berkonsekuensi terhadap semakin berkurangnya luas Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan PP 17 Tahun 1980, sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kecamatan Koto Tengah, Pauh, dan Lubuk Begalung dilepas untuk perluasan wilayah bagi Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 49 Tahun 1999, Kabupaten Padang Pariaman berkurang lagi seluas 6.011,35 Km² seiring ditetapkan Kepulauan Mentawai sebagai daerah otonom. Terakhir, berdasarkan UU No 12 Tahun 2002, status kota administratif Pariaman meningkat menjadi kota otonom yang mengurangi luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman seluas 73,36 Km².
2. Secara administratif, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan, 46 Nagari dan 364 korong. Kabupaten Padang Pariaman berbatasan dengan Kota Pariaman yang terletak di tengah Kabupaten Padang Pariaman. Berbatasan dengan Kabupaten Agam di sebelah utara, dengan Kota Padang di sebelah selatan, dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar di sebelah timur, serta dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Tiga kecamatan terluas yang berbeda cukup signifikan dengan luas kecamatan lainnya yaitu Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Batang Anai dan IV Koto Aur Malintang. Adapun 14 kecamatan lainnya memiliki luas kurang dari 10 persen terhadap total luas kabupaten. Sedangkan tiga kecamatan terkecil yaitu Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, dan Padang Sago yang memiliki luas kurang dari 35 Km².

3. Dengan letak Kabupaten Padang Pariaman yang mendekati garis khatulistiwa, rendahnya daratan dari permukaan laut dan jarak yang dekat dari pantai menjadikan Padang Pariaman beriklim tropis dengan suhu udara dan kelembaban yang relatif tinggi. Pada tahun 2007¹, suhu udara bulanan berkisar 21° Celcius pada bulan Juni hingga 32°C pada bulan Mei atau rata-rata suhu udara tahunan minimal 22,1° celcius hingga maksimal 31,2° celcius. Kelembaban udara relatif sebesar 85,2% dan tekanan udara tahunan sebesar 903,4 Nbs. Rata-rata kecepatan angin adalah 1,80 km/jam. Pada tahun 2007, rata-rata curah hujan tahunan mencapai 259,34 mm dengan kisaran 74,60 mm pada bulan Juni hingga 439 mm pada bulan Oktober. Jumlah hari hujan rata-rata per tahun yaitu 13,09 dengan kisaran 4,6 hari pada bulan Agustus hingga 20,4 pada bulan November. Dibandingkan dengan tahun 2006, terlihat bahwa terjadi penurunan curah hujan. Pada tahun 2007, menurut penggunaan lahan, seluas 1.036,79 km² atau setara 78 persen luas daerah merupakan lahan budidaya. Selebihnya merupakan kawasan lindung seluas 292 km.
4. Kabupaten Padang Pariaman memiliki garis pantai sepanjang 60,5 Km². Garis pantai ini tersebar pada empat daerah yaitu Kecamatan Sungai Limau sepanjang 24 Km², Kecamatan Batang Anai sepanjang 20 Km², Kecamatan Ulakan Tapakis 16 Km², dan Kecamatan Nan Sabaris sepanjang 0,5 Km². Dengan mengamati peta klas kemiringan lereng², Kabupaten Padang Pariaman memiliki keragaman topografi mulai dari kelas kelerengan datar hingga sangat curam. Namun sebagian besar memiliki kelerengan datar hingga landai dalam proporsi yang relatif seimbang dan diikuti dengan kelerengan yang agak curam. Hanya sebagian kecil daerah yang berada pada kelerengan sangat curam.
5. Topografi Kabupaten Padang Pariaman sangat dipengaruhi oleh aktivitas tektonik dari lempeng Eurasia yang berada di Samudera Hindia, dan patahannya dapat menimbulkan kerawanan gempa bumi baik di daratan maupun di lautan yang berpotensi adanya tsunami. Berdasarkan peta zona gempa Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman memiliki skala intensitas yang menempati zona VII dan VIII dengan episentrum yang relatif dangkal dan sedang.
6. Disamping itu juga terdapat ancaman bencana alam lainnya, dimana curah hujan yang cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan

² Kelas Kemiringan Lereng Kelas : 0 - 8 % Datar, 8 -15 % Landai, 15 - 25 % Agak curam, 25 - 40 % Curam, > 40 % Sangat curam. Akan lebih baik, dan sedang diupayakan, luas daerah menurut kelerengannya.

air yang sedikit, kualitas dan kuantitas drainase yang rendah, serta kurangnya pengelolaan daerah konservasi terutama kerusakan hutan di hulu sungai. Meningkatnya ancaman bagi kelestarian DAS karena dimanfaatkan sebagai daerah pertambangan (bahan galian C) maupun tempat pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Kelestarian sungai berdampak negatif terhadap pasokan air untuk irigasi / sungai dan perikanan darat, ancaman erosi dan banjir, ketahanan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan. Kondisi tersebut dipicu oleh karena perencanaan pengembangan wilayah belum sepenuhnya mengadopsi zonasi ramah lingkungan bahkan akrab bencana, baik dari kerawanan gerakan tanah maupun konservasi untuk antisipasi tsunami. Peran regulasi pemerintah untuk antisipasi bencana misalnya melalui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga belum optimal. Ditandai dengan terus berlangsungnya pembangunan pemukiman dan fasilitas umum maupun sosial di sekitar daerah-daerah rawan bencana.

7. Kondisi hidrologi Kabupaten Padang Pariaman diperlihatkan oleh 11 sungai yang mengalirinya. Pengelolaan sungai-sungai di Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam kawasan DAS Agam-Kuantan. Panjang sungai berkisar dari yang terpendek yaitu 12 km pada Batang Kamumuan dan Batang Piaman hingga yang terpanjang Batang Anai, yaitu sepanjang 54 km. Daerah yang relatif terbanyak dilalui sungai yaitu Kecamatan Sungai Limau yang dilalui 6 dari 11 sungai. Kecamatan Sungai Geringing dilalui oleh 4 sungai, Kecamatan Nan Sabaris oleh 3 sungai. Selainnya oleh 1 atau 2 sungai serta terdapat beberapa kecamatan yang tidak dilalui sungai.
8. Kondisi geologi sangat didominasi oleh formasi alluvium pantai pada daerah-daerah pesisir dan andesit pada daerah yang lebih ke daratan. Sebagian kecil juga diisi oleh formasi lava dan kuarsit. Formasi geologi ini menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai wilayah yang cocok atau potensial bagi pengembangan sejumlah komoditi pertanian. Formasi geologi ini menghasilkan kekayaan bahan galian golongan C yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Deposit terbesar adalah jenis trass dengan deposit mencapai 3.595.000 m³. Diikuti oleh Sirtukil yang mencapai 2.585.000 m³. Andesit dengan deposit mencapai 1.330.000 m³ dan tanah urug berbatu dengan deposit 1.275.000 m³. Selanjutnya, kurang dari 1 juta m³ yaitu tanah urug dengan 585.000 m³ dan batu kapur 500.000 m³. Namun produksi bahan galian terbesar justru sirtukil dan tanah urug yang mencapai lebih dari 200.000 m³.

Tabel 2.1
Jumlah Kejadian Bencana Menurut Jenisnya di
Kabupaten Padang Pariaman 2001-2006

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Banjir	2	4	4	6	7	9
2	Tanah Longsor	4	3	7	17	11	12
3	Gempa bumi	1	0	0	1	2	3
4	Abrasi pantai	0	2	1	1	0	4
5	Angin Badai	7	4	5	3	2	3
6	Kebakaran	42	41	48	46	49	52
7	Lain-lain	7	11	5	7	4	5
Jumlah		63	65	70	81	75	88

Sumber : Bappeda dan BKL, 2007

9. Tingginya tingkat abrasi pantai telah menimbulkan sejumlah kerugian materiil bagi masyarakat sepanjang pesisir. Upaya meminimalisir dampak abrasi pada satu sisi berkonsekuensi terhadap tingginya biaya untuk pemasangan krib, pada sisi lain dapat menimbulkan resistensi karena sulitnya melakukan beberapa aktivitas perikanan tangkap, pukat dan sandaran kapal. Sementara itu kegiatan konservasi berupa pengembangan hutan bakau menemui sejumlah kendala
10. Sosialisasi dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat tentang zona dan peta kerawanan bencana dipublikasi melalui situs resmi pemerintah kabupaten sebagai amanat PP No.25 tahun 2000 dan Kepres no.3 tahun 2001 tentang penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sosilisasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Lebih penting dari itu, dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pembangunan fisik dan infrastruktur sosial serta penataan ruang yang ramah lingkungan. Telah terbentuknya kelembagaan khusus dalam penanggulangan bencana (dinas, Kantor, Badan, Satkolak), infrastruktur fisik berupa *early warning system* untuk gempa dan tsunami, dan dimulainya kegiatan-kegiatan simulasi siaga bencana.

2.1.2 Agama dan Budaya

11. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu sub wilayah budaya dalam khazanah budaya Minangkabau (sub wilayah pesisir). Dalam konteks khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain dan telah dikristalisasi dalam falsafah " adat basandi sarak dan syarak basandi kitabullah. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakteristik utama masyarakat kabupaten Padang Pariaman dan dalam dunia realitasnya menggambarkan pola pikir dan pola tindak

masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Secara normatif, kedua dimensi nilai utama tersebut diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamis (Islam) dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya.

12. Penduduk Kabupaten Padang Pariaman mayoritas beragama Islam (99,80 %), dan hanya sebagian kecil (0,20%) yang memeluk agama lain yaitu Kristen Protestan dan Katolik. Dalam periode 2003 sampai 2007 komposisi penduduk Kabupaten Padang Pariaman menurut agama tidak mengalami perubahan. Data ini mengandung makna bahwa tidak terjadi perubahan keteguhan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam.
13. Dalam konteks pengembangan Islam di Minangkabau, kabupaten Padang Pariaman memiliki posisi dan peran tersendiri. Syarak mandaki secara fisik mengandung makna bahwa pengembangan agama Islam di Minangkabau bermula dari Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya nagari Ulakan kecamatan Ulakan Tapakis. Dalam sejarah dikenal Syech Burhanuddin yang bermakam di nagari Ulakan merupakan ulama pertama yang dengan kepiawaiannya berhasil mengembangkan agama Islam. Melalui kepiawaiannya itulah tercipta pertalian agama dan adat secara utuh sampai saat ini. Pertautan adat dan syarak akan tetap dipertahankan sehingga takkan "***lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh***"
14. Dalam perspektif sejarah implementasi nilai-nilai religius dan adat antara lain secara fisik terlihat dari terbangunnya basis pendidikan ke Islaman melalui kelembagaan surau dan pesantren Kelembagaan surau memberikan kontribusi nyata dalam proses pembentukan manusia yang agamis dan berbudaya serta memiliki daya juang yang tinggi. Suarau bukan hanya berfungsi sebagai pembinaan masyarakat dalam artian ketaatan beribadah, tapi juga pembinaan mental masyarakat untuk tegar dan memiliki daya juang yang tinggi dalam membangun kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat.
15. Nilai nilai sejarah kelembagaan surau, secara arif dan bijak disikapi oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat dan diakomodasikan oleh setiap pemerintahan kabupaten dan Kota melalui arah kebijakan strategis kembali ke nagari dan kembali ke surau. Khusus kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 46 nagari dan 364 korong yang telah beropersi melalui Perda pemerintahan nagari memperlihatkan dinamika yang kurang sesuai dengan arah kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Nagari diposisikan sebagai tingkat pemerintahan terendah yang diharapkan mampu mengaktualkan seluruh potensi pembangunan yang dipunyai oleh setiap nagari, ternyata belum berperan maksimal. Persoalan ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas SDM pemerintahan nagari. Kualitas SDM pemerintahan nagari merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pemerintahan nagari yang berkualitas.

16. Dinamika kehidupan agama dan budaya selalu memperlihatkan perkembangan. Mushalla/surau sebagai tempat aktifitas sosial dan agama memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2003 terdapat 1.757 mushalla dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1857. Namun jumlah mesjid terjadi penurunan dari 304 pada tahun 2003 menjadi 302 pada tahun 2007. Dengan jumlah mushalla/surau sebanyak 1857 dan jumlah korong sebanyak 364, berarti rerata mushalla/surau pada setiap korong sebanyak 5 mushalla/surau. Sedangkan rerata mesjid pada setiap nagari sebanyak 6. Data ini memberikan gambaran bahwa secara kuantitas fasilitas fisik untuk mendukung kegiatan agama dan sosial lainnya pada setiap nagari dan korong sudah cukup memadai. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan kuantitas dan kualitas pemanfaatan mushalla/surau dan mesjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial.
17. Jumlah fasilitas fisik yang cukup memadai juga diikuti oleh jumlah ulama yang selalu memperlihatkan perkembangan. Pada tahun 2003 jumlah ulama di kabupaten Padang Pariaman sebanyak 490 orang. Pada tahun 2007 meningkat menjadi 523 orang. Dilihat dari segi peningkatan jumlah ulama per tahun periode 2003 - 2007, rerata peningkatan ulama per tahun hanya 6 orang. Dibandingkan dengan jumlah mesjid pada tahun 2007, setiap mesjid hanya memiliki 2 orang ulama. Sedangkan dibanding dengan jumlah mushalla/surau, ternyata setiap mushalla/surau belum memiliki ulama. Pada sisi lain jika dibanding jumlah penduduk maka rasio ulama dengan jumlah penduduk adalah 1 : 740. Gambaran data ini memperlihatkan eksisnya persoalan ketidakseimbangan antara jumlah fasilitas fisik mesjid dan mushalla/surau dengan perkembangan jumlah ulama yang berfungsi sebagai pembina dan pengayom umat. Akibatnya, perkembangan tempat ibadah berupa Mesjid dan mushalla/surau tidak diikuti oleh peningkatan dalam pembinaan dan pengembangan nilai-nilai religius kepada seluruh komponen masyarakat. Buktinya, terjadinya penurunan pembinaan rohani yang dilakukan kepada remaja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003 telah dilakukan 204.613 pembinaan rohani, baik untuk remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Untuk tahun 2006 pembinaan untuk remaja laki-laki dan perempuan menurun menjadi 162.375. Penurunan pembinaan yang cukup signifikan ini dapat mengakibatkan terjadinya penurunan nilai-nilai keagamaan bagi remaja laki-laki dan perempuan. Pada sisi lain di saat yang sama, pengaruh global akibat semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi semakin meningkat. Nilai-nilai global yang berbenturan dengan nilai-nilai lokal akan berdampak buruk terhadap sikap dan tingkah laku remaja.
18. Kesalehan masyarakat baik secara individu maupun sosial diperlihatkan antara lain oleh jumlah penduduk yang menunaikan ibadah haji dan ibadah Qurban. Jumlah penduduk yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun selalu

berfluktuasi. Dalam periode 2003 – 2007, rerata jumlah penduduk yang menunaikan ibadah haji hanya 256 orang. Berarti pada setiap nagari hanya 5 orang per tahun dan per korong hanya kurang dari satu orang (0,70). Artinya ada korong yang penduduknya tidak menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Ibadah Qurban juga proksi lain dari kesalehan penduduk. Jumlah penduduk yang menunaikan ibadah Qurban juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, hanya 13.750 orang yang menunaikan ibadah Qurban. Jumlah ini turun cukup signifikan menjadi 10.080 orang pada tahun 2007. Rerata jumlah penduduk yang menunaikan ibadah Qurban dalam periode 2003 – 2007 hanya 9.958 orang. Berarti rerata setiap nagari yang menunaikan ibadah Qurban hanya 216 orang dan per korong hanya 27 orang. Berarti rerata hewan Qurban pada setiap jorong hanya 4 ekor sapi. Gambaran data ini memperlihatkan relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat pada setiap nagari dan jorong.

19. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah, semakin berkembangnya media informasi dan komunikasi mengakibatkan semakin terbukanya peluang pembauran dan komunikasi serta informasi yang lintas wilayah budaya. Oleh karena itu membangun ketahanan budaya dan nilai-nilai inti lokal sangat diperlukan sehingga arus informasi dan komunikasi yang lintas budaya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan nilai-nilai budaya lokal. Dalam konteks inilah peran kelembagaan adat pada tingkat nagari memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam membangun keutuhan nilai-nilai budaya lokal.
20. Kelembagaan adat pada tingkat nagari berperan untuk menjaga keutuhan dan implementasi orientasi nilai budaya lokal dalam lingkup kesatuan hukum adat dengan falsafah adat salingka nagari dan korong salingka buek. Kaum adat yang disebut orang tigo jinih ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan lembaganya disebut tungku tigo sajarangan serta aturan yang mengatur kewenangan masing-masing disebut tali tigo sapilin yaitu adat kewenangan ninik mamak, syara' kewenangan alim ulama dan undang-undang kewenangan kaum cerdik pandai dan didalam pemerintahan nagari terhimpun dalam satu wadah yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada sisi lain struktur pemerintahan nagari juga dikembangkan beberapa sub institusi seperti BPAN dan sekarang berubah menjadi Badan Musyawarah Nagari (Bamus).
21. Dimensi struktural memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan sumberdaya modal ekonomi dan sosial yang ada pada setiap nagari. Representasi dari realitas ini adalah masalah tanah ulayat yang secara struktural terdiri dari ulayat nagari dan ulayat kaum. Setiap ulayat tersebut pengambilan keputusan pemanfaatannya berada di institusi adat yang

berbeda. Dimensi strukturalnya ini pada saat yang sama berhadapan dengan institusi lain dalam bentuk hukum positif (UUPA 1961). Kedua institusi ini berbeda cukup signifikan dalam aspek subjek hukumnya.

22. Gambaran kondisi adat dan budaya di atas, pada satu sisi memiliki potensi yang cukup signifikan dalam proses percepatan pembangunan berbasis nilai-nilai religius dan budaya lokal. Namun pada sisi lain, dinamikanya memperlihatkan kondisi yang masih jauh dari harapan dan tuntutan ideal. Secara kuantitas fasilitas fisik rumah ibadah dalam bentuk mesjid dan surau relatif cukup memadai. Namun kualitas pemanfaatannya relatif rendah seperti diperlihatkan oleh aktifitas wirid pada setiap mesjid dan surau yang masih jauh dari harapan dan tuntutan ideal. Kondisi ini sangat mungkin disebabkan oleh tokoh adat dan agama pada tingkat nagari dan korong kurang memiliki kepedulian dalam memanfaatkan mesjid dan surau sebagai wadah dalam mensyiarkan nilai-nilai islami dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi lain surau dan pesantren (38 pesantren Salafyah) yang ada hampir pada setiap nagari belum memperlihatkan pengembangan nilai-nilai islamiah yang inklusif dan terbuka. Pemahaman nilai-nilai islam yang melahirkan sikap dan perilaku yang taklid, tertutup dan cenderung fatalis merupakan fenomena dan realitas yang mewarnai lingkungan surau dan pesantren. Persoalan ini diduga sangat erat kaitannya dengan kualitas kelembagaan, manajemen dan SDM surau dan pesantren. Pada gilirannya hal ini mengakibatkan munculnya persoalan rendahnya kualitas pemahaman agama bagi masyarakat. Agama hanya difahami secara formalis dan simbolis serta lebih mengutamakan kegiatan seremoni. Belum begitu terlihat secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat yang diwarnai oleh nilai-nilai islami seperti kepedulian sosial antar kelompok dan antar individu. Pemahaman nilai-nilai islami yang penuh dengan nilai-nilai perjuangan, etos kerja, penghargaan terhadap prestasi dan dorongan untuk maju dan berkembang belum terwujud sebagai basis dan mesin penggerak utama dalam membangun masyarakat yang unggul dan berdaya saing. Pada sisi lain permasalahan aktual didalam masyarakat dan sangat merisaukan seluruh lapisan masyarakat adalah perilaku asusila seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian dan pergaulan muda mudi yang berbenturan dengan nilai agama dan adat. Semua permasalahan ini menuntut revitalisasi dan reorientasi dalam proses perwujudan kelembagaan mesjid, surau/mushalla dan pesantren yang inklusif dan terbuka.

23. Dalam konteks eksistensi kelembagaan adat pada tingkat nagari ternyata semakin memperlihatkan eksistensi yang rendah dan memudar. Akibatnya, orientasi nilai budaya lokal yang terkristalisasi dalam filosofi adat Minangkabau semakin tidak teraktualisasi dalam kehidupan nyata masyarakat. Nilai-nilai filosofis adat semakin jauh dari kehidupan nyata masyarakat dan sekedar

hiasan bibir utamanya bagi generasi muda. Kondisi ini mengindikasikan tidak maksimalnya fungsi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari dalam mentransformasikan nilai-nilai filosofis adat Minangkabau. Pada sisi lain, semakin jarang ditemukan tokoh adat pada tingkat nagari yang kharismatik dan memiliki keperibadian yang mampu memberikan ketauladan kepada masyarakat. Bahkan sering ditemukan tokoh adat yang terlibat kasus asusila seperti perjudian.

24. Permasalahan nyata lainnya adalah disharmoni antara kelembagaan pemerintahan nagari dengan kelembagaan adat nagari. Belum terlihat sinergitas antar kelembagaan tersebut bahkan yang sering terjadi adalah konflik kepentingan yang bersifat kelembagaan dan pada gilirannya sering melahirkan konflik personal.
25. Pada sisi lain dan di saat yang sama, pengembangan kelembagaan agama dan adat memiliki peluang yang semakin besar karena semakin tingginya komitmen pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk menjadikan kelembagaan agama dan adat sebagai basis dalam pengembangan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Komitmen kembali ke nagari dan ke surau merupakan bukti nyata dari kepedulian pemerintah daerah untuk mengembangkan kelembagaan agama dan adat pada tingkat nagari. Salah satu wujud konkrit dari komitmen dan kepedulian tersebut adalah ditetapkannya alokasi anggaran untuk pengembangan kelembagaan agama dan adat setiap tahunnya dalam APBD kabupaten Padang Pariaman.

2.1.3 Hukum dan Pemerintahan

26. Perubahan mendasar yang telah terjadi dalam kerangka sistem pemerintahan memberikan peluang yang semakin besar kepada setiap pemerintah kabupaten dan Kota untuk berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan optimalitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan yang dipunyai oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang semakin luas dalam mendesain perencanaan pembangunan yang sesuai dengan potensi pembangunan yang dipunyai. Pada sisi lain DPRD sebagai unsur pemerintah kabupaten memiliki peran dan kewenangan yang semakin strategis. Intitusi ini secara normatif diharapkan mampu melahirkan pemikiran dan visi strategis dalam proses percepatan pembangunan. Secara teknis operasional institusi DPRD diharapkan mampu melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasinya secara maksimal. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategis dan mendorong top manajemen eksekutif untuk tetap fokus dan konsisten serta profesional merupakan tuntutan normatif yang harus dipenuhi oleh Eksekutif.

Oleh karena itu kolaborasi efektif antara pimpinan eksekutif dan legislatif merupakan kondisi awal yang harus diciptakan dan diupayakan secara maksimal. Secara normatif, pencapaian kinerja pembangunan daerah terletak dipundak kedua institusi tersebut. Namun tantangan utama yang dihadapi adalah harmonisasi dan sinergitas antara kedua insitusi ini masih merupakan kondisi yang semakin jauh dari harapan dan tuntutan ideal masyarkat.

27. Implementasi dan maksimisasi fungsi dan peran pemerintah daerah berada dalam bingkai sistem hukum dan politik nasional. Berdasarkan kerangka sistem hukum dan politik nasional inilah pemerintah kabupaten diberikan kewenangan yang luas dalam merumuskan keputusan politik lokal dalam bentuk norma-norma dan nilai-nilai inti lokal yang harus diakomodasikan kedalam peraturan daerah dan merupakan bahagian dari materi hukum yang berlaku dalam batas kewenangan pemerintah kabupaten. Dalam konteks pemikiran legalitas inilah teraktualisasinya fungsi sistem hukum yang terdiri dari penyelesaian sengketa, penghukuman dan fungsi perubahan sosial. Pada sisi lain terbangunnya budaya hukum yang merupakan pandangan masyarakat terhadap norma-norma hukum dan institusi yang berfungsi sebagai penegak hukum itu sendiri. Budaya hukum itu sendiri mencakup aspek tingkat keberlakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan norma – norma dalam konteks adat istiadat dan agama. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum antara lain diperlihatkan oleh banyaknya anggota masyarakat yang terjerat kasus hukum. Pada tahun 2007, tercatat sebanyak 227 kasus hukum di Kejaksaan Negeri Pariaman. Berarti rata-rata anggota masyarakat pada setiap nagari yang terjerat hukum sebanyak orang. Relatif tingginya kasus hukum ini erat kaitannya dengan kesadaran masyarkat tentang norma hukum dan norma adat istiadat. Kesadaran masyarakat yang relatif rendah diduga ada kaitannya dengan penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Ternyata pada dalam periode 2000 - 2007, rerata hanya 6 nagari yang mendapat penyuluhan hukum.

28. Keputusan politik lokal yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah pada hekatatnya harus mampu memberikan stimulans dan insentif kepada masyarakat, utamanya para pelaku bisnis lokal yang harus diposisikan sebagai mitra pemerintah dalam peroses percepatan pembangunan yang pro kemiskinan dan pengangguran. Maksimisasi fungsi legislasi yang melekat di institusi DPRD kabupaten Padang Pariaman diperlihatkan antara lain oleh peraturan daerah yang sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah. Dalam periode 2002 - 2007 telah terealisasi sebanyak 84 buah Perda dengan rarata perda tiap tahunnya sebanyak 14 buah. Namun dari jumlah Perda yang ada, ternyata sebahagian besar berkaitan dengan penggalian Potensi PAD Kabupaten Padang Pariaman. Ke depan juga dibutuhkan Perda-Perda lain yang berkaitan

dengan penciptaan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas sehingga terwujud pemerintahan kabupaten Padang Pariaman yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan kabupaten Padang Pariaman. Pelaksanaan fungsi lainnya yang melekat di DPRD adalah fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Pelaksanaan kedua fungsi ini diharapkan mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran sehingga dengan anggaran yang sama dapat dilaksanakan program dan kegiatan yang lebih banyak.

29. Dinamika dalam konteks pemerintahan dan pembangunan telah menimbulkan kebijakan strategis dalam bentuk pemekaran wilayah kecamatan dan nagari. Dinamika ini didukung oleh UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU ini pemerintahan provinsi dan kabupaten diberikan kewenangan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan tuntutan tradisi lokal, asal usul dan norma adat istiadat pada setiap daerah. Dalam konteks acuan legal inilah pemerintahan provinsi Sumatera Barat mengartifikan kebijakan otonomi daerah melalui keputusan politik lokal kembali ke pemerintah nagari melalui Perda No 9 tahun 2000 dan direvisi menjadi Perda No 2 tahun 2007. Pada tingkat pemerintahan kabupaten juga ada ruang untuk melakukan pemekaran pemerintahan terendah yaitu kecamatan dan nagari. Pemerintahan kabupaten Padang Pariaman telah melakukan pemekaran Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, juga diikuti oleh pemekaran Nagari pada masing-masing Kecamatan. Pada tahun 2007 telah terjadi perubahan dan pemekaran wilayah kecamatan seperti diperlihatkan oleh Tabel 2.2. Secara legal dan kontekstual, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan penuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap tingkat dan unit pemerintahan secara optimal dan berkualitas. Transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi merupakan acuan normatif yang dijadikan fondasi setiap implementasi kebijakan, program dan kegiatan. Namun masih merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kebijakan pemerintah yang berkualitas untuk mewujudkan good governance.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Nagari dan Korong
Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007

NO	KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	JUMLAH KORONG
1	Batang Anai	3	26
2	Lubuk Alung	1	10
3	Sintuk Toboh Gadang	2	29
4	Ulakan Tapakis	2	33
5	Nan Sabaris	5	40
6	2x11 Enam Lingkung	3	12
7	Enam Lingkung	5	26
8	2x11 Kayu Tanam	4	21
9	VII Koto Sungai Sarik	4	40
10	Patamuan	2	14
11	Padang Sago	3	15
12	V Koto Kampung Dalam	2	26
13	V Koto Timur	3	28
14	Sungai Limau	2	18
15	Batang Gasan	2	11
16	Sungai Geringging	2	9
17	IV Koto Aur Malintang	1	6

Sumber : Padang Pariaman Dalam Angka, 2007

30. Efektifitas dan efisiensi struktur pemerintahan kabupaten, kecamatan dan nagari sangat ditentukan oleh kualitas sistem dan mekanisme serta kualitas sumberdaya manusia yang pada sistem tersebut. Pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai pegawai sebanyak 7.924 personil yang tersebar pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan komposisi sebagai berikut : Golongan I sebanyak 124 orang, Golongan II sebanyak 1.531 orang, Golongan III sebanyak 4.958 orang, dan Golongan IV sebanyak 1.311 orang. Dari komposisi pegawai berdasarkan golongan ternyata persentase pegawai dengan Golongan III mendominasi komposisi pegawai (62,57 %) dari keseluruhan jumlah pegawai. Sementara persentase pegawai yang paling sedikit berdasarkan golongan adalah pegawai yang bergolongan I (1,56 %) dari total keseluruhan pegawai. Peningkatan jumlah pegawai dalam 3 tahun terakhir (2005-2007) tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat untuk penerimaan pegawai secara Nasional sampai tahun 2009. Kemudian pengangkatan tenaga-tenaga honorer yang telah bertugas 5-10 tahun di Kabupaten Padang Pariaman otomatis dikeluarkan SK Kepegawaiannya. Ditambah dengan pengangkatan pegawai dari umum (masyarakat luas) dari setara pendidikan SMA-Perguruan Tinggi mengakibatkan kenaikan jumlah PNS di Kabupaten Padang Pariaman.

31. Peningkatan pegawai secara kuantitas juga telah diikuti oleh peningkatan kualifikasi pendidikan formal. Dalam 5 tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan kualifikasi pendidikan pegawai dari strata satu menjadi strata dua. Disamping itu juga telah dilakukan pendidikan penjejaran yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapabilitas setiap aparatur pemerintah kabupaten Padang Pariaman.
32. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman adalah semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat dan semakin terbukanya ruang publik sehingga masyarakat semakin kritis dan memiliki keberanian dalam mengklaim keputusan politik lokal. Kasus demonstrasi masyarakat terhadap keputusan politik lokal tentang pemindahan ibukota Kabupaten Padang Pariaman merupakan bukti nyata tingkat keberanian masyarakat yang semakin meningkat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah kabupaten. Pengelolaan yang berkualitas dalam merespons klaim dan kritik masyarakat sangat diperlukan sehingga konflik vertikal antara masyarakat dan aparatur pemerintah dapat diminimalisasi secara maksimal.
33. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam kerangka sistem pemerintahan kabupaten adalah rendahnya kualitas tata kelola pemerintah. Pada sisi lain pemerintah kabupaten dituntut untuk mampu secara berkualitas menata urusan pemerintah secara otonom sesuai dengan kaedah dan nilai – nilai otonomi daerah yang dilandasi oleh prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan. Namun permasalahan yang berkaitan dengan kualitas birokrasi pemerintah daerah masih merupakan kendala dalam implementasi hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Fenomena ini diperlihatkan oleh: (1) belum terbangunnya budaya organisasi yang mendukung implementasi otonomi daerah; (2) penempatan aparatur pemerintah daerah yang belum didasarkan kepada kriteria dan azas profesionalitas. Akibatnya, terciptanya iklim kerja yang kurang kondusif yang diperlihatkan oleh sulitnya pimpinan menggerakkan dan mengarahkan staf, sulitnya koordinasi antar unit kerja dan pada gilirannya menghambat efektifitas dan efisiensi kerja; (3) belum terwujudnya koordinasi baik secara horisontal maupun vertikal di lingkungan SKPD dalam lingkup pemerintahan kabupaten Padang Pariaman maupun dengan institusi legislatif; (4) masih rendahnya komitmen aparatur pemerintah daerah dalam proses penerapan good governance ; (5) rekrutmen pegawai honor daerah yang belum didasari oleh kebutuhan setiap SKPD. Pada sisi lain seluruh pegawai honor daerah akan diangkat menjadi pegawai negeri. Akibatnya, ditemukan sejumlah pegawai dengan bidang keahlian yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan pada gilirannya terjadi pemborosan anggaran publik.

34. Peluang kearah perbaikan dan peningkatan kualitas institusi pemerintah kabupaten terbuka lebar. Namun perlu komitmen total dari seluruh unsur pemerintah kabupaten dalam proses perwujudannya. PP No 8 tahun 2003 memberikan ruang dan peluang untuk melakukan perbaikan yang berorientasi kepada penciptaan kualitas birokrasi yang mampu melahirkan postur birokrasi yang efektif dan efisien.

2.1.4 Ekonomi

35. Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang potensial sebagai basis dalam mendorong percepatan pembangunan. Aktivitas ekonomi disektor pertanian memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi agroindustri yang unggul dan berdaya saing. Dari sejumlah produk pertanian tersebut, kelapa dan kakao merupakan dua jenis produk yang sangat potensial untuk dijadikan produk unggulan daerah kabupaten Padang Pariaman karena mempunyai sumberdaya yang relatif besar sehingga dapat dijadikan sebagai core competency daerah

36. Gambaran data pada Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi wilayah kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan harapan dan tuntutan pembangunan ekonomi regional yaitu terciptanya perubahan struktur ekonomi regional dengan arah dan pola yang jelas. Selama periode analisis, rerata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Padang Pariaman sebesar 30,87%. Dalam periode yang sama, rerata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB propinsi Sumatera Barat sudah relatif kecil hanya sebesar 23,53%. Penurunan besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB propinsi Sumatera Barat ternyata tidak diikuti oleh peningkatan rerata kontribusi sektor industri, dalam periode yang sama hanya sebesar 13,14%. Sedangkan rerata kontribusi sektor industri terhadap pembantuan PDRB kabupaten Padang Pariaman relatif tinggi dibanding propinsi Sumatera Barat yakni sebesar 14,14%. Namun peningkatan kontribusi sektor industri yang relatif tinggi dibanding propinsi Sumatera Barat tidak diikuti oleh penurunan kontribusi sektor pertanian. Dalam konteks pemikiran perubahan struktur ekonomi regional, data ini mengindikasikan belum terciptanya transformasi ekonomi regional dengan arah dan pola yang jelas. Indikasi ini diperlihatkan oleh masih berfluktuasinya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Padang Pariaman. Namun fluktuasi yang terjadi tidak signifikan bahkan cenderung terjadi stagnasi sektor pertanian dalam memberikan kontribusinya terhadap PDRB. Gambaran data ini memperlihatkan tiga persoalan sektor pertanian di kabupaten Padang Pariaman; (1) belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian dan hal ini diperlihatkan oleh rendahnya produktivitas usaha pertanian dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya produktivitas marginal usaha pertanian; (2) rendahnya adopsi teknologi pertanian dan sistem pengairan yang masih mengandalkan tadah hujan; (3) aktivitas usaha pertanian yang belum berorientasi pasar.

Tabel 2.3
Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2002-2006

No	Sektor Ekonomi	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian	31,79	31,58 (4,13)	30,79 (3,38)	30,33 (3,84)	29,85 (4,39)
	a. Tanaman Pangan	23,23	22,57 (1,74)	21,68 (2,54)	20,70 (1,10)	20,30 (4,09)
	b. Perkebunan	2,41	2,67 (16,66)	2,95 (19,04)	3,22 (18,00)	3,24 (5,08)
	c. Peternakan	2,31	2,36 (5,88)	2,38 (0,62)	2,54 (8,33)	2,45 (5,12)
	d. Kehutanan	0,40	0,38 (2,72)	0,37 (3,88)	0,37 (2,68)	0,37 (3,10)
	e. Perikanan	3,45	3,60 (7,93)	3,41 (0,38)	3,49 (5,79)	3,49 (4,86)
2	Pertambangan dan Penggalian	4,78	4,75 (3,31)	4,83 (7,38)	4,79 (7,38)	4,96 (7,41)
3	Industri Pengolahan	14,18	14,15 (3,11)	14,09 (5,34)	14,18 (5,79)	14,10 (6,49)
4	Listrik, Gas dan air Bersih	1,22	1,31 (11,17)	1,56 (10,96)	1,85 (7,26)	1,92 (7,50)
5	Bangunan	5,03	5,38 (6,90)	5,50 (7,88)	5,75 (7,91)	6,06 (8,93)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,06	15,18 (3,56)	15,00 (4,16)	14,84 (4,82)	14,75 (5,14)
7	Pengangkutan dan komunikasi	4,21	4,25 (3,96)	4,38 (5,19)	4,50 (3,75)	4,58 (4,96)
8	Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	2,53	2,59 (8,24)	2,61 (2,17)	2,68 (5,48)	2,76 (5,11)
9	Jasa	21,20	20,81 (2,83)	21,24 (4,90)	21,09 (3,80)	21,02 (5,07)
		1496702,06	1554214,88 (3,84)	1626611,20 (4,66)	1703313,67 (4,72)	1794952,83 (5,38)

Keterangan: () menunjukkan pertumbuhan ekonomi sektoral

37. Sektor industri yang diharapkan terjadi peningkatan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB, ternyata kontribusinya relatif konstan selama periode analisis (14,14%). Dalam konteks analisis transformasi ekonomi regional, diharapkan terjadi peningkatan kontribusi sektor industri yang signifikan. Relatif stagannya kontribusi sektor industri dan besaran kontribusi yang relatif rendah mengindikasikan persoalan produktivitas usaha industri yang masih relatif rendah. Diperkirakan persoalan ini berkaitan dengan desain perencanaan dan pengembangan usaha masyarakat yang belum terarah dan belum mampunya masyarakat dalam membangun jaringan usaha yang berorientasi pasar.

38. Dimensi lain yang perlu diungkapkan melalui data pada Tabel 2.3 adalah fenomena ketimpangan produktivitas sektoral. Sektor pertanian yang mampu

menyerap angkatan yang relatif besar (75%), ternyata hanya memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 30,30%. Sedangkan sektor industri dengan jumlah angkatan kerja yang diserap hanya 6,13% tapi mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 14,14% dan sektor jasa dengan jumlah angkatan kerja yang diserap hanya 4,25% tapi mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 21,07%. Ketimpangan produktivitas sektoral sangat mungkin disebabkan oleh: (a) terjadinya ketimpangan kualitas intangible assets antara sektor pertanian dan sektor jasa; (b) perbedaan harga dan nilai tambah yang dihasilkan oleh kedua sektor tersebut; (c) belum optimalnya tingkat pemanfaatan sumberdaya pertanian yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat adopsi teknologi pertanian. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan tindakan oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk membangun kinerja sektor pertanian dengan pendekatan sistem agrobisnis. Artinya, pengembangan sektor pertanian yang berfungsi sebagai basis dalam membangun dan mengembangkan sektor industri dengan inputnya yang berasal dari sektor pertanian. Upaya ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani. Kebijakan ini sangat relevan dengan kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

39. Jika dilihat kinerja per sub sektor pertanian ditemukan kinerja yang sangat memperhatikan adalah adalah sub sektor kehutanan. Selama periode analisis, sub sektor ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB hanya 0,38%. Sedangkan dari segi luas wilayah, sebanyak 31,70% merupakan kawasan hutan. Pada tingkat Sumatera Barat, sub sektor ini juga belum memperlihatkan kinerja yang maksimal. Rerata kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pembentukan PDRB hanya 2,17%. Hal ini mengindikasikan sangat tidak optimalnya pemanfaatan nilai ekonomis yang dikandung oleh sektor kehutanan tersebut.
40. Kinerja sektor industri juga belum memperlihatkan kinerja maksimal yang sesuai dengan potensi yang dipunyai. Pada satu sisi, dalam konteks perubahan struktur ekonomi regional sektor industri diharapkan memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB. Namun realitasnya hanya rerata 14,14% selama periode analisis. Walaupun angka ini di atas propinsi Sumatera Barat, namun pada tingkat propinsi potensi yang dipunyai oleh sektor iindustri diperkirakan juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya kontribusi sektor industri juga disebabkan oleh belum mampunya para pelaku di sektor tersebut: (a) untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah yang relatif tinggi; (b) menciptakan kreasi dan inovasi produk industri kecil. Seluruh faktor penyebab tersebut diperkirakan bersumber dari rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor iindustri. Buktinya, sebanyak 62,20 % angkatan kerja yang siap untuk bekerja hanya berpendidikan SD dan tidak Tamat SD. Seluruh persoalan yang dihadapi dalam upaya membangun kinerja ekonomi sektoral berawal dari persoalan rendahnya pengetahuan dan penguasaan teknologi dari sumber dayamanusia pada masing-masing sektor ekonomi tersebut. Kondisi ini sekaligus merupakan tantangan utama dalam percepat proses pembangunan yang berkualitas.

41. Sektor ekonomi yang memperlihatkan kinerja relatif baik adalah sektor jasa. Selama periode analisis sektor ini telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 21,07%, sedangkan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor tersebut hanya sebanyak 4,21% dari total angkatan kerja. Artinya, peningkatan kinerja di sektor ini tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Demikian juga halnya dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, selama periode analisis mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 14,97%. Walaupun kontribusi sektor ini lebih rendah dari besaran kontribusi pada tingkat propinsi Sumatera Barat (17,87%). Ternyata kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tidak diikuti oleh kemampuan penyerapan tenaga kerja yang seimbang dengan kontribusi sektoral yang dipunyai oleh sektor tersebut. Hal yang sama juga diikuti oleh sektor jasa, kontribusi sektoral yang tinggi tapi tidak diikuti oleh kemampuan menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi.
42. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional (daerah). Di samping itu, Kabupaten dan Kota serta propinsi juga berbeda dalam hal pendapatan per kapitanya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) tahun periode 2002 – 2006 adalah 6,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman periode 2002 – 2006 lebih tinggi dari Kabupaten dan kota tetangga serta dari propinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 5,16 persen.
43. Dari sisi pendapatan per kapita, pendapatan per kapita dinyatakan berdasarkan PDRB per kapita ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) untuk tahun 2002 - 2006 rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Padang Pariaman adalah Rp 6,54 juta. Sementara, rata-rata pendapatan per kapita propinsi Sumatera Barat adalah Rp. 8,26 juta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Padang Pariaman secara relatif masih rendah bila dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat.
44. Dilihat dari sisi pertumbuhan sektoral, sektor pertanian juga belum memperlihatkan kondisi yang diinginkan. Pada tahun 2001 pertumbuhan sektor pertanian hanya 4,13% dan pada tahun 2002 dan 2003 turun menjadi 3,38% dan 3,84%. Rerata pertumbuhan sektor ini selama periode analisis hanya 3,93%. Jika ditelusuri pertumbuhan sub sektor pertanian, ternyata pertumbuhan sub sektor tanaman pangan dengan jumlah penduduk yang relatif besar di sektor tersebut, memperlihatkan kinerja yang tidak sesuai dengan potensi yang dipunyai. Selama periode analisis, rerata pertumbuhan sub sektor tanaman pangan hanya 2,36%. Sub sektor yang menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi adalah sub sektor perikanan (5,50%). Seluruh aspek realitas di atas mencerminkan performa ekonomi sektoral yang belum sesuai dengan proses perubahan struktur ekonomi regional yang sehat dan dinamis. Karenanya, sangat diperlukan kebijakan penataan ekonomi sektoral dalam kerangka perspektif jangka panjang. Melalui kerangka tersebut diharapkan tercipta

pertumbuhan ekonomi regional yang mampu menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan stabilitas ekonomi regional.

45. Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi adalah peningkatan pertumbuhan investasi baik domestik maupun asing di kabupaten Padang Pariaman. Kondisi pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa hanya satu proyek PMDN yang telah disetujui dengan nilai Rp 10 milyar, namun tidak terealisasi. Pada tahun 2007 juga hanya 2 proyek PMDN yang telah disetujui tapi hanya satu proyek PMDN yang terealisasi dengan nilai Rp 3 milyar. Sedangkan pada tahun yang sama tidak satu pun proyek PMA yang terealisasi di kabupaten Padang Pariaman. Jika dibandingkan dengan kabupaten Sijunjung, Solok Selatan dan Pesisir Selatan, arus investasi ke Kabupaten relatif rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya daya tarik daerah dan diikuti oleh struktur insentif yang berfungsi sebagai stimulan bagi investor. Salah satu bentuk stimulan dan insentif bagi sektor swasta adalah alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk investasi pemerintah. Namun kemampuan pemerintah dalam melakukan investasi juga relatif terbatas. Gambaran investasi pemerintah kabupaten Padang Pariaman relatif rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan nyata dalam konteks mendorong investasi swasta. Dalam periode 2002 – 2006 rata-rata investasi pemerintah hanya Rp 60.758.630.000,-.

2.1.5 Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

46. Limpahan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah memberikan peluang bagi wilayah tersebut dalam membangun keunggulan komparatif. Dengan keunggulan tersebut pada gilirannya mampu menciptakan efisiensi dalam menghasilkan berbagai komoditas yang berorientasi pasar. Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup memadai untuk mendukung berbagai aktifitas ekonomi di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan), sektor industri dan pertambangan.
47. Bahan galian / tambang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berupa bahan bangunan dan bahan industri yang dikategorikan sebagai bahan galian golongan C yang tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan yang ada di Wilayah ini. Adapun beberapa jenis bahan galian tersebut adalah (1) Tanah uruk berbatu yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang. Dengan cadangan sebesar 2.975.000 m³ dan produksi 180.000 m³. (2) Obsidian atau batu gelas yang terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 257.000 m³ yang baru dihasilkan sebanyak 10.000 m³.; (3) Batu apung atau perlit juga terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 140.000 m³ dan yang sudah diproduksi baru 5000

m³ (4) Trass pasiran yang terdapat di Kec. Sungai Geringging dengan cadangan sebesar 75.000 m³. (5) Trass yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, 2 x 11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging dan VI Koto Aur Malintang dengan jumlah cadangan sebesar 4.190.000 m³ dan yang telah diproduksi baru mencapai 18000 m³.(6) Trass berbatu apung yang terdapat di Kec. VII Koto Sungai Sarik, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan sungai geringging dengan jumlah cadangan sebesar 1.045.000 m³ dan yang telah diproduksi bareu mencapai 25000 m³ (7) Sirtukil yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau dan Sungai Geringging dengan jumlah cadangan sebesar 2.635.000 m³ dengan jumlah produksi sebesar 170.000 m³, (8) Andesit yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam dan Patamuan dengan cadangan sebesar 1185000 m³ dan yang sudah di produksi sebesar 45000 m³, (9)Tanah liat terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur dan Sungai Limau dengan jumlah cadangan sebesar 785.000 m³ dan yang sudah di produksi sebesar 90.000 m³.

48. Potensi sumberdaya berupa hutan dengan segala nilai ekonomis yang dikandungnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Namun pemanfaatan hutan harus tunduk kepada aturan legal yang telah ditetapkan pemerintah. Pada umumnya hutan di Kabupaten Padang Pariaman adalah hutan lindung dan hanya sebagian kecil yang merupakan hutan rakyat. Areal hutan tahun 2003, mengalami penurunan seluas 310 Ha yaitu 42.430 Ha tahun 2000 menjadi 42.120 Ha pada tahun 2007. Penurunan tersebut sebagian besar karena dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai areal pertanian, pemukiman dan peruntukan lainnya. Potensi kehutanan di Kabupaten Padang Pariaman belum dimanfaatkan untuk hutan produksi, tetapi hanya difungsikan sebagai hutan lindung, perlindungan dan pelestarian alam. Berdasarkan SK Men.Hut. No.422/Kpts.11/1999 tanggal 15 Juni 1999 luas kawasan hutan Kabupaten Padang Pariaman ± 31.335 Ha yang terdiri dari : (1) Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) ± 11.441 Ha, (2) Hutan Lindung (HL) ± 19.894 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut setiap tahunnya mengalami kerusakan, yang diantaranya disebabkan oleh kegiatan perladangan berpindah dan perambahan hutan.

49. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui kegiatan reboisasi dari tahun 2002 s/d 2007 seluas ± 1.451 Ha, namun belum belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Pada umumnya sebaran lahan kritis yang terdapat di wilayah

Kabupaten Padang Pariaman berada pada areal perbukitan, dan merupakan daerah hulu dari daerah tangkapan air (DTA) atau daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Dampak dari keberadaan lahan kritis tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis wilayah DAS. Kondisi ini dapat dilihat sepanjang tahun 2006, sungai utama yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Anai, Batang Mangau dan Batang Gasan menunjukkan nilai *koefisien run off* (c) dan Koefisien Region Sungai (KRS) tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan kondisi ketiga DAS tersebut berada pada kondisi buruk .

50. Luas perairan laut Kabupaten Padang Pariaman adalah 970 Km², sedangkan luas perairan umum adalah 1.218,5 Ha. Sedangkan potensi perikanan Kabupaten Padang Pariaman terdiri atas potensi perikanan laut dan perikanan air tawar yang tersebar pada hampir semua bagian, baik perairan laut, maupun perairan umum. Perikanan laut di Kabupaten Padang Pariaman dicirikan oleh armada penangkapan yang didominasi oleh perahu tanpa motor (64%), motor tempel (35%), dan hanya sebagian kecil saja menggunakan kapal motor. Untuk ke depan agar kondisi perikanan lebih di kembangkan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat yang berprofesi sebagai nelayan.
51. Kabupaten Padang Pariaman mempunyai panjang garis pantai 60,5 Km dengan pantai berpasir. Hal ini sangat mendukung untuk kegiatan pariwisata bahari. Namun sebagian dari pantai ini telah mengalami degradasi, yaitu berupa abrasi pantai. Terdapatnya 2 pulau-pulau kecil (Pulau Bando dan Pulau Pieh) akan menambah keindahan panorama pantai Kabupaten Padang Pariaman, untuk pengembangan sektor pariwisata bahari. Pulau Pieh merupakan kawasan Taman Wisata Alam Laut. Wilayah pesisir termasuk salah satu kawasan yang memiliki potensi alam yang berlimpah, seperti beraneka jenis ikan, terumbu karang, keindahan alam laut dan pantai.
52. Kawasan hutan mangrove yang terdapat di sepanjang wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bila dikelola dengan baik. Terjadinya konversi kawasan hutan mangrove menjadi peruntukan lain seperti pemukiman, kawasan wisata pantai, tambak serta tumpang tindih dalam pemanfaatannya untuk berbagai kegiatan pembangunan disebabkan belum adanya tata ruang dan rencana pengembangan daerah pesisir pantai dan laut. Potensi ekosistem mangrove hanya tersebar pada kawasan estuaria, dengan luasan sekitar 192 Ha. Setiap tahunnya luasan ini cenderung mengalami penurunan akibat konversi lahan untuk pemukiman. Permasalahan yang di wilayah pesisir adalah pendangkalan dan sedimentasi muara sungai, pencemaran perairan pantai, abrasi, dan intrusi air laut (belum ada data) serta terbatasnya kawasan hutan bakau dan berkurangnya jumlah pohon mangrove, terjadinya kerusakan terumbu karang

dan hilangnya jenis hewan karang pada daerah tertentu. Untuk kawasan mangrove tingkat kerusakannya mencapai 80 % dari 192 Ha mangrove di Padang Pariaman.

53. Pencemaran air di Kabupaten Padang Pariaman selama beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh pencemaran akibat kegiatan domestik, industri, lingkungan pemukiman, pasar dan berbagai kegiatan lain yang menghasilkan limbah. Masih terdapatnya sejumlah industri pada beberapa ruas sungai dapat mengakibatkan pencemaran, hal ini terjadi karena aktifitas untuk menjaga lingkungan dari dunia industri di Kabupaten Padang Pariaman juga masih belum seperti yang diharapkan. Beberapa sungai di daerah ini telah dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan industri tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Masalah pencemaran akibat dari pembuangan sampah di Kabupaten Padang Pariaman juga menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya peralatan dan armada yang ada serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke pantai, sungai, ataupun selokan. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dan tersumbatnya aliran air.

2.1.6 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

54. Aspek kependudukan dan ketenagakerjaan diposisikan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kependudukan pada sisi lainnya memiliki dimensi ganda. Dalam kondisi tertentu penduduk diposisikan sebagai modal dan faktor pendorong percepatan proses pembangunan. Namun dalam kondisi lainnya bisa sebagai faktor penghambat proses pembangunan itu sendiri. Implikasinya, dalam proses pembangunan percepatan pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga terwujud penduduk yang semakin berkualitas dan pada gilirannya mampu menciptakan pembangunan yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
55. Secara kuantitas, jumlah penduduk kabupaten Padang Pariaman selalu memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebanyak 384.718 jiwa yang terdiri dari atas 183.926 jiwa laki laki dan 200.792 jiwa perempuan. Sedangkan pada tahun 2005 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 381.792 jiwa yang terdiri atas 184.124 jiwa laki laki dan 197.668 jiwa perempuan. Sejak tahun 2001-2006 terjadi fruktusasi jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman dengan rerata pertumbuhan 1,03% per tahun. Dalam periode yang sama pertumbuhan penduduk propinsi Sumatera Barat sebesar 1,23%. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk per km² relatif bervariasi antar kecamatan dan yang terpadat adalah kecamatan

Nan Sabaris dan yang terjarang adalah kecamatan Aur Malintang. Dibandingkan dengan propinsi Sumatera Barat, ternyata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman di atas propinsi Sumatera Barat dan rerata anggota keluarga juga berada diatas peropinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi dan diikuti oleh rerata jumlah anggota keluarga yang lebih banyak menimbulkan konsekuensi terhadap peluang pemanfaatan sumberdaya yang semakin rendah. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk sangat diperlukan sehingga dengan sumebrdaya alam yang terbatas dapat ditingkatkan produktifitas dari sumberdaya alam itu sendiri.

Tabel 2.4
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2001 – 2006

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan	Pertumbuhan	
1	2002	178.025	190.123	368.148	277,06		
2	2003	180.762	189.727	370.489	278,82	0,64	
3	2004	183.225	192.313	375.538	282,62	1,36	
4	2005	184.124	197.668	381.792	287,32	1,67	
5	2006	183.926	200.792	384.718	289,53	0,77	
6	2007	186.058	201.394	387.452	292,00	0,71	
		Rerata					1,03

Sumber : BPS, 2007

56. Pada sisi lainnya komposisi umur penduduk seperti diperlihatkan oleh Tabel 2.6 menimbulkan konsekuensi langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ternyata jumlah penduduk usia sekolah relatif tinggi (41%). Implikasinya adalah perlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai baik dalam artian kuantitas maupun kualitas. Pada sisi lain jumlah penduduk yang lanjut usia (6,79%) juga dimensi lain yang perlu mendapat perhatian. Secara normatif mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar.
57. Tantangan global untuk 20 tahun ke depan bidang kependudukan dan ketenagakerjaan adalah peningktan kualitas penduduk sehingga tercipta aktiifitas pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi. Performa pembangunan ekonomi nasional masih jauh dari potensi yang dipunyai oleh sistem ekonomi nasional. Hal ini merupakan agregasi dari performa ekonomi regional pada tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Eksisnya perosalan ekonomi nasional bersumber dari eksisnya persoalan pembangunan sumberdaya manusia. Artinya, pembangunan ekonomi nasional selama dua dekade terakhir hanya mengandalkan basis sumberdaya alam (*resources base*

economy). Akibatnya adalah relatif rendahnya daya saing ekonomi nasional baik pada tingkat kawasan Asia Pasifik maupun ASEAN dan hal ini merupakan representasi dari rendahnya daya saing ekonomi regional pada tingkat kabupaten dan Kota. Menyikapi persoalan di atas, pemerintah secara nasional telah memperlihatkan komitmennya untuk mencapai sasaran pembangunan milenium: (1) Menurunkan proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan dibawah \$ 1 per hari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015; (2) Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara 1990 – 2015; (3) Memastikan pada 2015 semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar. (4) Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. (5) Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya antara 1990 dan 2015, (6) Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015, (7) Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya baru pada 2015.

58. Data susenas memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh dari target di atas dan sekaligus hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah dalam proses perwujudannya sesuai dengan target MDGs. Pada tingkat nasional, ternyata Indonesia memperlihatkan performa pembangunan manusia yang masih jauh dari capaian kinerja di kawasan Asean, Bahkan Indonesia sudah berada dibawah Vietnam. Dalam konteks regional Sumatera Barat, posisi kabupaten Padang Pariaman masih tertinggal dibanding kabupaten lainnya. Pada tahun 1999 IPM kabupaten Padang Pariaman sebesar 64,4 dengan rangking 139 dan pada tahun 2002 naik menjadi 65,7 namun terjadi peningkatan rangking secara nasional menjadi 178. Besaran angka IPM pada tahun 2005 naik lagi menjadi 68,8 dan pada tahun 2006 menjadi 69,5 dan rangking menjadi 217. Hal ini mengandung makna bahwa peningkatan IPM kabupaten Padang Pariaman jauh lebih rendah dibanding kabupaten lainnya di Indonesia.

Pendidikan

59. Gambaran data di atas memperlihatkan berberapa isu sentral di sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten Padang Pariaman. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan serta pencitraan publik merupakan tiga isu pokok sekaligus merupakan tantangan utama bagi pemerintah kabupaten Padang Pariaman untuk 20 tahun ke depan. Gambaran kinerja input sektor pendidikan memerlukan perhatian dan komitmen total untuk memperbaikinya sesuai dengan tuntutan kualitas pendidikan. Dari segi sarana prasarana pendidikan, permasalahan utama yang dihadapi adalah belum tersedianya perpustakaan sekolah pada setiap sekolah. Pada tahun 2006/2007 jenjang pendidikan SD/MI, hanya 6,50% sekolah yang telah memiliki

perpustakaan dengan kondisi sarana dan prasarana perpustakaan yang sangat memperhatikan. Hal ini juga diikuti oleh kondisi ruangan perpustakaan yang tidak representatif. Persoalan yang sama juga dihadapi oleh jenjang pendidikan Tingkat SLTP. Secara kuantitas, hanya 61,29%% sekolah yang memiliki perpustakaan dan secara kualitas belum sesuai dengan standar perpustakaan ideal. Setiap perpustakaan sekolah masih menghadapi persoalan kekurangan buku teks baik bagi guru maupun bagi siswa. Hal ini juga diikuti oleh kondisi ruangan perpustakaan yang tidak representatif. Pada jenjang pendidikan Tingkat SLTA juga menghadapi persoalan yang sama. Hanya 57,13% sekolah yang sudah memiliki perpustakaan dengan kondisi sarana prasarana perpustakaan yang masih jauh dari kondisi ideal. Laboratorium sekolah juga memperlihatkan kondisi yang cukup memperhatikan. Pada tingkat SLTP, hanya 38 (61%) sekolah yang sudah memiliki ruang laboratorium IPA. Secara kualitas juga belum sesuai dengan standar ideal laboratorium. Akibatnya, kualitas praktek bidang studi IPA di laboratorium diperkirakan sangat jauh dari standar kualitas. Pada Jenjang pendidikan tingkat SLTP, ternyata juga belum seluruh sekolah memiliki perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan rill. Pada setiap SLTA, idealnya harus memiliki 3 ruang laboratorium yaitu ruang laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi. Dari 32 SMA/SMK/MA, hanya tersedia 41 ruang laboratorium. Artinya, tidak seluruh sekolah memiliki ruang laboratorium biologi, fisika dan kimia. Persoalan perpustakaan sekolah dan laboratorium ternyata juga diikuti oleh eksisnya persoalan kinerja input yang diprosikan oleh kualifikasi tenaga pendidik.

60. Pada tingkat SD/MI hanya 76,77% guru dengan kualifikasi layak mengajar sedangkan sisanya semi layak (18,97%) dan tidak layak (4,51%). Sedangkan pada tingkat SLTP, kualifikasi tenaga pendidik relatif lebih baik dibanding tingkat SD. Pada tingkat SLTP guru yang layak mengajar sudah mencapai 81,97% dan sisanya semi layak (12,16%) dan tidak layak (7,65%). Kondisi yang lebih baik ditemukan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA 90,06%.

61. Dalam kaitannya dengan penyediaan fasilitas pendidikan dalam bentuk gedung sekolah, ternyata relatif cukup memadai sesuai dengan rentangan usia pada setiap jenjang pendidikan. Artinya, pada setiap nagari di kabupaten Padang Pariaman sudah memiliki gedung sekolah pada tingkat SD. Dengan jumlah gedung sekolah dasar sebanyak 408 buah, berarti rata-rata pada setiap kecamatan sudah memiliki 24 buah SD. Jika jumlah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 46 nagari, berarti pada setiap nagari sudah memiliki 9 buah SD. Dengan kondisi penyediaan gedung sekolah pada setiap nagari sebanyak 9 buah, diperkirakan sudah mampu menampung jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun untuk memasuki jenjang pendidikan SD. Hal ini dibuktikan oleh tingkat APK dan APM tingkat SD yang sudah mendekati kondisi ideal.

Namun pada tahun 2006, APM tingkat SD menurun dari 100,14% pada tahun 2005 menjadi 92,08% pada tahun 2006. Pada tahun yang sama besaran APM ini jauh lebih rendah dari tingkat APM SD Sumatera Barat (96,81%).

62. Besaran lainnya yang harus dicermati berkaitan dengan jumlah tamatan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pada tahun 2005, jumlah tamatan SD yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP sebanyak 92,91%, pada tahun 2006 turun menjadi 53,38%. Kondisi ini jauh dibawah standar pelayanan minimal bidang pendidikan tingkat SD (95%) Artinya, pada tahun 2006, sebanyak 46,62% tamatan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
63. Indikator kinerja pemerataan dan perluasan akses pendidikan lainnya adalah: (1) rasio siswa – sekolah; (2) rasio siswa – kelas; (3) rasio siswa – guru; (4) rasio kelas guru. Keseluruhan rasio ini memperlihatkan lebih besar dari standar ideal. Artinya, dengan fasilitas gedung, kelas dan guru yang ada sekarang, masih mampu menampung jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun untuk memasuki jenjang pendidikan SD. Untuk rasio siswa - sekolah, kondisi idealnya adalah 240 siswa untuk setiap sekolah. Sedangkan kondisi rerata jumlah siswa pada setiap SD saat ini adalah 153 Orang. Jika jumlah SD sekarang sebanyak 408 buah, berarti masih tersedia daya tampung Sekolah tingkat SD sebanyak 35.496 penduduk usia 7 – 12 tahun. Dengan kata lain, telah terjadi kelebihan fasilitas pendidikan tingkat SD dan pada gilirannya mengakibatkan terjadinya pemborosan dana pembangunan.
64. Rasio siswa – kelas dan siswa – guru juga memperlihatkan persoalan yang sama. Secara ideal satu ruang kelas ditempati oleh 40 orang siswa. Kenyataan sekarang hanya 22 orang siswa per kelas. Jika standar ideal terpenuhi, dengan jumlah ruang kelas yang dipunyai sekarang, mampu menampung 100.560 penduduk usia 7 – 12 tahun. Dengan kata lain, kondisi yang eksis sekarang memperlihatkan terjadinya kelebihan ruang kelas pada setiap SD. Persoalan ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya rasio siswa – guru. Secara ideal, satu orang guru mampu mengelola 40 orang siswa, kenyataan sekarang satu orang guru hanya mengelola 20 orang siswa. Jika standar ideal dipenuhi, implikasinya, dengan jumlah siswa sebanyak 62.550, hanya dibutuhkan 1.564 orang guru. Pada sisi lain, rasio kelas guru juga belum memperlihatkan kondisi ideal. Secara ideal, setiap kelas ditempati oleh satu orang guru, namun kenyataannya, setiap kelas ditempati lebih oleh satu orang guru.
65. Fasilitas pendidikan Tingkat SLTP juga memperlihatkan terjadinya kelebihan fasilitas dari jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun. Jumlah SLTP di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2006 sebanyak 62 buah. Berarti rerata SLTP pada

setiap kecamatan dan nagari masing-masingnya sebanyak 3 dan 1. Hal ini diperkirakan mampu menampung jumlah tamatan SD pada setiap nagari. Namun jika ditelusuri lebih jauh ternyata, tingkat APK dan APM Tingkat SLTP masih jauh dari standar ideal. Tingkat APM dan APK SLTP dalam periode 2005 – 2006 hanya 81,65 dan 61,78. Artinya, masih banyak penduduk usia 13 – 15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tingkat SLTP. Dalam upaya mencapai target tuntas wajar 9 tahun, persoalan ini harus dicermati lebih jauh sehingga ditemukan akar penyebab persoalan.

66. Jumlah tamatan pendidikan Tingkat SLTP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan Tingkat SLTA juga memperlihatkan kondisi yang relatif rendah (96,18%), namun sudah berada diatas Propinsi Sumatera Barat (68,46% pada tahun 2006). Artinya, hanya 3,82% tamatan tingkat SLTP yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tingkat SLTA. Indikator rasio siswa – sekolah, siswa – kelas dan siswa – guru pada tingkat SLTP juga memperlihatkan eksisnya persoalan yang harus dicermati dalam upaya pemanfaatan dana pembangunan sektor pendidikan secara lebih efektif dan efisien. Jumlah gedung sekolah SLTP pada tahun 2006 sebanyak 62 buah. Dengan asumsi pembangunan gedung sekolah SLTP memperhatikan jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun yang sama dan standar ideal siswa per kelas sebanyak 40 orang siswa, maka pada tahun 2006 hanya dibutuhkan 658 ruang kelas sedangkan jumlah ruang kelas pada tahun yang sama sudah 692 ruang kelas. Artinya, telah terjadi kelebihan ruang kelas sebanyak 34 ruang kelas. Akibatnya adalah tidak terpenuhinya standar ideal rasio siswa guru. Kondisi sekarang satu orang guru mengelola 11 orang siswa sedangkan standar idealnya satu orang guru untuk 21 orang siswa. Jika standar ideal dipenuhi, implikasinya, dengan jumlah siswa sebanyak 20.913 siswa, hanya dibutuhkan 995 orang guru. Sedangkan jumlah guru yang ada sekarang sebanyak 1.867 orang. Artinya, dengan ukuran ini, secara umum telah terjadi kelebihan guru dan hal ini diakibatkan oleh perencanaan pengembangan dan penambahan kelas tidak berbasis data jumlah penduduk usia SMP dan standar ideal rasio siswa guru. Namun informasi ini harus didalami lebih jauh sehingga diperoleh informasi tentang kebutuhan nyata guru untuk setiap bidang studi dengan mengacu kepada jam wajib mengajar guru per minggu.

67. Pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, jika dikaitkan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun dengan jumlah gedung SLTA yang dipunyai ternyata kabupaten Padang Pariaman masih kekurangan gedung SLTA. Dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun pada tahun 2006 sebanyak 24.385 dan standar ideal rasio siswa – sekolah, 360, dibutuhkan gedung SLTA sebanyak 37 buah berarti terjadi kekurangan gedung SLTA sebanyak 5 buah gedung sekolah. Akibatnya adalah rendahnya daya tampung pendidikan tingkat SLTA dan pada gilirannya

akan menekan APK dan APM SLTA. Jumlah gedung SLTA sekarang sebanyak 32 buah dan menyebar pada setiap kecamatan. Jika jumlah kecamatan sebanyak 17, berarti ada 2 kecamatan di kabupaten Padang Pariaman yang belum memiliki gedung SLTA. Banyaknya kecamatan yang belum memiliki SLTA mengakibatkan tamatan SLTP di kecamatan tersebut mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tingkat SLTA karena diperkirakan ada sejumlah siswa tamatan SLTP yang menghadapi persoalan ekonomi akibat jauhnya jarak tempuh sekolah dengan tempat tinggal mereka. Kondisi inilah yang diperkirakan sebagai penyebab masih rendahnya tingkat APK (45,73) dan APM (34,82) SLTA di kabupaten Padang Pariaman. Besaran angka ini cukup jauh dari standar ideal (100%). Hal ini mengindikasikan masih banyak penduduk usia 16 -18 tahun yang tidak menempuh jenjang pendidikan tingkat SLTA. Tapi jika dilihat angka melanjutkan tamatan tingkat SLTP relatif tinggi (99,79%), namun yang sangat rendah adalah angka melanjutkan tamatan SD.

68. Besaran angka melanjutkan pada jenjang pendidikan tingkat SD ternyata lebih rendah dibanding jenjang pendidikan tingkat SLTP. Pada jenjang pendidikan tingkat SD reratanya pada tahun 2005 dan 2006 sebesar 73,25%. Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA sebesar 86,82% dan 66,35%. Diantara ketiga besaran angka tersebut, besaran angka melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat SLTP perlu mendapat perhatian dan prioritas. Jika hal ini berkelanjutan, akibatnya akan terjadi perlambatan dalam proses pencapaian sasaran tuntas wajar 9 tahun. Jika dibandingkan besaran angka melanjutkan per kabupaten di Sumatera Barat, ternyata besaran angka melanjutkan jenjang pendidikan tingkat SD dibawah rerata Sumatera Barat (96,44%). Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA sudah diatas rerata Sumatera Barat (85,06%). Relatif rendahnya besaran angka melanjutkan dari SD ke SLTP dan dari SLTA ke Perguruan Tinggi, diperkirakan ada kaitannya dengan motivasi anak dan orang tua siswa dan kemampuan ekonomi orang tua siswa.
69. Informasi lain yang diindikasikan oleh besaran angka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah besaran angka tidak melanjutkan. Diantara ketiga besaran angka yang tidak melanjutkan dan harus mendapat perhatian adalah besaran angka tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA. Siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang tinggi, diduga disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi orang tua, buktinya, masih ditemukan sebanyak 15,22% dari jumlah penduduk kabupaten Padang Pariaman yang dibelenggu oleh kemiskinan.
70. Kondisi obektif guru di kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan masih belum sesuai dengan standar ideal. Pada tingkat SD masih ditemukan guru

yang semi layak dan tidak layak mengajar sebanyak 23,74%. Jika jumlah guru SD sekarang sebanyak 3552 orang, berarti sebanyak 816 orang guru SD termasuk kategori tidak dan semi layak mengajar. Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, kondisinya relatif baik dibanding pendidikan SD. Namun masih ditemukan guru yang termasuk kategori tidak layak dan semi layak mengajar (18,03%). Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, jumlah guru yang tidak layak dan semi layak mengajar sebanyak 9,94%.

71. Besaran angka siswa mengulang pada setiap jenjang pendidikan juga memperlihatkan capaian mutu pendidikan. Pada tahun 2005 dan 2006, jumlah siswa mengulang pada jenjang pendidikan tingkat SD, SLTP dan SLTA rerata sebesar 10,95%, 0,44% dan 0,32%. Jika dibandingkan ketiga jenjang pendidikan tersebut, ternyata jenjang pendidikan SD menempati besaran siswa mengulang yang paling tinggi.
72. Besaran angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan juga bervariasi. Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP (1,55%) relatif tinggi dibanding jenjang pendidikan SD (0,47%) dan SLTA (0,94). Namun ketiga besaran angka tersebut dibawah rerata Sumatera Barat (SMA: 1,38; SMP:1,67; SD: 0,49). Relatif tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, diperkirakan ada kaitannya dengan motivasi siswa dan kemampuan ekonomi orang tua. Namun secara ideal, harus diupayakan angka putus sekolah dan mengulang 0%. Indikator mutu lainnya berkaitan dengan besaran angka lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Capaian angka lulusan pada setiap jenjang pendidikan di kabupaten Padang Pariaman, ternyata dibawah rerata Sumatera Barat. Rerata capaian besaran angka lulusan pada jenjang pendidikan SD tahun 2005 dan 2006 hanya 90,2%. Sedangkan rerata Sumatera Barat pada periode yang sama sudah 96,54%. Namun pada jenjang pendidikan tingkat SLTP (90,16%) dan tingkat SLTA (94,15%). Rerata capaiannya dalam periode yang sama relatif lebih tinggi dibanding rerata Sumatera Barat (85,06%).
73. Capaian besaran angka mengulang, lulusan dan putus sekolah yang merupakan proksi dari kinerja output diperkirakan ada hubungannya dengan kinerja input satuan pendidikan. Salah satu kinerja input yang diperkirakan dominant pengaruhnya adalah kualifikasi guru yang melaksanakan kegiatan PBM. Pada jenjang pendidikan SD, kinerja input (kualifikasi pendidikan Guru) ternyata masih ditemukan guru dengan kualifikasi semi layak dan tidak layak mengajar sebesar 23,23%. Sedangkan pada jenjang pendidikan tingkat SLTP dan SLTA sebesar 18,03% dan 9,94%. Namun jika dibandingkan dengan rerata Sumatera Barat, ternyata kinerja input guru di kabupaten Padang Pariaman relatif tinggi. Tapi pada sisi lain, kinerja output satuan pendidikan kabupaten Padang Pariaman lebih rendah dari rerata Sumatera Barat.

74. Pada tahun 2006, angka lulusan SD sebesar 91,50%, sedangkan rerata Sumatera Barat sebesar 96,44%. Jika dikaitkan dengan kinerja input guru, jumlah guru yang layak mengajar di kabupaten Padang Padang Pariaman pada tahun yang sama sebesar 75,78%, sedangkan rerata Sumatera Barat hanya sebesar 75,31%. Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP jumlah guru yang layak mengajar sebesar 81,97% dan angka lulusan 77,45%. Rerata Sumatera Barat, jumlah guru yang layak mengajar 76,77% dan angka lulusan 85,06%. Namun pada jenjang pendidikan SMA relatif berbeda jika dibanding jenjang pendidikan SD dan SLTP. Artinya, pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, kinerja input guru yang lebih tinggi juga diikuti oleh kinerja output yang relatif tinggi. Pada tahun 2006, jumlah guru yang layak mengajar di SLTA sebanyak 90,06% dan angka lulusan sebesar 86,96%. Sedangkan rerata Sumatera Barat, jumlah guru yang layak mengajar sebesar 80,87% dan angka lulusan sebesar 84,83%.

75. Kinerja output satuan pendidikan yang cenderung dijadikan acuan dalam mengevaluasi kinerja satuan pendidikan pada setiap daerah kabupaten dan Kota adalah rerata capaian nilai UAS dan UN. Rerata capaian nilai UAS dan UN di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2006 ternyata dibawah rerata Sumatera Barat. Pada Jenjang pendidikan SD, rerata capaian nilai UAS hanya 5,75 dan jauh dibawah rerata Sumatera Barat (6,40). Namun pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, rerata capaian nilai UN lebih tinggi dibanding rerata Sumatera Barat dan pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, rerata capaian nilai UN dibawah rerata Sumatera Barat. Jika capaian rerata nilai UN diduga memiliki hubungan dengan kualifikasi guru mengajar. Ternyata di Kabupaten Padang Pariaman, guru yang layak mengajar pada jenjang pendidikan tingkat SLTP (81,97%) dan SLTA (90,06%) lebih tinggi dari rerata jumlah guru layak mengajar pada jenjang pendidikan tingkat SLTP (76,77%) dan SLTA (80,87%) di Sumatera Barat. Gambaran data ini mengindikasikan bahwa kinerja output satuan pendidikan yang diukur dengan capaian rerata nilai UN bukan hanya ditentukan oleh kelayakan guru mengajar, tapi diduga banyak variabel lain yang harus diakomodasikan kedalam kebijakan peningkatan kinerja output satuan pendidikan seperti komitmen guru dalam menekuni profesinya sebagai guru. Informasi inilah yang perlu didalami oleh para penembil keputusan pada tingkat dinas pendidikan kabupaten. Dalam hal kondisi fisik sekolah, ternyata ditemukan persoalan kelayakan ruang kelas. Pada tingkat SD, 59,24% kondisinya rusak ringan dan berat dan pada tingkat SLTP hanya sebesar 23,13%, SMA, 12,14%. Dalam 5 tahun ke depan harus diupayakan kondisi fisik ruang kelas yang representatif.

76. Gambaran data di atas memperlihatkan tantangan utama sektor pendidikan di kabupaten Padang Pariaman; (1) peningkatan proporsi jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan penurunan

jumlah penduduk yang buta aksara, (2) Penurunan tingkat kesenjangan pendidikan antar kelompok masyarakat, (3) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang direpresentasikan oleh daya saing sektor pendidikan, output pendidikan yang memiliki jiwa wirausaha dan etos kerja yang tinggi, produktif, kreatif dan inovatif. Ukuran mutu inilah yang harus patokan dalam melihat kualitas output satuan pendidikan untuk 20 tahun ke depan.

Kesehatan

77. Sektor kesehatan juga memperlihatkan eksisnya permasalahan dan tantangan yang memerlukan respon kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana kesehatan, kualitas tenaga kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan merupakan isu sentral yang eksis di sektor kesehatan. Seluruh dimensi tersebut belum memperlihatkan kondisi yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sektor kesehatan seperti diperlihatkan oleh Tabel 2.5 Umur harapan hidup hingga tahun 2005 adalah 66,3 tahun. Sedangkan angka kematian bayi meningkat dari 28 kematian per 1000 kelahiran (2003), menjadi 32 kematian (2004) dan 36 kematian (2005). Namun besarnya angka kematian bayi diikuti oleh penurunan angka kematian ibu hamil dari 7 pada tahun 2003 menjadi 5 pada tahun 2005.

Tabel 2.5
Indikator Kesehatan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Tahun		
			2003	2004	2005
1	Umur harapan hidup	%	65/tahun	65	66,3
2	Angka kematian bayi	ratio	28/1000	32	36
3	Kematian ibu hamil	%	7	3	5
4	Kematian ibu melahirkan	ratio	3	2	4
5	Kematian ibu melahirkan	%	9.627	*	9.231
6	Bersalin dengan tenaga kesehatan	%	74,92	79,97	89,59

Sumber : Dinas Kesehatan, 2006

78. Untuk wabah penyakit, sakit malaria secara signifikan menunjukkan kenaikan dari 4 pasien pada tahun 2003 menjadi 49 pasien pada tahun 2005. Sebagian pasien malaria ini adalah anak-anak dan balita. Penyakit rabies pada tahun 2005 menurun dibandingkan tahun 2003, namun besarnya angka 203 orang ini termasuk tinggi dalam lingkup wilayah Sumatera Barat. Pada sisi lain harus diantisipasi berbagai jenis penyakit menular seperti TBC dan AIDS serta flu burung yang semakin tinggi peluangnya seiring dengan perjalanan waktu dan

keterbukaan antar wilayah. Dalam 20 tahun mendatang, tantangan utama pembangunan sektor kesehatan adalah; (1) masih relatif tingginya besaran angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta proporsi balita kurang gizi, (2) Ketersediaan, dan keterjangkauan serta keamanan obat belum terjamin secara maksimal, (3) penyebaran dan mutu tenaga kesehatan belum memadai.

79. Kinerja sektor kesehatan yang belum maksimal diduga ada kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pada sisi lain juga berkaitan dengan perilaku hidup masyarakat yang belum mencerminkan perilaku sehat. Sarana kesehatan berupa puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, ternyata rasio puskesmas per nagari adalah 1:2, artinya satu puskesmas mencakup 2 nagari dan mengingat jarak antar nagari juga relatif jauh dan biaya transportasi relatif mahal, diduga hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memanfaatkan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan mereka. Ketersediaan sarana kesehatan lainnya seperti puskesmas pembantu dan puskesmas keliling juga belum sesuai standar mutu. Jumlah puskesmas pembantu hanya sebanyak 61 buah dan puskesmas keliling sebanyak 23 buah dan rumah bersalin hanya 18. Konsekuensi logis yang diperlihatkan oleh keterbatasan ketersediaan sarana kesehatan ini adalah relatif tingginya angka pertolongan persalinan yang dilakukan oleh Dukun. Pada tahun 2006 sebanyak 8,55% dan pada tahun 2008 naik menjadi 11,08% bahkan masih ditemukan proses kelahiran yang dibantu oleh famili.

80. Tantangan utama lainnya yang perlu mendapatkan prioritas adalah perubahan paradigma pelayanan kesehatan yang harus eksis dalam pemikiran dan pemahaman para pelayan kesehatan dasar (tenaga medis dan paramedis). Perubahan paradigma pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan *hospitality approach* merupakan tantangan utama sektor kesehatan dan harus dijadikan prioritas dalam pembangunan sektor kesehatan. Perwujudan paradigma ini menghadapi dua permasalahan utama: (1) kualifikasi tenaga paramedis yang masih jauh dari standar mutu. Sebanyak 79% tenaga paramedis hanya dengan kualifikasi pendidikan berkualifikasi D3 kebawah. Besaran angka 79% tersebut, ternyata sebanyak 54% dengan kualifikasi pendidikan SLTA. (2) Rasio jumlah dokter dengan jumlah penduduk yang masih jauh dari standar mutu yang telah ditetapkan. Kondisi tahun 2006 memperlihatkan jumlah dokter di kabupaten Padang Pariaman hanya 43 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 381.792 jiwa. Kedua besaran angka ini memperlihatkan rasio jumlah dokter dan penduduk sebesar 1 : 8.879. Artinya, satu dokter melayani penduduk sebanyak 8.879 orang penduduk. Pada sisi lain, jumlah dokter spesialis juga menuntut rasio yang juga telah distandarisasi secara nasional. Ternyata sampai pada tahun 2006, kabupaten Padang Pariaman belum memiliki dokter spesialis. Peningkatan kesehatan masyarakat juga didukung oleh sarana puskesmas

pembantu dan puskesmas keliling, namun dari segi jumlah belum sesuai dengan harapan dan tuntutan ideal. Akibatnya, adalah pelayanan kesehatan masyarakat terhadap penyakit yang mereka derita belum maksimal dan pada gilirannya mengakibatkan tingginya angka kematian dan pendeknya usia harapan hidup masyarakat. Data pada tahun 2006 memperlihatkan 10 jenis penyakit yang sering diderita masyarakat yaitu ISPA, reumatik,, Ppenyakit kulit, Hipertensi, Infeksi kulit, Gastritis, Alergi, Asma, Gigi dan TBC. Dari 10 jenis penyakit tersebut, sebanyak 58% adalah penderita ISPA, TBC dan Reumatik. Oleh karena itu standar mutu tenaga medis dan para medis untuk setiap Puskesmas harus dipenuhi. Tercapainya rasio ideal jumlah tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedis dan setiap pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat minimal harus memiliki satu orang dokter umum, 1 orang dokter gigi serta tenaga paramedik yang terdiri dari 5 orang keperawatan dan 2 orang bidan.

Ketenagakerjaan

81. Gambaran ketenagakerjaan di kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan besarnya angka pengangguran yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 tingkat pengangguran sebesar 8,21% dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 9,56%. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan, pada tahun 2004 sebanyak 5,01% dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 8,21%. Gambaran data ini merupakan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan angkatan kerja yang selalu meningkat dari tahun 2002 – 2005.

Tabel 2.6
Komposisi Angkatan Kerja umur 10 Tahun ke Atas
Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan Tahun 2002 - 2005

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Total
	Bekerja	Mencari kerja	Jumlah	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	Jumlah	
2002	129.852	8.118	137.970	61.947	52.904	27.621	142.472	280.442
2003	131.201	9.615	140.816	56.863	57.574	29.354	143.791	284.607
2004	144.326	7.605	151.931	68.633	42.986	22.468	134.087	286.018
2005	131.844	11.790	143.634	61.566	58.992	32.340	152.898	296.532

Sumber : Kantor Nakertrans, 2006

82. Tantangan lain yang dihadapi adalah kualifikasi angkatan yang sudah berkerja. Gambaran data pada 2.6 memperlihatkan bahwa pada tahun 2002 sebanyak 68% tenaga kerja yang sudah bekerja hanya berpendidikan SD kebawah (tamat, tidak tamat dan tidak bersekolah). Besaran angka ini hanya menurun menjadi 58% pada tahun 2005. Kualifikasi tenaga yang relatif rendah

mengakibatkan produktifitasnya relatif rendah dan sebahagian besar tenaga kerja tersebut bekerja di sektor pertanian dengan produktifitas marginal yang semakin rendah.

Tabel 2.7
Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tahun	Bekerja							Total
	Tdk Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/MI	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi		
						Akademi	Univ	
2002	8.115	46.221	34.492	18.894	17.148	3.640	1.302	129.812
2003	10.544	38.714	36.951	18.477	21.999	3.098	2.318	131.201
2004	6.247	38.709	44.850	26.343	24.368	1.921	1.888	144.326
2005	5.994	43.158	28.362	20.844	22.320	4.854	6.312	131.844

Sumber : Kantor Nakertrans, 2006

83. Angkatan kerja yang berstatus pencari kerja juga memperlihatkan karakteristik yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan. Data pada Tabel 2. 6 memperlihatkan bahwa dalam periode 2002 – 2006 kualifikasi pendidikan pencari kerja selalu didominasi oleh SLTP kebawah. Pencari kerja yang berpendidikan sarjana ternyata menunjukkan penurunan. Akibatnya, diperkirakan mereka yang berpendidikan SLTP kebawah hanya mampu mengakses pekerjaan non formal dengan karakteristik dan kualitas usaha yang relatif rendah dibanding sektor formal.
84. Persoalan lain yang dihadapi dibidang ketenagakerjaan diperlihatkan oleh gambaran data pada Tabel 2.8, dalam periode 2002 – 2005, sebahagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dengan karakteristik produktifitas marginal yang relatif rendah dibanding sektor lainnya. Pada sisi lainnya, data pada Tabel 2.11 memperlihatkan belum terjadinya tranformasi tenaga kerja secara signifikan dari sektor perimer ke sektor skunder dan tersier. Tantangan pembangunan untuk 20 tahun ke depan adalah terwujudnya trasformsi ekonomi yang diikuti oleh trasformasi dibidang ketenagakerjaan. Kondisi dalam 10 tahun terakhir di kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan kedua jenis transformasi ini sangat lambat dan tidak memiliki arah dan pola yang jelas. Variabel yang akan menentukan transformsi ini adalah corak pendidikan penduduk. Oleh akrena itu bangunan transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan harus berbasiskan pendidikan yang semakin meningkat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Tabel 2.8
Komposisi Pekerja dan Lapangan Usaha Yang Ada

No	Lapangan Usaha	Tahun			
		2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	51.711	56.921	63.380	49.992
2	Pertambangan	955	-	638	780
3	Industri Pengolahan	16.596	11.796	15.161	10.098
4	Listrik,Gas&Air	344	165	221	486
5	Bangunan	4.616	3.653	5.178	4.122
6	Perdagangan	23.549	28.785	32.100	32.862
7	Angkutan	10.240	12.035	9.630	8.358
8	Keuangan	869	820	675	1.146
9	Jasa	18.374	14.761	14.014	17.388
10	Lainnya	-	-	-	4.536
		127.254	128.936	140.997	129.768

Sumber : Kantor Nakertrans, 2006

85. Dari karakteristik ketenagakerjaan terlihat relatif rendahnya produktifitas tenaga kerja yang menyebabkan kemampuan dalam menciptakan pendapatan relatif rendah. Akibatnya mereka terbelenggu dengan kemiskinan rumah tangga secara absolut. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Padang Pariaman relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya di propinsi Sumatera Barat, yaitu pada tahun 2007 sebesar 17,45%.

2.1.7 Prasarana dan Sarana Wilayah

86. Prasarana transportasi merupakan urat nadi dalam proses percepatan dalam dan antar wilayah. Oleh karena itu peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana ini harus menjadi prioritas utama. Dalam lingkup wilayah Sumatera Barat, dari komposisi jalan yang ada di propinsi Sumatera Barat ternyata 84,30% merupakan jalan Kabupaten. Data ini mengandung makna bahwa pemerintahan kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk memenuhi kebutuhan prasarana transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan itu sendiri. Namun pada sisi lain kemampuan keuangan pemerintahan kabupaten relatif rendah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Data pada Tabel 2.12 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jalan kabupaten dari tahun 2000 – 2007 dengan rerata 86% dari klasifikasi jalan merupakan jalan kabupaten. Demikian juga halnya dengan jembatan, Jembatan kabupaten sebanyak 39 buah dengan panjang 2.539 m. Prasarana transportasi darat lainnya yang telah dikembangkan kembali adalah kereta api.

Namun prasarana ini tidak begitu diminati masyarakat karena pelayanannya yang belum sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.9
Perkembangan Jalan di Kabupaten Padang Pariaman

Klasifikasi Jalan	Kelas	Panjang Jalan(Km')								
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Jalan Negara	III.B 1	43.90	43.90	43.90	43.90	43.90	83.60	83.60	83.60
2	Jalan Propinsi	III.B 2	124.05	125.05	125.05	125.05	125.05	125.05	125.05	125.05
3	Jalan Kabupaten	III.C 4	1,292.20	1,292.20	1,292.20	1,292.20	1,305.40	1,305.40	1,305.40	1,312.11
	Jumlah		1,460.15	1,461.15	1,461.15	1,461.15	1,480.15	1,520.76	1,520.76	1,520.76

Sumber : Dinas PU Kab.Padang Pariaman,2007

87. Jalan Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2004 dengan kondisi aspal sepanjang 613.25 km terdiri dari 186.8 km berkondisi baik, 246,45 km berkondisi sedang dan 180 Km berkondisi rusak dan rusak berat, Jalan kerekel 411,15 km dan Jalan tanah sepanjang 281,8 km. Secara keseluruhan kondisi Jalan di Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dikatakan Jalan mantap (Kondisi baik sedang) adalah sepanjang 479.75 km (186,8 Km + 246,45 km) atau 36.14% dari total Jalan Kabupaten, sedangkan yang berkondisi rusak dan rusak berat sepanjang 832,5 km atau 63.86% dari total jalan kabupaten serta 548.562 km jalan pada umumnya masih dalam kondisi kerikil. Ambaran data ini memperlihatkan kualitas jalan dipunyai masih jauh dari harapan dan tuntutan ideal pembangunan. Kondisi jalan berpengaruh langsung terhadap efektifitas efisiensi aktifitas dan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kuantitas dan kualitas jalan yang semakin baik merupakan prasyarat utama dalam proses percepatan aktifitas pembangunan pada suatu wilayah. Namun pembangunan jalan baru berupa Jalan lingkaran Lubuk Alung dan Sicincin dengan panjang 19 km, dengan lebar jalan dan damija 40 m. Kemudian diteruskan lagi ke Malalak (Kabupaten Agam), melahirkan peluang baru bagi masyarakat. Dengan adanya jalan tersebut diharapkan mampu menstimulus berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat disamping terjadinya peningkatan nilai lahan masyarakat disepanjang jalan tersebut.

Tabel 2.10
Kondisi Jalan di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2003-2007

No	Tahun	Jenis Permukaan (Km)				Kondisi Permukaan (km)			
		Aspal	Kerekel	Tanah	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak	Jumlah
1	2007	661,10	366,90	277,40	1.305,4	326,80	247,60	731,00	1.305,40
2	2006	651,85	376,15	277,4	1.305,4	288,39	241,60	775,41	1.305,40
3	2005	646,20	373,20	286,00	1.305,4	284,75	273,75	773,20	1.305,40
4	2004	646,45	399,30	286,00	1.305,4	264,70	273,75	793,30	1.305,40
5	2003	618,25	411,15	296,50	1.325,9	186,80	287,45	851,65	1.325,90

Sumber : Dinas PU Kab.Padang Pariaman,2007

88. Prasarana transportasi udara berupa pelabuhan udara merupakan potensi dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah kabupaten Padang Pariaman. Kehadiran BIM yang berlokasi di kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menggerakkan aktifitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks global, kehadiran BIM diharapkan mampu mendatangkan wisatawan mancanegara yang lebih banyak. Namun kondisi nyata memperlihatkan lebih banyak kelas menengah ke atas baik dalam lingkup Sumatera Barat maupun lingkup kabupaten Padang Pariaman yang berwisata ke luar negeri (khususnya ke Malaysia) dibanding orang Malaysia yang berwisata ke Sumatera Barat. Dalam konteks lokal, belum terlihat secara nyata produk-produk agrowisata maupun non agrowisata yang dihasilkan oleh kabupaten Padang Pariaman memiliki stand di BIM.

89. Prasarana dan sarana air bersih merupakan persoalan yang cukup urgen dalam perspektif membangun masyarakat yang sehat dan dinamis. Secara kelembagaan, penyediaan air bersih bagi masyarakat sudah dikelola oleh perusahaan daerah yang kewenangan pengelolaannya berada di pemerintahan Kabupaten. Namun realitas memperlihatkan kinerja pengelolaan sumberdaya air yang belum optimal sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Cakupan Layanan Air bersih untuk pemipaan yang dikelola oleh PDAM pada tahun 2006 baru mencapai 13 % yang dilayani oleh 17 unit PDAM yakni 50.425 Orang dan cakupan layanan Air Bersih Non PDAM 54 % melalui Hidran Umum, Kran Umum, PAH dan Sumur Gali, Sumur Pompa dan sumber mata air Terlindung . Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman 2 Kecamatan belum terlayani oleh jaringan PDAM yakni Kecamatan Ulakan Tapakis dan Sintuk Toboh Gadang. Sedangkan di Kecamatan Padang Sago saat ini PDAM unit Padang Sago tidak aktif berproduksi (225 sambungan seluruhnya merupakan sambungan tidak aktif).

90. Potensi yang dimiliki kabupaten Padang Pariaman dalam pengadaan air bersih relatif tinggi dibanding kabupaten lainnya. Namun sebagai akibat kualitas pengelolaan sumberdaya air yang masih relatif rendah pada gilirannya mengakibatkan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Potensi lainnya adalah berupa sungai dan dari 11 (sebelas) buah sungai yang ada, maka sungai terpanjang adalah Sungai Batang Mangau sepanjang 46 Km, serta Sungai Batang Tapakis dengan panjang 46 km. Sedangkan sungai yang memiliki lintasan terpendek dibandingkan dengan sungai-sungai lainnya di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Batang Kamumuan dan Batang Piaman dengan panjang sungai yaitu 12 km. Secara ekonomis potensi sungai ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai basis aktifitas ekonomi lokal seperti budidaya ikan dengan berbagai jenis ikan yang cocok dikembangkan. Potensi sungai yang dipunyai dapat dijadikan sebagai sumber air dalam membangun irigasi teknis. Pada tahun 2007 terdapat 115 Daerah Irigasi (DI) Pemerintah yang mengairi sawah seluas 20.759,66 Ha dan Irigasi Desa yang mengairi sawah seluas 8.497 Ha. Dengan potensi yang dipunyai juga telah berkembang secara kelembagaan sebanyak 8 GP3A, dimana 4 GP3A diantaranya telah berbadan Hukum dan yang lainnya dalam proses penetapan Badan Hukumnya. Disamping itu juga terdapat 233 unit P3A yang diharapkan dapat mengelola jaringan Irigasi ditingkat Usaha Tani, baik irigasi Pemerintah maupun irigasi pedesaan.
91. Potensi sungai dan sumber air lainnya yang dipunyai ternyata belum memperlihatkan pemanfaatan yang optimal. Belum optimalnya pemanfaatan tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan mendasar berikut: : (1) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama didaerah pedesaan; (2) Pelayanan Air Bersih oleh PDAM belum optimal, tingkat kebocoran masih tinggi dan Kontinuitas Air belum memadai; (3) Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih membutuhkan biaya yang besar sementara kemampuan keuangan Daerah terbatas; (4) Masih Banyaknya daerah rawan air bersih tersebar di seluruh Kabupaten Padang Pariaman; (5) Belum tercapainya keseimbangan antara penyediaan air dengan kebutuhan masyarakat, dan makin meningkatnya ancaman terhadap ketersediaan air secara berkelanjutan; (6) Menurunnya kemampuan penyediaan air, dan meningkatnya potensi konflik masyarakat yang membutuhkan air; (7) Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi; (8) Lemahnya koordinasi, dan kelembagaan pengelola air; (9) Rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi.
92. Prasarana dan sarana drainase juga merupakan tuntutan normatif yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat antara lain berkaitan dengan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana

drainase. Pelayanan sistem Drainase, hingga kini masih terdapat 1890 jumlah rumah yang mendiami kawasan rawan banjir karena rendahnya kualitas sistem jaringan drainase, terutama saluran Primer dan saluran skunder, saluran Primer yang berkondisi rusak dan tidak berfungsi dengan baik sepanjang 25.000 Meter dan saluran skunder sepanjang 40.275 Meter. Permasalahan utama pembangunan Drainase adalah (1) Makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan oleh makin berkurang lahan terbuka hijau atau daerah resapan air; (2) Tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal; (3) Rendahnya operasi dan pemeliharaan saluran drainase; (4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga saluran drainase. Pada saat yang sama tantangan utama yang dihadapi adalah peningkatan operasi dan pemeliharaan drainase, mempertahankan luasan lahan terbuka hijau, pembangunan saluran drainase integrative dengan pengendalian banjir serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga memelihara dan menjaga saluran drainase.

93. Persoalan limbah dan sampah sebagai akibat aktifitas masyarakat juga perlu dikelola secara optimal. Persoalan keuangan daerah dalam bentuk rendahnya kapasitas fiskal daerah, mengakibatkan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah belum maksimal dan berkualitas. Data menunjukkan bahwa jumlah sampah terangkut baru mencapai 1,48 % (12 m³/hari) sedangkan rata-rata timbunan sampah yang dihasilkan 810 m³ per hari. Sampah tersebut sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga dan pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar (Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 29 (dua puluh sembilan) pasar yang dikelola oleh Nagari dan Pemerintah serta lokasi-lokasi Strategis lainnya seperti Komplek Makam Syekh Burhanuddin serta beberapa lokasi lainnya. Aktifitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan pasar nagari dan kecamatan yang semakin meningkat, secara nyata menimbulkan timbunan sampah yang semakin tinggi. Pada saat yang sama membutuhkan prasarana dan sarana sampah yang sesuai dengan pertumbuhan tersebut. Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki 2 (dua) unit truk sampah dan TPS sebanyak 20 unit. Untuk memenuhi kebutuhan dalam melayani sampah dilokasi –lokasi tersebut diperlukan sarana persampahan seperti Dum Truk 3 unit, Armroll Truck 3 unit, 15 belas buah container. Namun semua prasarana dan sarana dasar tersebut belum mampu dipenuhi oleh pemerintah kabupat.
94. Prasarana dan sarana lainnya yang berfungsi sebagai mesin penggerak utama aktifitas ekonomi masyarakat adalah ketersediaan listrik telepon. Seiring dengan sasaran strategik pembangunan untuk 20 tahun ke depan kebutuhan terhadap prasarana dan sarana ini semakin urgen. Tantangan ke depan adalah peningkatan kuantitas prasarana dan sarana ini sesuai dengan tuntutan

transformasi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi saat ini memperlihatkan ketersediaan prasarana dan sarana masih jauh dari harapan tuntutan pembangunan itu sendiri. Akibatnya, potensi sumberdaya pembangunan yang dipunyai termanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif pengembangan dunia industrike depan listrik merupakan infrastruktur yang menjadi pertimbangan bagi investor.

95. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa kabupaten Padang Pariaman mendapat pasok tenaga listrik dari sistem inter koneksi 150 KV Sumatera Barat. Distribusi listrik di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui 2(dua) gardu induk Lubuk Alung (20 MVA dan 10 MVA), dan gardu induk PIP (20 MVA), dengan wilayah pelayanan ranting Pariaman, Sicincin, dan Lubuk Alung. Untuk melihat perkembangan energi listrik di Kabupaten padang Pariaman dapat dilihat gambar berikut. Dengan ketersediaan pasokan tenaga listrik yang eksis sekarang, ternyata belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pada sisi lain kualitas pasokan listrik juga memperlihatkan persoalan yang cukup krusial utamanya bagi pelaku bisnis.

2.1.8 Tata ruang dan Pembangunan Wilayah

96. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 sub wilayah kecamatan dengan heterogenitas potensi ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini diduga ada kaitannya dengan latarbelakang historis, kondisi sumberdaya alam dan lingkungan, dan kondisi sosial budaya. Dalam perspektif ekonomi regional pengembangan wilayah kabupaten harus didasari atas perinsip: (1) pengembangan setiap sub wilayah harus berbasiskan karakteristik potensi sumberdaya pembangunan wilayah: (2) menciptakan keseimbangan antar sub wilayah pembangunan. Implementasi dari kedua perinsip tersebut teraktualisasi dalam bentuk dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus disusun oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang pada tingkat propinsi dan nasional.
97. Perubahan lingkungan strategis baik dalam artian fisik maupun non fisik cukup akan menimbulkan implikasi langsung terhadap tata ruang wilayah. Dalam kasus kabupaten Padang Pariaman, pemindahan ibukota Kabupaten yang telah diperdakan ke kecamatan VI Lingkung menuntut dilakukannya revisi terhadap RTRW kabupaten Padang Pariaman. Secara teknis operasional pemanfaatan ruang harus berpijak kepada pola pemanfaatan ruang yang ada, kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, daya dukung lahan yang tersedia serta dinamika sosial ekonomi dan budaya kabupaten Padang Pariaman.

98. Berdasarkan kebijakan penataan ruang pada tingkat nasional, pada setiap wilayah pembangunan telah dipetakan menjadi 2 kawasan utama yaitu, kawasan lindung, kawasan budidaya. Kawasan lindung di kabupaten Padang Pariaman terdiri dari: (1) kawasan hutan lindung dengan luas 37.572 ha (28,28%) dengan lokasi tersebar dan berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan; (2) Kawasan sempadan sungai dan pantai dengan luas 12.000 ha (9,04%) dan dengan lokasi sepanjang sungai-sungai besar dan kecil dan sepanjang pantai pesisir barat; (3) Kawasan hutan bakau dengan luas 6,05 ha (0,01%) dan tersebar secara sporadis pada panati yang berenergi rendah. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari: (1) Kawasan pertanian yang terdiri dari: (a) TPLB seluas 24.518 ha; (b) TPLK seluas 18.581; (c) Tanaman Tahunan seluas 34.816 ha; (d) perikanan darat 53 ha; (e) semak belukar dan tanah tandus seluas 2.360 ha; (2) kawawasan non pertanian yang terdiri dari : (a) kawasan permukiman seluas 8.097 ha; (b) kawasan pertambangan 53 ha; (c) kawasan pariwisata seluas 9,3 ha dan kawasan industri seluas 185 ha. (4). Gambaran data ini memperlihatkan bahwa kawasan lindung mendominasi ruang yang tersedia di kabupaten Padang Pariaman dengan pemikiran bahwa kawasan lindung difungsikan sebagai pencipta kondisi lingkungan yang lestari. Namun pada sisi lain kondisi ini sering menimbulkan kontraindikasi dengan kepentingan dan proses percepatan pembangunan pada setiap wilayah.

99. Rencana tata ruang dalam Kabupaten Padang Pariaman yang telah menjadi Peraturan Daerah terdiri dari beberapa rencana Ibukota Kecamatan yang ada dalam wilayah ini antara lain (1996-2004):

- a. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Lubuk Alung telah di PERDAKAN dengan Nomor 05/1996 tanggal 10 Jun 1996
- b. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Sei Limau telah diPERDAKAN dengan nomor 08/1996 tanggal 10 Jun 1996
- c. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Batang Anai telah di PERDAKAN dengan nomor 07/1996 tanggal 10 Jun 1996
- d. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan VII Koto Sei Sarik telah di PERDAKAN dengan nomor 10/2001 tanggal 2 Juli 2001
- e. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan V Koto Kampung Dalam telah di PERDAKAN dengan nomor 11/2001 tanggal 2 Juli 2001
- f. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Sei Geringging telah di PERDAKAN dengan nomor 12/2002 tanggal 2 Juli 2001
- g. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan 2X11 Enam Lingkung

- h. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Ulakan Tapakis,
- i. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Enam Lingkung,
- j. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Koto Aurmaling,
 - k. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan Batang Gasan,
 - l. Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) Ibukota Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam,
- m. Penyusunan RDTR Kawasan Bandara Ketaping RDTR, telah tertuang dalam PERDA nomor 07/2001 tanggal 2 Juli 2001
- n. Penyusunan Rencana 9 Kawasan Strategis (Embarkasi Haji, Gerbang Ketaping, Kota Mandiri, Makam Syech Burhanuddin, Malibou Anai, Pasar Induk, Pasar Lubuk Alung, Terminal Bus, dan CBD), telah di PERDAKAN dengan nomor 05/2004 tanggal 19 Juli 2004. Dari jumlah tersebut maka ada 5 kecamatan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK Ibukota Kecamatan. Disamping tata ruang wilayah Kecamatan tersebut rencana tata ruang lainnya adalah :
 - i. Rencana detail tata ruang Kawasan Bandara Internasional Minangkabau
 - ii. (RTBL) Depan Bandara Internasional Minangkabau
 - iii. (RTBL) Fly Over Duku
 - iv. Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Gasan
 - v. Rencana Tata Ruang Tapian Puti
 - vi. Rencana Tata Ruang Bukit Bulek
 - vii. Rencana Tata Ruang Jalan Lingkar Lubuk Alung . mengingat perubahan dan dinamika aspek fisik dan non fisik wilayah mengakibatkan seluruh dokumen tersebut harus disesuaikan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah kabupaten Padang Pariaman.

100. Kawasan Agropolitan dengan komoditi utama ternak sapi dengan konsep terpadu dipusatkan di Kecamatan VII Koto dan Hinterland (Penyangga) adalah Kecamatan Padang Sago, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Enam Lingkung, serta Buffer Zone (Penyangga II) adalah kec. 2x11 Enam Lingkung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Lubuk Alung, dan Kecamatan Nan Sabaris.

Tabel 2.11
Kawasan Agropolitan di Kabupaten Padang Pariaman

No.	Kecamatan	Nagari	Luas (Ha)	Fungsi
1.	VII Koto Sungai Sarik	1. Sungai Sarik 2. Lareh Nan Panjang 3. Balah Aie 4. Lurah Ampalu	27,96 8,71 11,2 13,49	Pusat Kawasan Agropolitan
2.	Patamuan	1. Sungai Durian 2. Tandikat	11,84 41,21	Daerah Hinterland
3.	Padang Sago	1. Batu Kalang 2. Koto Baru 3. Koto Dalam	9,65 8,41 13,99	
4.	Enam Lingkung	1. Parit Malintang 2. Koto Tinggi 3. Gadur 4. Pakandangan 5. Toboh Ketek	19,34 7,82 - 8,51 3,53	
5.	2x 11 Enam Lingkung	1. Sicincin 2. Sungai Asam 3. Lubuk Pandan	21,80 7,61 6,84	
6.	Nan Sabaris	1. Sunur 2. Padang Bintungan	8,64 6,55	
7.	Lubuk Alung	1. Lubuk Alung	111,63	
8.	Ulakan Tapakis	1. Tapakis 2. Ulakan	18 21	

Sumber : Bappeda, 2006

101. Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan ruang wilayah pembangunan, telah dikembangkan 9 (sembilan) Kawasan Strategis di Kabupaten Padang Pariaman yaitu :
- a. Pengembangan *Kawasan Pasar Lubuk Alung*, yang merupakan sentra perdagangan untuk Kawasan Sumatera Barat.
 - b. Pengembangan *Makam Syekh Burhanuddin* sebagai Kawasan Wisata Religius dan Wisata Alam, yang secara keseluruhan akan menguntungkan Kota Pariaman.
 - c. *Kawasan Gerbang Malibou Anai* dengan tujuan Menciptakan suatu karakter kawasan sebagai penanda batas kota yang merupakan etalase bagi karakteristik Kabupaten Padang Pariaman dengan Merencanakan fasilitas – fasilitas pendukung kegiatan *rest area* bagi masyarakat pendatang dan lokal.
 - d. *Gerbang Bandara Internasional Minangkabau - Ketaping*.
 - e. Pengembangan *Kawasan Kota Mandiri* sebagai pusat dari sistem kegiatan perekonomian kota dan antar daerah.

- f. *Kawasan CBD Ketaping*, sebagai pusat aktivitas ekonomi khususnya perdagangan dan jasa dengan dilatarbelakangi dengan keberadaan bandara Internasional Ketaping.
- g. *Kawasan Embarkasi Haji*.
- h. *Kawasan Pasar Induk* di wilayah perbatasan Kabupaten Padang Pariaman – Kota Padang.
- i. *Kawasan Terminal Bus* yang dirancang menjadi kawasan terminal bus yang atraktif dan aksesibel bagi Kabupaten Padang Pariaman.

Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis akan dilakukan dengan melihat pada kondisi dan kemampuan daerah.

102. Dalam struktur Pemanfaatan tata ruang wilayah, dalam dokumen RTRW telah ditetapkan 3 wilayah pengembangan: (1) Wilayah pengembangan A yang disebut WP batang Anai/Lubuk Alung dan mencakup 6 kecamatan yaitu Kecamatan batang Anai, Lubuk alung, 2x11 Kayu Tanam, Sintuk Toboh Gadang, Ulakan Tapakis, Enam Lingkung; (2) Wilayah pengembangan B yang disebut WP VII koto yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu kecamatan VII Koto, V Koto Timur, Padang Sago, Patamuan, Nana Sabaris, 2x11 enam lingkung.; (3) Wilayah pengembangan C yang disebut WP Sungai Geringging yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Sungai Geringging, IV Koto Aur Malintang, Batang Gasan, Sungai Limau, V Koto Kampung Dalam.
103. Pengembangan yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap pola pemanfaatan ruang dan potensi pembangunan adalah keberadaan BIM dan didukung oleh 9 kawasan strategis. Diharapkan BIM dengan 9 kawasan strategis menjadi pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Padang Pariaman sehingga terwujud proses pembangunan yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan dengan kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam proses implementasinya memperlihatkan beberapa permasalahan berikut: (1) Masih rendahnya kualitas data dan alat analisa penyusunan rencana tata ruang; (2) Masih rendahnya SDM perencana, pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang; (3) Masih rendah pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang; (4) Belum adanya instrumen diinsentif dan insentif terhadap pemanfaatan ruang; (5) Banyak rencana tata ruang yang telah disusun belum dapat dioperasionalkan di lapangan karena rendahnya mutu, belum adanya aspek legal dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang.

2.2 ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah isu yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman yang diperkirakan memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut dapat berpengaruh secara positif apabila dikelola dengan baik dan sebaliknya.

1. 9 (sembilan) Kawasan Strategis

9 (sembilan) Kawasan Strategis telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2003 bekerjasama dengan Universitas Bung Hatta dengan counterpart Hijjas Kasturi Consultan dari Malaysia.

- a. Pengembangan Kawasan Pasar Lubuk Alung, yang direncanakan sebagai pasar regional di Kabupaten Padang Pariaman. Sampai saat sekarang pembangunan pasar ini belum bisa direalisasikan karena belum selesainya permasalahan tanah yang sudah terjadi sejak kawasan ini direncanakan. Pada saat ini yang berkembang di kawasan ini adalah pembangunan unit pertokoan di bagian belakang pasar yang merupakan tanah Perumka, disamping itu juga telah dibangun pasar dan unit pertokoan yang berlokasi tidak terlalu jauh dari Pasar Lubuk Alung. Pasar yang telah berdiri adalah Pasar Anak Nagari Lubuk Alung di Korong Sungai Abang juga telah dibangun oleh KSU (Koperasi Serba Usaha) Lubuk Alung dan pembangunan unit pertokoan di Simpang Lintas Lubuk Alung. Melihat pembangunan yang telah berkembang di sekitar kawasan perencanaan maka perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap rencana pembangunan pasar regional Lubuk Alung apakah akan tetap menunggu sampai permasalahan tanah selesai, membiarkan kondisi pasar sebagaimana adanya atau melakukan tinjauan ulang terhadap rencana pembangunan pasar regional Lubuk Alung.
- b. Pengembangan Kawasan Makam Syekh Burhanuddin, sebagai kawasan wisata religius dan wisata alam (pantai). Kawasan wisata religius Makam Syekh Burhannuddin merupakan satu dari sepuluh tujuan wisata utama di Propinsi Sumatera Barat dan merupakan satu-satunya kawasan wisata religius di Propinsi Sumatera Barat. Pada saat ini telah dilakukan pembangunan Mesjid Makam dan rencana relokasi surau-surau ke arah belakang makam. Walaupun sudah ada pembangunan di kawasan ini tapi belum ada rencana pengelolaan kawasan diantara pemangku kepentingan (pihak terkait). Untuk kedepan harus ditetapkan status pengelolaan kawasan sehingga lebih jelas hak dan wewenang pengelolaan kawasan.
- c. Kawasan Malibou Anai, dengan tujuan menciptakan suatu karakter kawasan sebagai penanda batas kota yang merupakan etalase bagi karakteristik Kabupaten Padang Pariaman dengan pembangunan rest area

kawasan ini. Pada saat ini di kawasan rest area sedang dibangun water park yang merupakan gabungan antara water boom dengan segala fasilitasnya dengan rest areal Malibou Anai. Dalam jangka panjang kawasan ini akan menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara dan nusantara, terutama dengan dukungan kawasan wisata Anai Resort.

- d. Gerbang Bandara Internasional Minangkabau-Ketaping, yang merupakan pengembangan kawasan di Simpang Duku. Pada saat ini sedang dibangun Fly Over di kawasan ini yang merupakan jembatan layang pertama dibangun di Sumatera Barat. Setelah selesainya pembangunan fly over maka dapat dilanjutkan dengan pengembangan sekitar kawasan sesuai dengan perencanaan kawasan yang telah dibuat baik oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- e. Pengembangan Kawasan Kota Mandiri, yang merupakan pengembangan kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Setelah disahkannya Perda 02 Tahun 2009 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman dari wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang di wilayah Kabupaten Padang Pariman, maka akan terjadi perubahan besar terhadap dinamika pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Ibukota akan menjadi pusat pertumbuhan yang baru yang akan tumbuh dan mendorong pertumbuhan seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Diperkirakan akan dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk pembangunan ibukota yang baru ini baik, oleh pemerintah (pusat, propinsi dan daerah) maupun oleh swasta dan masyarakat sendiri. Di kawasan ini akan dibangun pusat pemerintahan, prasarana dasar, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan lain sebagainya. Hasil perhitungan sementara diperkirakan investas yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas utama dan pengembangan lainnya diperkirakan akan menyerap dana sebesar 3,1 Triliun Rupiah. Pembangunan kawasan ibukota akan memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan kecamatan lainnya terutama dengan dikembangkannya akses jalan alternatif Simpang Palapa ke Kepala Hilalang dan Padang Bukit dan Jalan Sicincin-Malalak.
- f. Kawasan CBD Ketaping, sebagai pusat aktivitas ekonomi khususnya perdagangan dan jasa dengan dilatarbelakangi dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Perencanaan kawasan ini juga telah dipadukan dengan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) yang disusun oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan yang terdapat di kawasan ini adalah masih banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga akan menyulitkan pengembangan selanjutnya. Disamping

itu, permasalahan lain yang cukup rumit untuk ditangani di kawasan ini adalah kesulitan dalam penataan tanah. Hal ini disebabkan belum satunya persepsi masyarakat untuk mengembangkan kawasan ini dan sulitnya berkomunikasi dengan pemilik tanah yang banyak berdomisili di luar daerah.

- g. Kawasan Embarkasi Haji, merupakan rencana pengembangan kawasan embarkasi haji di Korong Kabun Kecamatan Batang Anai. Sampai saat ini belum ada kelanjutan dari pengembangan kawasan ini, sementara itu asrama Haji yang berada di Kota Padang sudah digunakan sebagai debarkasi haji Propinsi Sumatera Barat dan propinsi sekitarnya. Untuk masa yang akan datang perlu adanya kepastian terhadap pengembangan kawasan ini karena tanah untuk pembangunan kawasan Embarkasi Haji sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- h. Pasar Induk, merupakan pengembangan kawasan yang berada diperbatasan antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Padang. Dasar dari pembangunan pasar induk ini adalah adanya keinginan agar sayur-sayuran dan buah-buah yang masuk ke Kota Padang dan untuk di ekspor dilakukan pembersihan dan sorting terlebih dahulu di Pasar Induk. Sampai saat ini kesepakatan antara ke dua daerah ini belum ada kejelasannya dan agar perencanaan yang telah dibuat ada kepastian maka perlu dilakukan reevaluasi sehingga status perencanaan kawasan ini akan lebih jelas.
- i. Kawasan Terminal Bus, merupakan pengembangan kawasan terminal bus regional sebagai pengganti terminal type B yang berlokasi di Kota Pariaman. Terminal Bus direncanakan akan dibangun di Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru dengan konstruksi yang lebih representatif.

2. Bandara Internasional Minangkabau

Pembangunan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) telah diantisipasi dengan perencanaan kawasan CBD (Central Business Distric) dan Gerbang Bandara Ketaping. Pada saat ini keberadaan dari BIM belum memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Manfaat yang baru dirasakan oleh daerah baru pada penerimaan donasi dari penumpang yang akan berangkat, sebagian dana parkir, sebagian kecil lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya, sedangkan sebagian besar penumpang yang akan berangkat dan datang di bandara baru lalu lalang di kawasan tanpa ada yang singgah di sekitar kawasan. Hal ini disebabkan karena belum adanya faktor penarik yang akan membuat penumpang yang datang dan pergi untuk singgah di kawasan ini. Untuk masa

yang akan data agar keberadaan BIM ini memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maka pengembangan CBD (Centra Business Distric), RTBL dan kawasan gerbang dalam jangka menengah harus direalisasikan.

3. Pengembangan Coklat

Berdasarkan karakteristik sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman, pada saat ini telah berkembang aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal. Aktivitas ekonomi tersebut meliputi: (a) usaha tanaman padi sawah dan palawija; (b) usaha peternakan dan perikanan; (c) usaha perkebunan; (d) usaha perindustrian dan pariwisata. Namun seluruh usaha tersebut mengindikasikan belum memiliki kinerja yang maksimal sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang dimiliki. Karenanya, upaya maksimisasi kinerja usaha ekonomi masyarakat sangat diperlukan sehingga tercipta kinerja ekonomi wilayah yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman masih dikuasai oleh sektor pertanian walaupun memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun. Untuk mengatasi masalah ini kabupaten Padang Pariaman mencoba mengembangkan komoditi tanaman pertanian dan perkebunan. Diantaranya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam jangka panjang adalah komoditi cacao karena keadaan kondisi alam Kabupaten Padang Pariaman yang cocok dengan tanaman cacao dan tidak membutuhkan lahan hamparan yang dilakukan dengan sistem tumpang sari di bawah pohon kelapa. Disamping itu, Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan lokasi Kawasan Industri Minangkabau yang merupakan kawasan utama industri cacao dan berbagai produk ikutannya. Luas tanaman cacao pada tahun 2007 sudah mencapai 7.558,8 Ha dengan produksi 2.624 ton. Sampai tahun 2010 direncanakan penanaman cacao seluas 20.300 Ha dengan produksi sebanyak 20.000 ton/ha.

Untuk memacu pengembangan tanaman cacao di Kabupaten Padang Pariaman, selain dengan anggaran yang tersedia juga didukung dengan program terkait, yaitu penerapan teknologi usaha tani yang lebih optimal, pemakaian bibit unggul, penggalangan investasi swasta dalam pengembangan tiga juta cacao, pembinaan tanaman cacao, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil, permodalan dan meningkatkan akses petani terhadap permodalan. Pencanaan cacao dimulai pada tahun 2006 yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di Parit Malintang Kecamatan VI Lingsung.

Pengembangan coklat yang secara masal ini apabila gagal akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena begitu banyaknya masyarakat yang akan terkena dampak. Disisi lain apabila pengembangan coklatnya berhasil akan memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Untuk jangka panjang

penanganan dan pengelolaan cacao ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga lebih fokus dan lebih terarah.

3. Prasarana Jalan

Sistem transportasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan di bidang sosial dan ekonomi. Transportasi merupakan sarana yang mengakomodasi keterhubungan lokasi atau ruang fisik dimana berbagai kegiatan penduduk berada. Untuk mewujudkan hal tersebut prasarana jalan dan jembatan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat untuk kelancaran jalannya roda perekonomian dan aktivitas sosial.

Dilihat dari perkembangan dan ketersediaan prasarana jalan yang ada, maka prasarana jalan merupakan hal strategis dalam pembangunan. Jalan dijadikan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan setiap sektor, jalan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan di setiap tingkat pemerintahan dan bahkan jalan sudah dianggap sebagai hak azazi bagi masyarakat setara dengan kebutuhan pokok.

Tabel 2.12
Kondisi Jalan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2004 s/d 2007

Tahun	Kondisi (Km)		
	Baik	Sedang	Rusak
2004	208,11	512,92	571,17
2005	210,80	335,35	769,05
2006	276,27	414,18	623,75
2007	384,00	281,30	648,82

Dari tabel 3.1. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jalan tahun 2004, yaitu dari jalan tanah dan kerekel ke jalan aspal yaitu terjadi peningkatan pada tahun 2007 sepanjang 176 Km yang berkemungkinan berasal dari peningkatan jalan rusak (kerekel dan tanah) menjadi jalan aspal dan jalan kondisi sedang menjadi jalan aspal dengan kondisi baik. Walaupun terjadi peningkatan jalan tapi disisi lain terjadi penurunan jalan sedang sepanjang 233 Km dan peningkatan jalan rusak dari tahun 2004 ke tahun 2007 sepanjang 78 Km. Walaupun perbedaan antara jalan kondidi baik dengan jalan sedang dan rusak hanya sepanjang 135 Km atai rata-rata 34 Km per tahun, namun dalam jangka panjang secara perlahan akan terjadi penurunan kondisi jalan di Kabupaten Padang Pariaman dan akan berdampak sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2. kemampuan pemerintah daerah dalam menangani jalan dimana untuk pemeliharaan rutin hanya sanggup 43%, pemeliharaan periodik 29% dan

peningkatan jalan 65% dari yang seharusnya. Kondisi ini akan lebih diperparah apabila dana APBD tidak mendukung dan sangat tergantung kepada dana pemerintah pusat. Untuk itu, kedepan dalam jangka panjang pola penanganan jalan harus dirubah tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Pola tersebut dapat dilakukan dengan pelibatan masyarakat yang semakin luas dan pola atau teknologi lain yang dapat mengurangi beban pemerintah daerah yang memang sangat terbatas dalam penanganan jalan. Lebih rinci kondisi ideal dan realisasi penanganan jalan di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2004 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 2.13
Perbandingan Kondisi Ideal dan Realisasi
Penanganan Jalan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2004 s/d 2007

Kegiatan	Volume (Km)		Persentase (%)	Realisasi Keuangan (Rp)
	Ideal	Realisasi		
Tahun 2004				
Pemeliharaan Rutin	576,82	264,40	45,84	1.510.000.000,-
Pemeliharaan Periodik	144,21	39,75	27,56	7.838.800.000,-
Peningkatan	50,47	39,75	78,76	7.252.200.000,-
Tahun 2005				
Pemeliharaan Rutin	433,72	230,60	53,17	1.510.000.000,-
Pemeliharaan Periodik	108,43	47,50	43,81	9.864.181.200,-
Peningkatan	37,95	23,03	60,69	4.918.000.000,-
Tahun 2006				
Pemeliharaan Rutin	552,36	163,00	29,51	1.859.450.000,-
Pemeliharaan Periodik	138,09	25,25	18,29	8.166.667.000,-
Peningkatan	48,33	44,07	91,19	10.020.000.000,-
Tahun 2007				
Pemeliharaan Rutin	532,36	225,00	42,26	1.900.000.000,-
Pemeliharaan Periodik	133,06	35,96	27,03	12.027.800.000,-
Peningkatan	46,57	9,05	19,43	2.040.000.000,-

Sumber : Hasil Analisa

Asumsi :

1. Pertumbuhan jalan mantap diharapkan 2% per tahun
2. Umur rencana jalan diperkirakan 15 tahun sehingga diperkirakan 7% jalan mantap akan mengalami penurunan kondisi kemantapan setiap tahun.

4. Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Anggaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sangat tergantung

kepada dana pusat dimana lebih dari 95% berasal dari dana perimbangan dan dana lainnya dari pusat sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu besarnya porsi dana pusat sehingga keterlambatan dalam pemberitahuan besaran dana dari pusat sangat menyulitkan bagi daerah untuk menyusun program pembangunannya. Perkembangan APBD Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2007 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2004 – 2008

	TAHUN	APBD (Rp)	Belanja Langsung (Rp) (%)	Belanja Tidak Langsung (Rp) (%)
1	2007	509.794.326.133	222.463.058.310 44 %	287.331.267.823 56 %
2	2008	693.551.265.468	251.270.393.041 36 %	442.280.871.627 67 %
3	2009	591.441.388.934	170.230.738.613 29 %	421.210.650.321 71 %

Dari tahun 2007 sampai dengan 2009 terlihat adanya peningkatan APBD Kabupaten Padang Pariaman. Peningkatan pendapatan APBD ini lebih dikarenakan peningkatan gaji PNS yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Sementara itu belanja langsung atau belanja publik terlihat semakin menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa situasi APBD Kabupaten Padang Pariaman dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan.

Tabel 2.15
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2004 – 2008

TAHUN	PAD (Rp)	PERTUMBUHAN (%)
2004	10.155.576.705	
2005	10.270.200.000	1,13
2006	12.067.459.478	17,50
2007	13.232.600.000	9,66
2008	17.007.200.000	28,53
RATA-RATA PERTUMBUHAN PERTAHUN		14,20

Jika dilihat dari komposisi penerimaan daerah terlihat bahwa penerimaan dari PAD baru menyumbang sebesar 3.1% dari total penerimaan daerah sebesar 389.608,02 juta rupiah tahun 2006. Sebagian besar penerimaan berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 96,1%. Keadaan ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Kecilnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD memberikan kejelasan bahwa kabupaten Padang Pariaman sangat tergantung pada dana dari pusat dan propinsi. Baik itu DAU, DAK, bagi hasil dan perimbangan dana Propinsi untuk kabupaten kota.

Tabel 2.16
KONTRIBUSI PAD TERHADAP APBD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2004 – 2008

TAHUN	APBD	PAD	PERSENTASE
2004	235.137.914.722	10.155.576.705	4,32
2005	273.341.688.987	10.270.200.000	3,76
2006	389.608.021.298	12.067.459.478	3,10
2007	458.639.017.495	13.232.600.000	2,89
2008	516.333.081.273	17.007.200.000	3,29
RATA-RATA			3,26

Persentase kontribusi PAD rata-rata dalam lima tahun hanya sebesar 3,26 %, hanya pada tahun 2004 persentase 4,32 % dibandingkan tahun 2007 yang hanya sebesar 2,89 %. Walau secara nominal total PAD relatif meningkat dari tahun 2004-2008, namun besarnya masih relatif kecil.

5. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2006 berjumlah 66,5 ribu jiwa atau sekitar 17,45 persen meningkat dari 53,70 ribu jiwa atau sekitar 14,67 persen pada tahun 2005. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 2,78 persen. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sedikit menurun menjadi 62,5 ribu jiwa atau sekitar 17,12 persen.

Masalah kemiskinan bukan hanya menjadi masalah kabupaten/kota tetapi sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah pusat dengan berbagai programnya telah berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten Padang Pariaman sendiri telah melakukan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Namun yang lebih penting dari semua program

tersebut adalah perlunya konsistensi dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu antar SKPD dan kelembagaan. Selain itu juga perlu keterpaduan program/kegiatan dalam APBD, perencanaan yang sesuai kondisi objek/sasaran, keterpaduan wilayah dan keterpaduan dalam pengelolaan sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja.

BAB III

PREDIKSI PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk dua puluh tahun kedepan diperlukan prediksi jangka panjang dari beberapa indikator pokok pembangunan ekonomi daerah secara makro. Indikator pembangunan daerah tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan fisik tata-ruang wilayah. Prediksi ini perlu dilakukan sebagai dasar untuk mencapai visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Padang Pariaman periode tahun 2005 - 2025. Dengan adanya gambaran masa datang Kabupaten Padang Pariaman tersebut diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman untuk jangka panjang agar menjadi lebih tepat dan realistis sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Selanjutnya, agar hasil prediksi dapat bermanfaat pula bagi penyusunan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) untuk masing-masing periode lima tahunan.

3.1 Prediksi Pembangunan Agama dan Budaya

1. Prediksi pembangunan bidang agama didasarkan kepada prediksi kualitatif berdasarkan pencermatan dan pengamatan para tokoh-tokoh agama di Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan kearah penguatan ajaran dan perkembangan kearah pelemahan praktek ajaran agama memperlihatkan kondisi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, walaupun fluktuasi antara kedua hal tersebut tidak signifikan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh peningkatan pembangunan sarana ibadah, khususnya mesjid dan mushalla dari waktu ke waktu hampir di setiap nagari sudah memiliki mesjid/ mushallah, sehingga membantu masyarakat untuk menjalankan praktek ibadah mereka. Disisi lain, perkembangan sarana fisik peribadatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan dan perkembangan mentalitas spiritual masyarakat. Hal ini terlihat, masih banyaknya pelanggaran ajaran agama yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara tuntutan terhadap pelaksanaan ajaran agama secara utuh atau "kaffah" masih belum menunjukkan kearah tersebut. Konsekuensi dari itu, koselehan yang ujud di tengah masyarakat masih dalam bentuk kesalehan individual dan belum dalam bentuk keslehan sosial yang diharapkan.
2. Bidang pendidikan agama, bahwa perkembangannya secara kuantitatif relatif menggembirakan, namun secara kualitatif belum begitu signifikan dibandingkan dengan masa perkembangan pendidikan agama sebelum tahun 1975-an. Walaupun demikian, iklim pendidikan agama Islam di Kabupaten Padang Pariaman tidak hilang dan hanyut oleh perubahan pendidikan umum yang sudah berskala regional dan nasional. Kabupaten Padang Pariaman

masih memiliki tokoh-tokoh agama yang berskala regional dan nasional. Surau dan Pesanteren dituntut untuk menentukan arah pengembangan keagamaan masyarakat yang sesuai dengan arah perkembangan kehidupan beragama yang inklusif dan terbuka. Hal ini, hendaknya dapat memacu daerah untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan agama Islam.

3. Implikasi kedermwanaan dalam bentuk; zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lainnya masih pada sebatas penerapan ibadah yang dampaknya terhadap sosial masyarakatnya masih relatif kecil. Apabila ibadah seperti ini dikelola dengan manajemen yang baik, tentu akan memberikan dampak ekonomi yang lebih produktif dan berdayaguna bagi meningkatkan kehidupan masyarakat. Sumber dana dalam bentuk; zakat, infaq, sedekah, dan wakaf hendaknya dapat diterapkan melalui penerapan konsep "pada awalnya sebagai si penerima dan selanjutnya menjadi si pemberi". Jika konsep ini menjadi ujud di Kabupaten Padang Pariaman melalui wadah tunggal dan dikelola dengan manajemen yang baik akan mampu sebagai sarana pengentas kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat.
4. Modal sosial yang terdiri dari keberadaan kelembagaan adat dan agama yang terkenal dengan filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai". Filosofi ini akan mewujudkan masyarakat Padang Pariaman yang beragama dan beradat yang ditandai dengan kuatnya pengembangan kelembagaan syariah, sistim syariah dan ekonomi syariah. Revitalisasi Pemilihan dan pengangkatan panghulu tentu dengan tetap menurut ketentuan adat salingka nagari, namun patut pula diberikan penguatan yang bersifat administratif, hukum dan azaz kepatutan. Kepemimpin Ulama, Panghulu, Organisasinya dan moralitasnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. Tokoh dan sosok (figur) keteladanan Ulama dan Penghulu benar-benar dapat diteladani oleh umat dan dunsanak serta kemanakan. Dengan demikian, modal sosial Kabupaten Padang Pariaman akan menunjukkan kecenderungan yang semakin baik pada masa yang akan datang.

3.2 Prediksi Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Prediksi pembangunan tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan penciptaan kondisi sinergi yang ideal antara ketiga unsur tata pemerintahan, dimana pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, dunia usaha dan masyarakat merupakan komponen "tali tigo sapilin" dalam mendukung pencapaian tatanan ideal kehidupan bermasyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025. Sistem birokrasi pemerintahan tidak hanya bertanggungjawab

menciptakan sinergi dan harmonisasi antara ketiga komponen pembangunan tersebut, tetapi juga melakukan pembenahan terhadap kondisi internal yaitu pembenahan *capacity building* aparatur pemerintah. Berdasarkan hasil pelaksanaan pendidikan aparatur pemerintahan tahun 2005 – 2006 untuk Diklat Kader (Tugas Belajar) menunjukkan bahwa (a) D.III sebanyak 6 orang tahun 2005 dan 9 orang tahun 2006, akumulasinya menjadi 15 orang, (b) D.IV sebanyak 5 orang tahun 2005 dan 2 orang tahun 2006, sehingga akumulasinya menjadi 7 orang. (c) S1 sebanyak 13 orang tahun 2005 dan 3 orang tahun 2006, akumulasinya menjadi 16 orang (d) S2 sebanyak 10 orang tahun 2005 dan 15 orang tahun 2006, akumulasinya menjadi 25 orang, (f) S3 tidak ada pada tahun 2005 dan 4 orang tahun 2006 (BPS,2007). Hal ini berarti pembangunan aparatur pemerintahan yang efisien dan efektif dalam upaya mensinergikan kekuatan ketiga unsur pelaku pembangunan dalam mewujudkan aparatur yang memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai pelayan publik pada tahun 2025 menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten yang mapan dalam pemerintahan.

5. Upaya pencapaian tata pemerintahan dengan aparatur yang efisien dan efektif perlu dilakukan penyiapan data kinerja aparatur secara berkelanjutan. Dengan demikian, sejumlah kebijakan yang efisien dalam menata kelembagaan dan peringkatan mutu aparatur dapat terlaksana dengan baik, seperti rasionalisasi pegawai dalam jajaran birokrasi dan kualitas aparatur kabupaten Padang Pariaman. Kinerja aparatur pemerintahan akan dapat diukur berdasarkan indikator berikut ini;
 - a. Semakin membaiknya proses administrasi pengambilan keputusan sistem kepemimpinan.
 - b. Semakin meningkatnya kadar transparansi akuntabelitas, dan ekonomis pemerintah daerah.
 - c. Pelaksanaan Pilkada yang semakin menunjukkan kualitas demokrasi.
 - d. Penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis, termasuk terhadap perlindungan HAM.
 - e. Pelayanan publik semakin efisien dan efektif, sehingga masyarakat semakin merasakan kenyamanan sebagai anggota masyarakat.
 - f. Eksistensi masyarakat sebagai anggota masyarakat Kabupaten Padang Pariaman semakin meningkat
 - g. Otonomi daerah dan desentralisasi semakin menunjukkan keberadaan sumberdaya lokal dan pemanfaatannya mampu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

6. Pembangunan tata pemerintahan yang baik dapat juga dilakukan melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis. Selanjutnya, penguatan terhadap hirarki kelembagaan masyarakat diwujudkan melalui pendekatan dari atas ke bawah dan bawah ke atas (*bottom-up – top-down*) sehingga tanggungjawab dan proses pembangunan pemerintahan dan hukum berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

3.3 Prediksi Pembangunan Manusia dan Sosial

Prediksi bidang pembangunan manusia dan sosial Kabupaten Padang Pariaman mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka panjang Sumatera Barat yang berorientasi kepada konsensus internasional tentang pendidikan yaitu *Education for All* (EFA) serta pembangunan manusia *Mellenium Development Goals* (MDGs). Kabupaten Padang Pariaman konsisten dengan target dan indikator konsesus tersebut yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025. Hal itu, sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 serta terkait dengan Undang-undang kesehatan. Jadi, prediksi pembangunan manusia dan sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2005 – 2025 dapat dikelompokkan atas beberapa bidang. Untuk melihat ringkasan prediksi pembangunan manusia dan sosial Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Pencapaian Pembangunan Sosial dan
Sumberdaya Manusia Tahun 2005 – 2025

Indikator Pencapaian	2005-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2025
IPM				
IPM a/	68,8	71,2	74,6	79,8
Rangking Sumatera Barat	11	10	9	8
Pendidikan				
Akses Pendidikan b/	91%	93%	95%	98%
Akses SMA	55%	65%	75%	80%
Perguruan Tinggi	12,4%	22,2%	28,9%	39,7%
SMA masuk kedalam 10% terbaik Sumatera Barat	3	4	5	6
SMK Spesifik	1	2	3	4
Tata Kelola	Penataan Internal Manajemen	Penataan Kuantitas & Kualitas	Penataan Kualitas	ISO Nasional
Kesehatan				
IMR c/	34	29	23	16
Angka Kurang Gizi (%) d/	15.80	14.20	12.50	10.40
Angka Kematian Bayi (/1.000 Kel.)	38.00	35.00	31.00	26.00
Angka Kematian Kasar (/1.000 Pddk)	7.00	6.60	6.20	6.00
Umur Harapan Hidup (dalam Tahun)	68.40	69.50	70.70	71.90
Prasejahtera	8,05%	7,9%	6,8%	5,5%
Agama				
Kesalehan Sosial terbangun % Pembayar Zakat e/	50%	65%	80%	90%
Kelembagaan Ekonomi Pangsa praktek syariah f/	10%	20%	30%	40%
Kemiskinan & Pengangguran				
% RT Miskin g/	17,45%	15,50%	12,50%	9,50%
% Pengangguran	15,74%	12,50%	10,25%	8,50%

Keterangan :

a/, b/, dan c/ Base line 2005

d/ Gizi Kurang dan Buruk Base line 2005, (BPS, 2005)

e/ Praktek pembayaran baik dan terkelola maupun tidak.

f/ Praktek syariah secara keseluruhan.

g/ Perhitungan berdasarkan indikator kemiskinan absolute.

a. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan ukuran pemerataan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk Kabupaten Padang Pariaman kecenderungan perkembangan IPM diprediksi secara rata-rata setiap 5 tahun, dan sebagai *base line* adalah tahun 2005 dengan capaian IPM 68,8. Selanjutnya, untuk tahun 2011-2015 akan menjadi 72,2 dan tahun 2016-2020 meningkat menjadi 75,6. Akhirnya pada tahun 2025 menjadi 80,0 setara dengan apa yang menjadi target bagi Propinsi Sumatera Barat di bidang IPM. Apabila dilihat dari sisi posisi ranking IPM Kabupaten Padang Pariaman dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, tahun 2005 (base line) memperlihatkan berada pada posisi 11 dan diprediksi pada tahun 2025 peringkatnya akan semakin membaik menjadi peringkat ke 7. Prediksi ini didasarkan kepada target pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat.

b. Pembangunan Kesehatan dan Gizi

1. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman didasarkan kepada Angka kematian bayi, Umur harapan hidup, Angka kurang gizi, Angka kematian kasar, dan prasejahtera. Kondisi base line tahun 2005-2010 angka kematian bayi adalah 38 per 1.000 kelahiran, dan kondisi ini terus membaik sampai dengan tahun 2025 menjadi 26 per 1.000 kelahiran. Demikian juga dengan umur harapan hidup, yaitu tahun 2005 sebesar 68,40 tahun. Setelah itu, umur harapan hidup terus meningkat sampai dengan tahun 2025 menjadi 71,90 tahun. Angka kurang gizi diprediksi juga semakin berkurang, sehingga pada tahun 2025 sudah menjadi 10,40 persen. Untuk lebih rinci tentang pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dimana kondisi masyarakat prasejahtera yang semakin berkurang sampai dengan tahun 2025 tinggal sebesar 5,5 persen. Rasional keberhasilan Pembangunan kesehatan Kabupaten Padang Pariaman didasarkan kepada program pemerintah daerah dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat berupa perbaikan tingkah laku hidup bersih, kecukupan pangan, pendayagunaan teknologi kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan menjadi meningkat pada yang masa datang.
2. Pembangunan ketahanan gizi difokuskan kepada permasalahan masih relatif tingginya angka kurang gizi yaitu 15,80 persen pada tahun base line (2005). Sumberdaya pangan dan program ketahanan pangan daerah untuk dapat mengupayakan perbaikan gizi keluarga berdasarkan sumberdaya pangan yang dimiliki daerah baik yang bersumber dari darat maupun dari laut. Selain itu

sistem sanitasi, air minum, ketersediaan makanan yang cukup karbohidrat, protein dan vitamin menjadi penentu solusi pembangunan gizi di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian pembangunan keseimbangan perilaku gizi masyarakat dapat meningkatkan aspek-aspek yang diprediksi sampai dengan tahun 2025. Akhirnya angka kurang gizi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 tinggal sebesar 10,40 persen.

3. Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Padang Pariaman saat ini dan konsep pembangunan Propinsi Sumatera Barat yang menjadikan daerah ini sebagai pusat perobatan untuk wilayah Sumatera bagian Tengah. Dewasa ini sudah terdapat rumah sakit paru di Lubuk Alung. Untuk mengantisipasi pengembangan bidang kesehatan pada tahun 2025 kelak, rumah sakit ini diharap dapat dikembangkan menjadi rumah sakit andalan daerah yang bertaraf nasional khusus untuk paru (Pusat Kesehatan Paru Nasional)

c. Pembangunan Pendidikan

1. Pembangunan Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman menuju kearah peningkatan mutu pendidikan yang dicerminkan oleh SMA-SMA yang masuk dalam 10 persen terbaik di Sumatera Barat. Pada base line (tahun 2005) ada 3 sekolah masuk kedalam 10 persen terbaik di Sumatera Barat, diprediksi akan terus meningkat sampai tahun 2025 menjadi 6 sekolah. Selain itu, akses pendidikan yang juga memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dimana tahun 2005 sebesar 91 persen, kemudian perluasan akses pendidikan meningkat menjadi 93 persen pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2025 meningkat menjadi 98 persen.
2. Kabupaten Padang Pariaman juga membangun Sekolah Menengah Keterampilan (SMK) spesifik dalam rangka menunjang sub-sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti SMK Kakao. Pembangunan SMK spesifik tersebut diharapkan akan berkembang terus dimana pada tahun 2010 memiliki 1 SMK spesifik sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki 4 SMK spesifik. Kebijakan SMK spesifik ini perlu didukung oleh masyarakat Padang Pariaman tidak saja SMK Kakao, tetapi juga terhadap SMK-SMK spessifik lainnya seperti; ekonomi, kesehatan, dan pariwisata. Dengan demikian, Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi suatu daerah yang mampu menyediakan tenaga kerja terampil madya yang akan menunjang perkembangan sektor riel di daerah yang berbasis kepada perkembangan dunia pendidikan.
3. Tatanan perkembangan pendidikan di Kabupaten padang Pariaman untuk masa yang akan datang tersebut tidak meninggalkan karakter keagamaan yang sudah

menjadi simbol di daerah ini. Jadi, perwujudan pendidikan professional yang berorientasi pada pembelajaran dan bukan pengajaran sehingga bisa terbangun interaksi kolegial dalam proses belajar mengajar. Dari sisi, pengembangan kelembagaan juga diharapkan terbentuknya professional staf dan manajemen internal pendidikan kemudian diiringi dengan perbaikan efisiensi, dan kualitas pendidikan sehingga pada tahun 2025 seluruh jenjang pendidikan menjadi setara dengan pendidikan yang berskala nasional (ISO Nasional).

d. Kemiskinan dan Pengangguran

1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran bertitik tolak dari kondisi base line (tahun 2005), karena masih memperlihatkan besaran rumah tangga miskin sebesar 17,45 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 15,74 persen. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran dapat diperbaiki melalui upaya menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat, serta diiringi dengan pemberdayaan semangat kerja keras. Dengan demikian, setiap tahapan jumlah rumah tangga miskin dan pengangguran dapat ditekan.
2. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2015 akan menekan rumah tangga miskin menjadi 15,50 persen, pada tahun 2020 menjadi 10,50 persen, dan akhirnya pada tahun 2025 menjadi 9,50 persen. Sedang upaya menekan jumlah pengangguran tahun 2015 menjadi 12,50 persen, pada tahun 2020 akan menjadi 10,25 persen, dan akhirnya pada tahun 2025 jumlah pengangguran akan menjadi 8,50 persen. Penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran membutuhkan keterpaduan dan dana yang cukup besar. Melihat pada kondisi yang ada saat ini maka pada tahun 2025 kondisi kemiskinan dan pengangguran dengan diharapkan dapat mencapai angka 9,50 persen dan 8,50 persen. Angka-angka ini masih dibawah angka propinsi. Tetapi dengan mengingat masih sulitnya kondisi ekonomi pada tahun-tahun mendatang maka angka prediksi ini diharapkan masih menjadi angka yang cukup relevan untuk dicapai.
3. Capaian pembangunan manusia dan sosial Kabupaten Padang Pariaman mengarah kepada keseimbangan pembangunan. Selain meningkatkan kualitas manusia dan sosial masyarakat juga meningkat kualitas pengamalan agama yang akhirnya juga menuju keseimbangan dalam perekonomian yang berlandaskan syariah. Penataan pencapaian kondisi ini dilakukan penataan kelembagaan pendidikan, dan keagamaan sehingga pada tahun 2025 kondisi keseimbangan menjadi terujud melalui perbaikan profesionalisme masyarakat.

3.4 Prediksi Pembangunan Ekonomi

1. Unsur utama yang menjadi dasar prediksi pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk yang akhirnya bermuara pada investasi dan pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2025 mendatang dengan menggunakan data tahun 2005 sebagai data dasar (Base-line). Prediksi dilakukan dengan menggunakan metode "*Autoregressive Moving Average (ARMA) Process*". Sejalan dengan hal itu, melalui prediksi pendapatan per kapita dan perkembangan jumlah penduduk daerah tersebut akan dapat diperkirakan besarnya Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2010 – 2025. Setelah itu dilakukan prediksi terhadap besaran inflasi tahun 2010 – 2025. Dengan dasar itu, maka akan diperoleh prediksi PDRB atas dasar harga konstan per kapita dan totalnya. Kemudian, Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2010 – 2025 dapat dikalkulasikan dan diprediksikan atas dasar perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tersebut, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.
2. Prediksi kebutuhan total investasi untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2005-2025 dilakukan berdasarkan prediksi ICOR Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tersebut. Di samping itu, dengan diketahuinya besaran kebutuhan total investasi, maka berdasarkan data masa lalu investasi pemerintah diprediksi pula kebutuhan investasi pemerintah tersebut untuk tahun 2010 – 2025. Dengan diketahuinya hasil prediksi kebutuhan investasi total dan prediksi perkembangan investasi pemerintah, maka besaran kebutuhan investasi swasta dan masyarakat dapat pula diketahui untuk tahun 2010 -2025. Jadi, besaran pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi dan besaran kebutuhan investasi merupakan indikator kasar dari kemajuan ekonomi yang diperkirakan akan dapat dicapai masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2025 nantinya.
3. Prediksi pembangunan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman untuk periode 2005-2025 dilakukan dengan menggunakan skenario peningkatan investasi, baik pemerintah maupun swasta. *Skenario* adalah kondisi pembangunan daerah dimana pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman adalah hanya mengikuti kecendrungan normal yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi hanya mengikuti trend perkembangan masa lalu dengan menjalankan kebijakan dan upaya pembangunan daerah yang lebih kurang sama dengan yang dilakukan sebelumnya. *Skenario* tersebut berdasarkan kepada kondisi pembangunan daerah dimana pemerintah daerah diasumsikan dapat menggerakkan kegiatan

investasi sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini dan diikuti dengan terobosan-terobosan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan cara demikian, pertumbuhan ekonomi daerah akan sesuai dengan hasil prediksi dan apa yang diharapkan untuk masa yang akan datang serta kondisi ini tentunya akan membawa dampak dalam penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita.

Tabel 3.2
Prediksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan Skenario Pendapatan Perkapita
Tahun 2005-2025

No	Unsur Prediksi	Data Dasar (2005)	2010	2015	2020	2025
1	Persentase Investasi terhadap PDRB (%)	35,12	33,54	32,46	31,39	31,39
2	ICOR Total	4,75	4,50	4,25	4,00	3,75
3	PDRB Harga Konstan (Rp. Miliar)	1.966,682	4.210,896	6.812,489	10.570,154	16.826,326
4	Pertumbuhan Ekonomi (Persentase)	7,36	7,45	7,63	7,84	8,37
5	Tingkat Inflasi (Persentase)	6,75	6,25	6,00	5,50	5,00
6	PDRB Harga Berlaku (Rp. Miliar):	2.980,279	4.524,608	7.332,821	11.398,855	18.236,857
	a. Sektor Primer	1.043,098	1.447,874	2.126,518	3.077,690	4.559,214
	b. Sektor Sekunder	1.192,112	1.900,335	3.226,442	5.129,485	8.388,953
	c. Sektor Tertier	745,070	1.176,397	1.979,861	3.191,679	5.288,689
7	Δ PDRB Harga Berlaku (Rp. Miliar)	220,342	308,865	561,642	813,206	1.367,600
8	Perkiraan Kebutuhan Investasi Total Harga Berlaku (Rp. Miliar)	1.046,625	1.517,553	2.380,234	3.578,100	5.724,549
9	Kebutuhan Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	59,590	134,692	175,100	253,895	393,537
10	Kebutuhan Investasi Swasta dan masyarakat (Rp. Miliar)	987,035	1.382,861	2,208,134	3.324,205	5.331,012
11	Jumlah Penduduk (Ribuan Orang)	378,208	397,118	416,577	436,573	457,092
12	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,02	1,00	0,98	0,96	0,94
13	Pendapatan Perkapita Harga Konstan	5,20	10,60	16,35	24,21	36,81
14	Pendapatan Perkapita Harga Berlaku (Rp. Juta)	7,88	11,39	17,60	26,11	39,89

4. Prediksi dengan atas dasar *skenario* tersebut, laju pertumbuhan investasi Kabupaten Padang Pariaman, yang meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMA), untuk periode 2005-2025 hasil prediksi menunjukkan rata-rata pertumbuhannya hanya sebesar 8,96 persen (angka pembulatan dari 8,956 persen) dengan rincian untuk periode lima tahunan adalah seperti terlihat pada Tabel 3.2. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 adalah 4,50 dan pada tahun 2025 menjadi 3,75. Hal ini berarti bahwa untuk peningkatan output atau pendapatan sebesar Rp. 1 juta dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp. 3,75 juta. Selanjutnya, dengan menggunakan data PDRB harga konstan tahun 2000 sebagai basis, maka prediksi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman 2005 diperkirakan sebesar 9,46 persen. Laju pertumbuhan ini ternyata relatif tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat karena perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dewasa ini ditopang oleh keberadaan Bandara Minang Kabau Internasional Airport (MIA) sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap output atau PDRB Kabupaten Padang Pariaman. Di samping itu, tingginya pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman ditopang oleh kebijakan pemerintah daerah menjadikan Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu sentra Kakao di Sumatera Barat dan Harga dunia Kakao menunjukkan harga yang relatif stabil. Jadi, kondisi ini menguntungkan daerah Kabupaten Padang Pariaman dari sisi output daerah.

5. Investasi daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu diupayakan secara terus-menerus, karena pada tahun 2010 prediksi tingkat pertumbuhan investas sebesar 1,16 persen dengan nilai nominal investasi sebesar Rp. 1,517,553 Milyar. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) secara total untuk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 diprediksi sebesar 4,50 yaitu mengalami penurunan dari tahun 2005, karena Kabupaten Padang Pariaman lebih memfokuskan ekonomi pada sektor pertanian terutama pada sub-sektor perkebunan dan sub-sektor perikanan laut. Hal ini dirasakan sangat rasional mengingat perekonomian Kabupaten Padang Pariaman masih didominasi oleh sektor pertanian pada dewasa ini dan untuk masa yang akan datang. Namun demikian, sektor pertanian yang didukung oleh agroindustri dan perdagangan. Dengan demikian, perkiraan ICOR untuk Kabupaten Padang Pariaman sampai pada tahun 2025 dengan besaran yang semakin kecil yaitu menjadi 3,75. Alasannya adalah karena penggunaan modal tidak akan semakin tinggi karena kegiatan ekonomi daerah didominasi oleh sektor pertanian yang didukung oleh agroindustri dan perdagangan.

6. Dengan diketahuinya prediksi laju pertumbuhan ekonomi dan ICOR, dapat pula diperkirakan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai laju pertumbuhan yang telah ditargetkan untuk tahun 2010-2025. Untuk keperluan ini terlebih dahulu perlu dihitung perkiraan PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari PDRB atas dasar harga berlaku dengan mengeluarkan aspek inflasi untuk mendapatkan PDRB dengan atas dasar harga konstan tersebut. Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dihitung perubahan PDRB harga berlaku untuk setiap tahunnya. Kemudian dengan perubahan PDRB atas dasar harga berlaku tersebut dan hasil prediksi ICOR, maka diperoleh perkiraan kebutuhan investasi harga berlaku untuk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010 sebesar Rp. 1,517,553 Miliar. Selanjutnya, dilakukan prediksi kebutuhan investasi pemerintah dengan menggunakan metode yang sama, untuk tahun 2010 diperoleh sebesar Rp. 134,692 Miliar. Dengan mengurangkan kebutuhan total investasi dengan kebutuhan investasi pemerintah diperoleh kebutuhan investasi swasta dan masyarakat tahun 2010 sebesar Rp. 1.382,861 Miliar. Demikian seterusnya sampai dengan tahun 2025 yang rinciannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.
7. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman 2010 adalah 397,118 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 %. Sementara, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 11,39 juta. Kemudian dengan mengalikan kedua variabel tersebut diperoleh total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 4,524,896 Milyar. Selanjutnya, prediksi laju inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,25 persen maka diperoleh PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.210,896 Miliar. Dengan demikian, sekaligus diperoleh nilai Pendapatan Perkapita atas dasar harga konstan untuk tahun yang bersangkutan sebesar Rp. 10,60 juta. Selanjutnya, bila diasumsikan bahwa \$1,00 US Dollar mata uang Amerika adalah Rp. 10.000, yaitu sama dengan asumsi APBN Tahun 2008, maka nilai pendapatan perkapita Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2010 adalah sekitar US \$ 1.600.
8. Tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman diperkirakan semakin baik, yaitu sebesar 7,45% karena pengaruh keberadaan Bandara Minang Kabau Internasional Airport. Sementara itu, Produksi sektor pertanian secara bertahap diperkirakan akan meningkat menjadi semakin lebih tinggi. Keadaan ini terutama disebabkan oleh perkembangan sub-sektor perikanan laut, dan sub-sektor perkebunan yang biasanya rasio perubahan modal dan perubahan output yang tidak begitu besar. Selain itu, sektor pertanian Kabupaten Padang Pariaman akan semakin berkembang karena semakin banyaknya lahan-lahan kosong yang digunakan untuk tujuan pembangunan perkebunan dalam bentuk sentra-sentra perkebunan produktif.

Keadaan ini menyebabkan ICOR secara rata-rata diperkirakan akan menurun tahun 2025 menjadi 3,75.

9. Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2005 – 2025 terjadi transformasi sektoral antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertier. Secara nominal ketiga sektor tersebut sama-sama menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pada tahun dasar (2005) menunjukkan sektor primer sebesar Rp 1.043,098 miliar, sektor sekunder sebesar Rp 1.192,112 miliar dan sektor tertier sebesar Rp. 745,070 miliar yang perimbangan persentasenya adalah sekitar 35 persen; 40 persen; dan 25 persen. Kemudian perubahan dari sektor primer ke sektor sekunder terjadi peningkatan perubahan nilai tambah secara berkelanjutan sebagai akibat dari peningkatan mutu pendidikan dan penggunaan teknologi sebesar 21 persen pada tahun 2025. Dengan demikian, kondisi tahun 2025 menunjukkan sektor primer meningkat menjadi sebesar Rp 4.559,214 miliar, sektor sekunder meningkat menjadi sebesar Rp 8.388,953 miliar, dan sektor tertier meningkat menjadi sebesar Rp. 5.288,689 miliar yang perimbangan persentasenya bergeser menjadi 25 persen; 46 persen; dan 29 persen.
10. Perkembangan perubahan sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tertier merupakan implikasi dari pembangunan manusia dan sosial yang dihasilkan dari pembangunan pendidikan dan keagamaan. Walaupun terjadi transformasi sektoral secara komposisi, tetapi tetap perekonomian Kabupaten Padang Pariaman berbasiskan kepada sektor primer. Hal ini terlihat secara nominal sector primer masih mendominasi perekonomian daerah.
11. Pada tahun 2015 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku sudah mencapai Rp. 17,60 juta setara dengan US\$ 1.760. Kondisi pendapatan per kapita terus membaik sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, dimana tahun 2020 meningkat menjadi Rp 26,11 juta setara dengan US\$ 2.611. Akhirnya pada tahun 2025 pendapatan per kapita mencapai Rp. 39,89 juta setara dengan US\$ 3.989. Walaupun prediksi pendapatan per kapita Kabupaten Padang Pariaman masih di bawah prediksi pendapatan per kapita Provinsi pada tahun 2025, tetapi kondisi tersebut sudah memperlihatkan suatu keberhasilan pembangunan ekonomi yang signifikan dan sesuai dengan rasional ekonomi Kabupaten Padang Pariaman.
12. Hasil Prediksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 – 2025 tersebut akan mampu dicapai dengan asumsi pembangunan ekonomi pendekatan daerah dengan terjadi keseimbangan pembangunan pendidikan berlandaskan syariah, kesehatan dan ekonomi daerah sehingga terjadi perkembangan; (a) sentra perkebunan Kakao (agribisnis dan agro industri), (b)

sentra perikanan laut, (c) kawasan perdagangan, (d) kawasan pariwisata, dan (f) jasa keuangan di Kabupaten Padang Pariaman.

3.5 Prediksi Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah

a. Pembangunan Infrastruktur

1. Infrastruktur yang berkaitan dengan Kabupaten Padang Pariaman dalam skala wilayah meliputi; (a) infrastruktur perhubungan dan fasilitas pendukungnya yang terdiri dari jalan negara yang menghubungkan Padang - Bukittinggi melalui Kecamatan Lubuk Alung, jaringan jalan provinsi yang menghubungkan kota Padang ke Kabupaten Agam dan beberapa kota kecamatan dalam wilayah Padang Pariaman, (b) Angkutan udara Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di wilayah kabupaten Padang Pariaman yang sangat memberi arti penting sebagai pendorong pertumbuhan di sekitar kawasan.
2. Prediksi infrastruktur transportasi berupa panjang jalan untuk tahun 2010-2025 perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Hal tersebut sangat terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan pengguna jalan dan perkembangan jumlah penduduk, pemukiman dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman. Sehubungan dengan itu, kuantitas dan kualitas panjang jalan perlu ditingkatkan.
3. Pertumbuhan panjang jalan pada tahun 2010-2015 rata-rata adalah 5,01 persen, meningkat pada periode tahun 2015-2020 menjadi 5,5 persen, dan akhirnya pada tahun 2020-2025 meningkat panjang jalan sebesar 6,25 persen. Peningkatan pertumbuhan panjang jalan sejalan dengan perkembangan panjang jalan di kabupaten Padang Pariaman dan perkembangan Panjang jalan sejalan pula dengan perkembangan investasi pemerintah di bidang infrastruktur. Panjang jalan pada tahun 2010-2015 menjadi 1.376,76 Km meningkat pada tahun 2015-2020 menjadi 1.452,48 Km, dan pada tahun 2020-2025 panjang jalan di Kabupaten Padang Pariaman menjadi 1.543,26 Km.
4. Perkembangan panjang jalan diiringi pula oleh perkembangan jenis permukaan jalan, dimana pada tahun 2010-2015 jalan aspal sepanjang 617,07 Km, jalan tanah sepanjang 355,72 Km, jalan batu sepanjang 1,67 Km, jalan kerikil sepanjang 395,74 Km dan jalan beton 6,56 Km. Kondisi permukaan jalan ini terus mengalami perkembangan, karena Kabupaten Padang Pariaman bersebelahan dengan Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga

pada tahun 2025 perkembangan permukaan jalan aspal menjadi 694,47 Km, jalan tanah menjadi sepanjang 400,33 Km, jalan batu menjadi sepanjang 1,88 Km, jalan kerikil menjadi sepanjang 445,38 Km dan jalan beton 6,56 Km.

5. Prediksi perkembangan panjang jalan dan jenis permukaan jalan ini dilakukan berdasarkan asumsi peningkatan kualitas jalan merupakan program jangka panjang pemerintah daerah akibat dari frekuensi penggunaan jalan yang semakin meningkat pula. Selain itu, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah evakuasi antisipasi bencana alam seperti banjir dan tsunami. Sehubungan dengan itu, peningkatan kualitas jalan menjadi program utama pemerintah daerah yaitu pembangunan infrastruktur jalan sebagai aspek pendukung perkembangan pembangunan terpadu untuk masa yang akan datang di Kabupaten Padang Pariaman.
6. Selain perkembangan jalan dan jenis permukaan jalan, Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki system angkutan kereta api, akan tetapi saat ini masih belum aktif digunakan sebagai moda angkutan penumpang dan hanya dipakai sebagai angkutan wisata alam dari kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan masa yang akan datang diharapkan dapat aktif kembali sebagai sarana angkutan penumpang di Sumatera Barat termasuk di Kabupaten Padang Pariaman, tentu dengan transportasi kereta api yang lebih baik dari masa sebelumnya.
7. Prasarana transportasi udara yaitu Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) yang berlokasi di daerah Kabupaten Padang Pariaman diprediksi akan mengalami perkembangan yang cukup pesat untuk 20 tahun yang akan datang. Sehubungan dengan itu, baik penerbangan domestic maupun penerbangan internasional akan mengalami lonjakan aktivitasnya. Untuk itu tuntutan terhadap perpanjangan landasan BIM dan fasilitas pesawat berbadan lebar menjadi suatu perhatian dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman.
8. Pembangunan infrastruktur air bersih, baik penyediaan jaringan maupun air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang, karena hal itu sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pemukiman baru. Sehubungan dengan itu, peningkatan terhadap kebutuhan air bersih dan diperkirakan 95 persen air bersih perlu disediakan oleh PDAM untuk rumah tangga. Kebutuhan ini didasarkan kepada kapabilitas produksi air PDAM sebanyak 10 liter/detik dengan distribusi dari Kabupaten sebanyak 8,5 liter/detik dan tercapai hanya 7,5 liter/detik. Walaupun kondisi ini masih kurang, namun secara fisik kondisinya masih baik dan frekuensi mengalir air bersih non-stop dalam arti tidak pernah mati. Jadi, distribusi air masih perlu ditingkatkan untuk masa yang akan datang.

9. Sementara dari sisi pelayanan, PDAM Kabupaten Padang Pariaman baru dapat menjangkau 40 persen masyarakat dengan mayoritas adalah rumah tangga. Jadi, prediksi pelayanan 20 tahun ke depan diharapkan akan dapat mencapai 95 persen. Dengan demikian, kondisi pipa distribusi untuk masa depan perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik secara kuantitas dan kualitas agar target 95 persen tersebut dapat diwujudkan.
10. Hal yang sama juga terjadi di sub-sektor listrik, permintaan listrik Nagari diprediksi akan terus meningkat, hal ini sejalan dengan perkembangan aktivitas ekonomi di Nagari. Sejalan dengan itu, program listrik masuk desa untuk masa yang akan datang masih dibutuhkan dan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di tingkat nagari.
11. Pembangunan sarana dan prasarana drainase juga akan meningkat untuk masa yang akan datang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan pemukiman. Peningkatan kebutuhan drainase sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap pentingnya keberadaan saluran drainase agar genangan air tidak terjadi di musim hujan, yang saat ini masih menjadi persoalan di beberapa lokasi di kabupaten Padang Pariaman.
12. Jumlah sampah pada masa yang akan datang di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diprediksi cenderung akan meningkat. Rata-rata timbulan sampah dihasilkan 810 m³/hari, sebahagian besar dihasilkan oleh rumah tangga dan pasar. Sementara ampah yang dapat dikelola oleh pemerintah hanya sebahagian kecil yaitu 12 m³/hari. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan sampah sangat minim yaitu Dam Truk 2 unit dan TPS 20 unit, sedangkan tempat pembuangan akhir (TPA) belum cukup memadai. Sehubungan dengan itu, system penanganan sampah dirasa perlu pula disempurnakan sejalan dengan peningkatan jumlah samapah tersebut.
13. Pola pengumpulan sampah rumah tangga dengan kantong plastik atau karung masih tetap dipertahankan, tetapi verifikasi sampah organik dan non-organik perlu dianjurkan kepada setiap rumah tangga untuk memisahkannya agar sampah organic bisa diolah lebih lanjut menjadi kompos dengan menggunakan teknologi tertentu. Jadi, kebutuhan teknologi pengolah sampah organik dibutuhkan dalam jangka panjang.

b. Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

1. Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 132.879 Ha, yang terdiri dari 17 kecamatan. Luas wilayah tersebut meliputi lahan yang sudah terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun dan lahan tidak terbangun penggunaannya secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 3.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2005 – 2010

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	8,097	6.09
2	Persawahan (lahan basah)	24,091	18.13
3	Tegalan	580	0.44
4	Perkebunan	48,446	36.46
5	Kebun Campuran	18,001	13.55
6	Hutan lindung	20,557	15.47
7	Hutan Suaka alam	6,610	4.97
8	Semak belukar	2,334	1.76
9	Kawasan industri	185	0.14
10	Tanah rusak/ tandus	26	0.02
11	Pertambangan bahan galian C	53	0.04
12	Kolom tambak ikan	53	0.04
13	lain-lain	3,846	2.89
	Total Luas Lahan	132,879	100.00

Sumber: Naskah Akademis Rencana Pemindahan Ibu Kota, 2007.

Penggunaan lahan tidak terbangun untuk masa yang akan datang akan mengalami perubahan sesuai dengan perencanaan tata ruang yang sudah di PERDA-kan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman berupa Rencana Tata Ruang Kecamatan dan RDTRK (IKK) serta Rencana 9 Kawasan Strategis (Embarkasi Haji, Gerbang Ketaping, Kota Mandiri, Makam Syech Burhanuddin, Malibou anai, Pasar Induk, Pasar Lubuk Alung, Terminal Bus, dan CBD).

2. Keberadaan Bandara Internasional Minangkabau sejak tahun 2005 lalu, posisi Kabupaten Padang Pariaman secara keruangan telah ditetapkan sebagai Pintu Gerbang Sumatera Barat, baik untuk kedatangan dari nasional maupun internasional. Posisi ini memberi dampak yang sangat luas bagi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, terutama dalam arus keluar masuk orang, barang, jasa dan modal.

3. Rencana tata ruang lainnya yang memiliki arti penting dan bersifat strategis dalam proses percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:
 - i. Rencana detail tata ruang kawasan Bandara Internasional Minang Kabau
 - ii. (RTBL) Depan Bandara Internasional Minangkabau
 - iii. (RTBL) Fly Over Duku
 - iv. Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Gasan
 - v. Rencana Tata Ruang Tapian Puti
 - vi. Rencana Tata Ruang Bukit Bulek
 - vii. Rencana Tata Ruang Jalan Lingkar Lubuk Alung.
4. Tuntutan terhadap pemindahan lokasi ibu kota Kabupaten Padang Pariaman, ke kawasan Kecamatan VI Lingkung sebagai calon ibukota Kabupaten Padang Pariaman. Konsekwensi dari pemindahan lokasi kabupaten tersebut mengharuskan adanya sinkronisasi dengan rencana tata ruang yang lebih tinggi seperti RTRW Nasional dan RTRW Propinsi Sumatera Barat dan kebutuhan Kabupaten Padang Pariaman untuk masa yang akan datang. Di samping akan pengembangan infrastruktur pemerintahan kabupaten, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pendidikan, pusat pelayanan kesehatan regional, pusat pengembangan pemukiman, pusat pengembangan perdagangan dan jasa regional, terminal bus regional, potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, pengembangan pertambangan dan pengembangan wisata.
5. Rencana pengembangan sektoral dalam bentuk penetapan "**Kawasan Agropolitan**" pengembangan ternak besar dengan komoditi utama ternak sapi. Program ini menuntut konsep pengembangan sentra agrobisnis terpadu dengan pusat kawasan (beberapa kecamatan) sebagai penyangga. Selanjutnya pengembangan 9 (sembilan) kawasan Strategis Kabupaten Padang pariaman pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, wacana pemindahan ibu kota kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa alternatif kecamatan yaitu; (1) VII Koto, (2) Lubuk Alung, (3) Batang Anai, (4) 2 x 11 VI Lingkung, (5) Nan Sabaris, (6) Sintuk Toboh Gadang, (7) VI Lingkung, (8) V Koto Timur, (9) Sungai Limau.
6. Kecenderungan dan arah perkembangan struktur ruang Kabupaten Padang Pariaman perlu difokuskan kepada struktur ruang yang dibentuk berdasarkan besaran jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi serta kelengkapan fasilitas pendukung. Jadi, perkembangan struktur Kabupaten Padang Pariaman untuk masa yang akan datang berbasis kebutuhan daerah.

7. Kecenderungan yang terjadi adalah aktivitas pembangunan cenderung trade-off dengan kelestarian lingkungan. Pada saat pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran pembangunan harus dibayar mahal dengan pengorbanan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Sering terjadinya aktivitas pembangunan yang dinikmati oleh segilintir orang harus ditanggung akibatnya oleh masyarakat pada umumnya dalam bentuk biaya sosial (social cost). Oleh karena pembangunan yang dilakukan haruslah mempertahankan kualitas lingkungan sesuai dengan konsep *Green Development dan Green Economy*.

BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

encana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025 mendatang. Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah ini ditetapkan berdasarkan cita-cita, aspirasi dan keinginan masyarakat kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan dengan memperhatikan juga prediksi kondisi umum daerah untuk masa 20 tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah ini dibuat dengan mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2006-2010 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2006.

4.1. VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan kondisi Objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada 20 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 20 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Padang Pariaman.

a. VISI :

"Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas"

b. Makna Visi

1. Unggul, berarti mempunyai kualitas yang tinggi baik dari segi hasil produk pertanian maupun sumberdaya manusia, serta mampu bersaing dengan pihak luar. Dengan pengertian demikian, maka Kabupaten Padang Pariaman ditargetkan menjadi Kabupaten terkemuka dalam bidang produk pertanian, agroindustri dan perdagangan, serta kualitas sumberdaya manusianya. Pada tahun 2025 Kabupaten ini ditargetkan telah mampu menghasilkan produk agroindustri yang berkualitas tinggi dan sumberdaya manusia yang unggul, sehingga mampu bersaing di era global.
2. Agribisnis, merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggerakkan sektor pertanian, mulai dari usaha tani yang kokoh sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi mulai dari hulu sampai hilir. Produk pertanian yang berkualitas (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan) haruslah diolah didalam daerah Kabupaten Padang Pariaman sendiri, dimana sebagai basisnya adalah masyarakat tani yang menghasilkan produk hilir yang berkualitas tinggi, sehingga nilai tambah dari hasil produk pertanian dinikmati oleh Daerah dan masyarakat.
3. Perdagangan, adalah upaya dalam memacu usaha pertanian yang terintegrasi melalui penumbuhan UKM-UKM, dan atau koperasi yang kokoh sebagai sokoguru perekonomian rakyat, serta meningkatkan sentra-sentra pemasaran di tingkat nagari, sehingga mampu memasarkan produk hasil pertanian (mulai dari hulu sampai hilir) yang mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik secara nasional maupun global .
4. Sumberdaya Manusia yang berkualitas, merupakan suatu tekad pemerintah guna mencetak SDM yang berkualitas di Kabupaten Padang Pariaman, melalui program pendidikan gratis 12 tahun, menyediakan guru-guru yang berkualitas, sarana dan prasarana pendidikan yang baik, menumbuh kembangkan lembaga pendidikan yang ada, serta mendorong siswa yang berprestasi tinggi dengan bantuan beasiswa, sehingga SDM Kabupaten Padang Pariaman di era global nanti akan mampu bersaing dengan daerah lain baik secara regional maupun nasional.

4.2 MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain Misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula.

Berdasarkan Visi Daerah tersebut, maka disusun Misi Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sistem Agribisnis dan Agroindustri yang Tangguh berbasis Nagari, didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir
2. Mewujudkan Sistem Perdagangan yang Kuat dan berorientasi Ekspor
3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, dan Berdaya Saing Tinggi
4. Mewujudkan Kehidupan Beragama yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*"
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
6. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai dengan Kaidah-Kaidah Kelestarian Lingkungan

Visi dan Misi di atas dijadikan sebagai landasan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman sampai Tahun 2025.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman merupakan pedoman bagi setiap elemen masyarakat yang terkait dengan pembangunan jangka panjang dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bahagian substansi dari RPJPD Kabupaten Padang Pariaman. Arah pembangunan jangka panjang merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh setiap misi pembangunan daerah, sedangkan pentahapan merupakan skala prioritas atas penekanan utama pembangunan sehingga pada akhir pentahapan, visi pembangunan jangka panjang akan dapat diwujudkan di Kabupaten Padang Pariaman.

5.1 Arah Pembangunan Daerah

“ Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”

Visi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 – 2025 adalah menjadikan Kabupaten unggul dibidang agroindustri dan perdagangan berdasarkan sumberdaya manusia yang berkualitas di tahun 2025. Untuk mewujudkan harapan ini, maka arah Pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman untuk masa 20 tahun ke depan, yang ditetapkan berlandaskan visi dan misi jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ke depan, pada dasarnya memilih arah pembangunan yang sedemikian rupa untuk menemukenali berbagai persoalan dan fakta yang jelas, selanjutnya merumuskan alternatif pemecahan dan prioritas pembangunan, memilih kegiatan yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Kekuatan yang dimiliki secara internal dapat dijadikan sebagai modal dasar baik yang ada secara alamiah maupun yang direkayasa selama proses pembangunan dilaksanakan. Kelemahan secara internal perlu ditemukenali dan diperbaiki sesegeranya agar kelemahan tersebut dapat ditutupi dengan serangkaian pemecahan masalah yang dihadapi. Sementara kekuatan yang dimiliki secara eksternal dapat mendorong proses pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Demikian pula dengan ancaman yang terjadi yang berasal dari faktor eksternal perlu dipahami, kemudian dicarikan cara menghadapi ancaman tersebut. Sehingga dalam jangka panjang kesadaran akan

pentingnya kemajuan yang ingin dicapai berikut segala perubahan yang akan terjadi perlu dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat di daerah.

Memperhatikan kondisi umum daerah, faktor lingkungan strategis serta visi dan misi jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana, maka arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman untuk jangka waktu 2005-2025 mendatang, ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sistem Agribisnis dan Agroindustri yang Tangguh Berbasis Nagari, didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir

(a) Mewujudkan perekonomian wilayah yang kokoh melalui system agrobisnis berbasis nagari

Mengingat Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah pertanian yang memiliki lahan yang luas dengan kegiatan perkebunan yang sangat menonjol maka kedepannya kegiatan pembangunan perlu diarahkan pengembangan kegiatan agribisnis, yaitu dengan meningkatkan system pertanian yang tangguh dengan menggunakan teknik pertanian yang handal dan menggunakan benih yang unggul. Arah pembangunan ini perlu dilakukan agar terdapat sinergi dan saling mendukung dengan kegiatan pertanian secara luas yang sudah ada. Disamping itu, dengan melangkah kepada kegiatan agroindustri dan agribisnis, maka nilai tambah yang dapat dihasilkan akan menjadi lebih besar dan hal ini sangat penting artinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman juga akan diupayakan melalui pengembangan dari sektor pertanian menuju sector industri berbasis komoditas pertanian (agroindustri) di masing-masing nagari, *one village one product*. Dengan demikian meningkatkan lembaga-lembaga ekonomi pertanian merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.

Disamping itu, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu pula diarahkan pada pengembangan koperasi, dan usaha kecil dan menengah (UKM). Arah pembangunan ini juga cukup strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi rakyat, pemberdayaan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan dikalangan masyarakat.

Untuk kesemuanya ini, upaya untuk mendorong investasi swasta masuk ke Padang Pariaman merupakan upaya yang sangat penting artinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan penyediaan lapangan kerja. Dalam rangka ini perlu diciptakan iklim usaha yang

baik dan kondusif untuk mendorong peningkatan investasi yang akan berdampak secara langsung bagi penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan pekerja dan keuntungan pengusaha.

(b) Mewujudkan agroindustri yang tangguh yang didukung oleh teknologi dan informasi mutakhir

Sejak krisis ekonomi berlangsung, telah terbukti bahwa strategi pengembangan secara nasional yang hanya mengandalkan industri manufaktur saja ternyata sangat rapuh. Sebaliknya sektor industri pertanian (agroindustri) menunjukkan daya tahannya dalam menghadapi gelombang krisis, dengan demikian kebutuhan pengembangan agroindustri yang banyak menggunakan bahan baku lokal dan berbasis pada pertanian semakin mendesak untuk dilaksanakan.

Globalisasi ekonomi maupun informasi telah mendorong proses tumbuh kembangnya agroindustri yang penuh dengan muatan teknologi dan kapital dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar. Agroindustri seperti halnya industri manufaktur, mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan komponen penyusunannya, sehingga pendekatan komprehensif merupakan prasyarat dalam penelusuran solusi permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bidang keilmuan yang mendukung terbangunnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan kemahiran dalam ketrampilan berindustri (*industrial skill*) sangat diutamakan, sehingga mampu tumbuh dan berkembang atas keahlian dan ketrampilannya sendiri. Aplikasi rekayasa dan lingkungan industri, manajemen sistem industri dan produksi, pengendalian mutu terpadu dan manajemen pemasaran perlu diterapkan, agar mampu mendorong maju pesatnya agroindustri yang kompatibel dengan teknologi yang maju.

Dinamika sistem agroindustri berupaya untuk menerapkan teknologi pengelolaan dan pengolahan hasil naik agroindustri berskala kecil, menengah dan besar. Sedangkan sifat khusus produk pertanian yang tidak dimiliki oleh industri lain pada umumnya memerlukan penanganan khusus. Oleh sebab itu konsep pengembangan agroindustri tidak hanya terletak pada keunggulan kompetitif, tetapi juga harus mengarah kepada kerangka pembangunan yang mempunyai daya tahan agroindustri yang tangguh dan berkelanjutan.

(c) Mewujudkan Pariaman sebagai Daerah Tujuan Wisata

Upaya untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah wisata pantai difokuskan kepada pembenahan dan persiapan pelayanan untuk wisatawan yang datang.

Kabupaten Padang Pariaman, sejak dahulu kalanya sudah dikenal sebagai salah satu wilayah yang sangat digemari masyarakat sebagai daerah tujuan wisata. Daerah ini mempunyai kekayaan alam yang sangat besar juga memiliki keindahan alam yang mengagumkan, antara lain berupa ; 1) obyek wisata ; wisata pantai, alam, sejarah, minat khusus, dan budaya, 2) event – event daerah, berupa ; kesenian tradisional, permainan anak nagari, festival nasyid, buru babi, basyafa (wisata religi), 3) wisata unggulan, antara lain; industry, bordir, design, market, kemitraan, serta 4) ekotourisme, berupa hutan, daerah konservasi, industry kecil, dll.

Guna meningkatkan pariwisata di daerah ini maka beberapa hal yang perlu disiapkan dan disempurnakan, antara lain; menata dan meningkatkan pengelolaan pariwisata daerah. Kebijakan ini diarahkan kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan kepariwisataan daerah. Selanjutnya kebijakan ini juga diarahkan kepada pengembangan kawasan dan objek pariwisata sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula dibangun dan ditingkatkan kualitas prasarana perhubungan menuju objek-objek wisata, kemudian sarana wisata berupa transportasi, penginapan, WC yang memadai. Guna menyiapkan tenaga penunjang pariwisata untuk tingkat madia maka perlu dibangun sekolah kejuruan pariwisata. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan secara terpadu pada para wisatawan, perlu pula didirikan dan dikembangkan *Pusat Informasi dan Pelayanan Wisata* yang dilengkapi dengan peralatan teknologi informasi yang memadai.

Yang tak kalah pentingnya adalah berupa penyiapan event-event guna penunjang pariwisata itu sendiri, terutama yang spesifik kedaerahan Pariaman, sehingga daerah ini merupakan daerah tujuan utama di SumateraBarat. Tentunya kegiatan promosi, baik dalam maupun luar negeri perlu terus dilakukan secara teratur dengan pola dan kualitas yang lebih baik. Disamping itu, perlu pula diupayakan terus peningkatan peran dan partisipasi serta kontribusi masyarakat khususnya para pelaku pariwisata, sehingga terwujud tanggung jawab bersama dalam pengembangan pariwisata. Sumatera Barat yang mempunyai filosofi kehidupan "***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***" (ABS SBK), meletakkan kebijakan pengembangan produk dan

objek wisata dengan menonjolkan ciri-ciri khas masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

2. Mewujudkan Sistem Perdagangan yang Kuat dan berorientasi Ekspor

(a) Mewujudkan jiwa entrepreneurship

Kabupaten Padang Pariaman memiliki kekayaan hasil bumi yang sangat besar, terutama hasil pertanian. Hasil bumi ini jika dikelola dengan baik akan mampu membawa masyarakat Kabupaten menjadi sejahtera, jika pelaku-pelaku ekonominya mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Kesuksesan berwirausaha harus dimulai dengan kemauan yang keras, diiringi dengan kerja keras serta keyakinan yang tinggi untuk berhasil. Untuk menunjang itu perlu didirikan sekolah-sekolah bisnis mulai dari tingkat SLTA sampai perguruan tinggi. Demikian juga perlu dibentuk lembaga bisnis yang mampu mengakomodir dan melatih calon-calon wirausahawan.

Kedepannya setiap aktifitas masyarakat mampu melakukan aktifitas usaha sesuai potensi alam Kabupaten Padang Pariaman, serta mampu melakukan bargaining dengan pihak luar (dalam negeri maupun asing), dimulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir, sehingga setiap produk yang dihasilkan dari Kabupaten ini mempunyai nilai tambah yang bisa dinikmati oleh daerah dan masyarakat.

Pengembangan agribisnis harus melibatkan berbagai pihak (BUMN, swasta dan koperasi) dengan profesi sebagai penghasil produk primer, pengolah, pedagang, distributor, importer, eksportir dll.

(b) Penataan system perdagangan yang tangguh

Dengan peningkatan system agrobisnis dan agroindustri, diprediksi akan terjadi peningkatan hasil produk yang tinggi. Penataan system pendistribusian hasil merupakan konsep yang perlu dipersiapkan sejak dini. Tataniaga hasil pertanian yang tangguh merupakan target yang harus dicapai.

Untuk mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh harus dimulai dari penataan seluruh aspek produksi sampai ke pasar, dimulai dari ketersediaan kelembagaan perdagangan yang dinamis dan kokoh, aparat yang professional, dukungan lembaga keuangan yang baik, serta system transportasi yang baik.

Sistem keuangan yang baik yang mengacu kepada system perbankan yang modern sudah menjadi tuntutan perekonomian modern. Dengan demikian hadirnya lembaga keuangan sampai ke nagari merupakan program yang diprioritaskan. Lembaga keuangan tidak hanya dapat mendukung system perdagangan, tetapi juga akan memacu roda ekonomi masyarakat nagari. Lemabga keuangan yang diharapkan adalah system keuangan Syariah

(c) Perdagangan hasil produk agribisnis dan agroindustri baik nasional maupun ekspor

Dengan meningkatnya produk hasil pertanian melalui pengembangan system agribisnis dan agroindustri, maka diperlukan sistim pemasaran hasil / perdagangan yang tangguh, sehingga mampu diserap oleh pasar dengan harga yang layak di pasaran.

Kedepannya produk hasil daerah ini baik berupa produk pertanian, hasil industry maupun lainnya akan mampu dipasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembukaan jaringan pasar langsung yang didukung dengan hadirnya Bandara Minangkabau, akan mempercepat akses hasil produk dari daerah ini sampai ke pasar (domestic/luar negeri) dengan harga yang lebih baik.

Dengan membuka tempat-tempat promosi produk wilayah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kemudian ditunjang melalui internet (*webb site*), maka akan mempercepat penyebaran informasi hasil produk agrobisnis dan agroindustri di masyarakat. Dengan senantiasa memacu kualitas produk, akan juga mendorong daya saing suatu produk maupun wilayah.

3. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi.

(a) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Melalui Pendidikan yang dilandasi Akhlak Mulia

Upaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas sangat diperlukan untuk dapat menciptakan warga masyarakat yang terdidik, produktif, profesional, dan bermoral tinggi serta dilandasi dengan Aqidah yang mantap. Peningkatan kualitas dilakukan dengan memfokuskan kepada penguasaan bidang dasar ilmu secara lengkap inteligensia, emosional, dan spritual. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan dan kesejahteraan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini dapat dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan disemua jenjang dan tingkatan. Disamping itu, pembangunan dibidang agama dan kebudayaan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, juga merupakan persyaratan penting untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilakukan melalui penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, melengkapi alat-alat labor dan media pendidikan, membangun perpustakaan dan melengkapi buku-buku, melaksanakan pemagangan peserta didik di dunia industri dan lembaga terkait, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru minimal S-1. Di samping itu, juga melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara efektif pada setiap tingkat lembaga pendidikan, meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pendidik dan peserta didik serta personil sekolah, memberikan pembelajaran perbaikan bagi peserta didik yang lambat dan pengayaan bagi peserta didik yang cepat mengikuti pelajaran.

(b) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Melalui Peningkatan Derajat dan Pelayanan Kesehatan

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan berkualitas terutama bagi keluarga miskin, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta melakukan pengawasan obat dan makanan. Peningkatan pemerataan pembangunan kesehatan dimaksudkan dalam rangka meniadakan ketimpangan antar daerah dan antar kelompok penduduk miskin yang dilakukan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan. Sementara itu, meningkatkan kualitas kesehatan penduduk dilakukan melalui perbaikan perilaku hidup sehat, peningkatan kualitas gizi masyarakat terutama bagi balita, remaja, ibu hamil, kesehatan reproduksi remaja serta pemahaman hak-hak dan kesehatan reproduksi remaja.

(c) Mewujudkan Kemampuan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni

Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) sudah semakin maju dan berkembang seiring dengan ditemukannya metode-metode produksi yang lebih mudah. Kemajuan IPTEKS tersebut hendaklah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui upaya pengembangan teknologi tepat guna yang

difokuskan pada peningkatan nilai tambah produksi barang dan jasa. IPTEKS yang maju akan menghasilkan daya kompetisi masyarakat. Teknologi rekayasa genetic dapat menghasilkan banyak ternak, menghasilkan banyak bibit tanaman yang berkualitas. Demikian juga dalam proses produksi pengolahannya. Dari memakai teknologi sederhana kepada pemakaian teknologi yang mampu dijangkau oleh kemampuan masyarakat. Penggunaan IPTEKS seharusnya dapat menghasilkan produktivitas yang melebihi dari sebelum iptek diterapkan. Akses masyarakat terhadap informasi, peranan dari motivator dan diseminasi iptek yang baik sangat diperlukan.

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangatlah cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menopang kerja dan produktivitas usaha. Namun demikian dengan kehadiran IPTEKS, diharuskan pula agar terhindar dari yang sifatnya boros untuk kepentingan yang bukan produktif. Pemakaian computer misalnya, seharusnya dapat membantu mempercepat pelayanan dan pengolahan data. Jika computer digunakan, namun data tidak tersedia, maka pemakaian komputer menjadi tidak bermakna. Demikian pula dengan kehadiran telepon genggam selular, seharusnya dapat mempercepat proses produksi layanan barang dan jasa.

Kebijakan pengembangan IPTEKS diarahkan untuk meningkatkan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan pembangunan daerah sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini diwujudkan melalui (1) Mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di daerah guna menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi pembangunan daerah setempat, (2) Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upaya-upaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, (3) Meningkatkan pemanfaatan lembaga lembaga penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil penelitian dan (4) mengembangkan budaya IPTEKS di kalangan masyarakat.

4. Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas berlandaskan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*"

(a) Mewujudkan Tata Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas

Untuk dapat mewujudkan kehidupan beragama yang baik dan berkualitas, kegiatan pembangunan diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syariat Islam dan peningkatan *Iman dan Taqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat penting artinya agar kehidupan masyarakat di

Kabupaten Padang Pariaman sehari-hari betul-betul mengikuti nilai-nilai Islami dan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Alqur'an dan Hadist.

Sejalan dengan hal tersebut, peran alim ulama, ninik mamak, bundo kanduang dan cerdik pandai perlu pula terus dikembangkan dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Bersamaan dengan upaya tersebut, penyediaan prasarana dan sarana peribadatan perlu pula terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya serta disebar luaskan keseluruh pelosok kota dengan memanfaatkan bantuan pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.

(b) Terwujudnya Masyarakat Berbudi Luhur dan Berakhlak Mulia serta Memiliki Kepedulian Sosial yang Tinggi

Disamping itu, peningkatan kualitas hidup beragama juga diarahkan untuk memantapkan peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika untuk membina akhlak yang baik dan mulia, memupuk etos kerja yang produktif, khususnya untuk generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk mewujudkan kehidupan agama yang baik dan berkualitas juga diarahkan untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan meningkatkan rasa saling menghargai kepercayaan orang lain dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga akan tercipta suasana kehidupan masyarakat yang aman, serasi dan penuh toleransi serta tenggang rasa.

5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

(a) Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan kearah yang lebih produktif, efisien dan jujur. Kelembagaan tersebut meliputi kelembagaan pemerintahan daerah, kelembagaan DPRD (legislatif daerah), kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan kemampuan kelembagaan daerah ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan teknis, perbaikan moral dan etos kerja aparatur pemerintahan, anggota DPRD serta peningkatan partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kerjasama antar daerah.

Peningkatan kemampuan kelembagaan Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan tata pemerintahan yang benar-benar bersih dan berwibawa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan sosial

masyarakat dapat kembali dikembangkan dan kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan terarah akan dapat pula diwujudkan.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:(1) meningkatkan kemampuan kelembagaan birokrasi dan administrasi publik melalui penyempurnakan *Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)*, (2) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah agar memiliki kemampuan dan kompetensi tertentu yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, (3) meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karir berdasarkan prestasi, (4) meningkatkan penegakan sistem dan budaya birokrasi yang profesional sebagai pelayan publik dengan mengembangkan etika dan moral aparaturnya melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan melekat, dan (5) meningkatkan demokratisasi pemerintahan dan partisipasi masyarakat.

Untuk jangka panjang *good corporate governance* sudah tidak bisa ditawarkan lagi. Bupati sudah memperlihatkan hal itu secara profesional, dan dirintis oleh Bupati sebelumnya. Prinsip keterbukaan, dapat dipertanggung jawabkan dan didasari atas partisipasi masyarakat akan diketahui secara bersama sama beban dalam membangun kota. Cara seperti itu juga sudah harus dirintis untuk seluruh dinas dan instansi. Sehingga prinsip khalifah, dalam melayani masyarakat lebih menonjol, dan hal ini perlu dipetakan satu per satu menurut bidang dan sektor.

(b) Mewujudkan Kerjasama yang Baik Antar Pelaku Pembangunan

Pelaksanaan Musrenbang saat ini sebagian merupakan bagian dari proses demokrasi. Semua komponen masyarakat diajak untuk mengungkapkan dan berembuk bersama, ketika rasa kebersamaan akan tumbuh, maka niscaya setiap langkah kerja yang dibuat mendapatkan komitmen dalam implementasinya. Musrenbang saat ini dilanjutkan dengan musrenbang untuk pembangunan sektoral. Ini melibatkan dinas teknis pelaksana yang dibagi menjadi beberapa bidang kerja.

Dengan terbangun kerjasama antar komponen masyarakat dan pemerintah , masalah pembangunan tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah tetapi lebih jauh lagi menjadi beban dan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah akan lebih berperan sebagai fasilitator dalam terbangunnya sinergi antar komponen masyarakat tersebut.

Konsensus bersama adalah menjadi cita-cita kerja dalam prinsip demokratis ini. Ketika proses ini kita kembangkan maka akan terwujudlah transparansi. Dan ketika itu rakyat akan merasa pentingnya kehadiran pemerintah, dan kemudian akan terjadi kepatuhan akan penegakan peraturan daerah dari berbagai dimensi. Transparansi yang hakiki adalah segala-galanya dapat diketahui oleh publik, dan yang lebih penting adalah diketahui bahwa Allah lebih mengetahui isi hati dan maksud kita sebenarnya.

(c) Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik

Memberikan pelayanan yang prima merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang baik. Dengan terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, adanya kepastian serta tidak berbelit-belit akan menghasilkan sebuah pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Masalah utama dalam birokrasi saat ini adalah budaya kinerja birokrasi yang belum berorientasi pada efisiensi dan produktifitas. Untuk itu perlu peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan dengan penyediaan dan pemeliharaan data base, penyediaan lembaga pelayanan dan standar pelayanan minimal dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang sudah harus terbangun sistem pelayanan prima yang handal.

6. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan sesuai dengan Kaidah-Kaidah Kelestarian Lingkungan

(a) Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Kabupaten Padang Pariaman perlu mengupayakan proses pembangunan dengan mempertahankan kualitas lingkungan sesuai dengan konsep *Green Development*, memanfaatkan hutan untuk kepentingan banyak pihak, melalui kombinasi antara produksi *agro-forestry* dengan keberlanjutan hutan sebagai paru-paru dunia. Upaya untuk moratorium hutan perlu diwujudkan tanpa menghalangi proses pembangunan ekstraksi pertambangan. Moratorium hutan akan memosisikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah yang ikut mengeluarkan deklarasi pembangunan ramah lingkungan. Bilamana hal ini dapat diwujudkan akan terjadi pengakuan dari proses pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman oleh pihak internasional dan hal ini akan memberikan dampak politis yang cukup positif dalam proses pembangunan dalam jangka panjang.

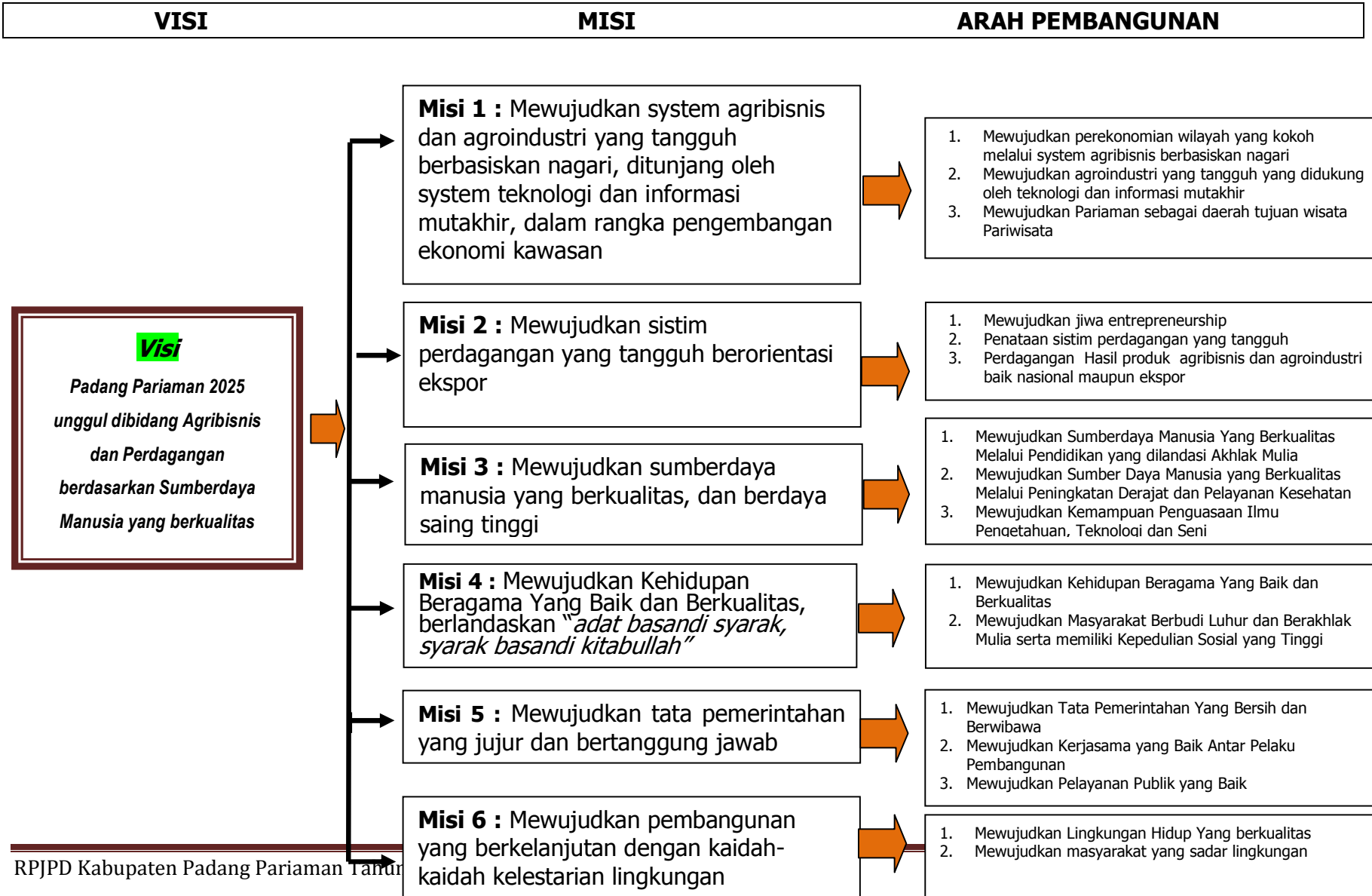
Beberapa kegiatan pembangunan yang terkait dengan ramah lingkungan adalah dengan mengoptimalkan proses penghijauan, mengaplikasikan sinergitas antara konsep agribusiness dengan agroforestry; khususnya untuk beberapa kegiatan peternakan yang relevan untuk daerah perhutanan, seperti lebah madu, peternakan besar, termasuk hutan tanaman industri, penyadaran

kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan dapat dipertahankan sebagai daerah paru paru dunia, maka kawasan Lembah Anai dapat menawarkan daerahnya sebagai pusat penelitian yang terkait dengan kebiologian, kehutanan, climatology dan ilmu kebumian. Ini akan berdampak terhadap arus masuknya investasi dibidang riset dan teknologi.

(b) Mewujudkan Masyarakat yang sadar akan lingkungan.

Dalam setiap aktifitas pembangunan masyarakat harus memiliki kesadaran untuk etap menjaga lingkungan agar pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat tidak hanya hari ini tetapi untuk masa-masa yang akan datang.

Gambar 5.1 Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025



4.1 Pentahapan Pembangunan Daerah

Visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025 akan dapat diwujudkan secara bertahap, jelas dan terpadu. Untuk itu diperlukan pentahapan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas untuk setiap periode pentahapan (setiap 5 tahunan). Tahapan Pembangunan akan menjelaskan sasaran dan capaian yang diharapkan agar dapat diwujudkan disetiap tahapan pembangunan. Sehubungan dengan itu, apa-apa yang menjadi skala prioritas akan berbeda-beda dan sekaligus nantinya akan ditindak lanjuti dalam strategi dan aksi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

1. Periode Lima Tahun Pertama (2005-2010)

Pada periode pertama ini kegiatan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diarahkan kepada pembangunan prasarana dan sarana perhubungan, terutama perhubungan darat, penyediaan listrik, air minum untuk kebutuhan masyarakat banyak, termasuk pembangunan sarana peribadatan guna peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Selanjutnya sebagai kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dalam bidang pendidikan yaitu melalui peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun pendidikan agama (sekolah, guru, buku-buku dan peralatan laboratorium). Sekolah kejuruan sudah mulai dibangun dan sebagai persiapan *bording school*. Dalam bidang kesehatan melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (pembangunan RSUD, puskesmas, dokter dan para medis). Kemudian dalam bidang sosial adalah mengurangi penduduk miskin, mengurangi pengangguran.

Dalam bidang pengembangan ekonomi daerah, diarahkan kepada ekonomi kerakyatan yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil dan menengah. Sejalan dengan visi daerah ini maka sektor agribisnis akan menjadi prioritas dasar, yaitu dengan membangun berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan menuju agroindustri kakao (sebagai andalan daerah). Untuk itu membuka peluang sebesar-besarnya investasi dari luar dalam bidang kakao, sangat diperlukan, kehadiran Bandara Internasional Minangkabau merupakan modal dasar sebagai pintu gerbang masuknya investasi.

Mulai periode pertama ini harus sudah dimulai mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Hal ini penting artinya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan secara optimal.

2. Periode Lima Tahun Kedua (2011-2015)

Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai membaik, karena sudah semakin membaiknya prasarana perhubungan, sehingga akses distribusi barang semakin lancar. Sarana listrik dan air bersih sudah terjamin, sehingga industri mulai dari industri kecil sampai industri besar sudah mulai bergairah. Dengan demikian kegiatan pembangunan diarahkan secara lebih intensif kepada ekonomi kerakyatan dengan basis agribisnis. Selanjutnya kerangka dasar mengarah kepada agroindustri sudah mulai diletakkan (industri kakao, dan produk pertanian lainnya).

Upaya-upaya dalam peningkatan pembangunan perhubungan senantiasa ditingkatkan, guna mendukung keberadaan Bandara Internasional Minangkabau. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik di bidang kesehatan maupun pendidikan ditingkatkan secara merata keseluruh kecamatan. Dibidang pendidikan, Pemerintah Daerah sudah menuntaskan pendidikan 12 tahun dengan melengkapi sarana prasarana sekolah (sekolah, buku, guru, labor, dll) baik kuantitas maupun kualitas, sedangkan untuk kesehatan tekanan diberikan kepada pemenuhan dan peningkatan rumah sakit umum daerah, serta merancang rumah sakit khusus andalan daerah (seperti Rumah Sakit Paru-paru), disamping peningkatan kuantitas dan kualitas dokter, medis dan peralatan.

3. Periode Lima Tahun Ketiga (2016-2020)

Tahapan ke III ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Kondisi sarana dan prasarana ekonomi sudah tersedia secara memadai dengan kualitas yang baik. Demikian juga dengan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik dan merata keseluruh kecamatan. Dengan kualitas pendidikan yang baik, akan terwujud kualitas sumberdaya

manusia yang berkualitas, sehingga tenaga kerja lokal sudah mampu bersaing dengan masuknya tenaga kerja asing. Dalam phase ini pendidikan harus diarahkan untuk mencapai mutu dan standar internasional. Demikian juga kualitas pelayanan kesehatan sudah harus memadai, sehingga dapat disejajarkan dengan nasional. Demikian juga produk hasil pertanian telah mampu bersaing di pasar global.

Kegiatan agribisnis (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) sudah menunjukkan produktivitas yang tinggi. Demikian pembangunan Kabupaten Padang Pariaman pada periode ini diletakkan pada posisi agroindustri. Kegiatan ini sudah mulai menggunakan teknologi produksi yang lebih tinggi, sehingga nilai tambah yang dapat dihasilkan untuk masyarakat menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Menginjak tahun 2020 perekonomian dunia sudah berada pada globalisasi penuh (sesuai kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik), tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang. Dalam situasi demikian persaingan antar pelaku usaha ekonomi didaerah sudah semakin tajam. Karena itu pengembangan kegiatan ekonomi daerah sudah harus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing produk agar pengusaha lokal dapat bermain dalam situasi persaingan yang sudah mengglobal. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) sudah menjadi prioritas pembangunan daerah, terutama dalam kegiatan produksi. Guna mendapatkan kualitas lingkungan yang baik merupakan sebagai basis dalam pembangunan berkelanjutan.

4. Periode Lima Tahun Keempat (2021-2025)

Pada Tahapan ke IV ini Kabupaten Padang Pariaman harus sudah dapat mewujudkan Visi jangka panjang daerah, yaitu "Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas". Upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut diarahkan kepada peningkatan produktifitas, dan efisiensi usaha disemua sektor ekonomi. Struktur perekonomian daerah sudah mencapai tahap industrialisasi dengan tekanan pada agroindustri (kakao). Sektor lain, seperti perdagangan, UKM sudah berkembang dengan pesat, termasuk kegiatan perikanan, peternakan, dan pertanian, industri kecil maupun besar dan lainnya.

Guna mewujudkan agribisnis dan perdagangan, maka andil serta para palaku lokal diberi kesempatan seluas-luasnya, sehingga mampu berkembang sejajar dengan pengusaha dari luar daerah. Terobosan, dengan menjalin hubungan yang lebih intensif dengan dunia luar, dengan menghandalkan kekuatan yang dimiliki, termasuk menjadikan dunia luar menjadi pasar yang sangat strategis. Dengan demikian penyerapan tenaga kerja akan dapat dilakukan seluas-luasnya, sehingga masyarakat golongan miskin pada phase ini sudah pada angka terendah.

Pada phase ini tingkat pendidikan masyarakat sudah baik secara merata antar kecamatan, karena sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia dengan lengkap, demikian juga tingkat kesehatan sudah berada pada tingkat sangat baik. Dengan kondisi demikian, kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai titik tertinggi dan produktif (IPM 79,8)

Penjabaran Pentahapan Pembangunan, disajikan pada Matriks Arah Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, pada Tabel 5.2.

BAB VI

P E N U T U P

Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 – 2025 ini berisikan Pendahuluan, Kondisi Umum Daerah dan Analisis Isu-isu Strategis, Prediksi Pembangunan Daerah, Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah, Arah Kebijakan dan Pentahapan Pembangunan Daerah, dan Penutup. RPJPD ini disusun untuk jangka waktu 20 tahun, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan aspirasi masyarakat yang telah digelar pada acara Lokakarya pada tanggal 12 Oktober 2008 di Pariaman. RPJPD ini juga akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) setiap lima tahunan dan Renstra untuk masing-masing SKPD di tingkat Kabupaten. Selanjutnya RPJPD ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini, serta juga dapat dijadikan bagi calon Kepala Daerah mendatang dalam menyusun Visi, Misi dan Program Kerjanya.

Keberhasilan Pemerintah dalam mewujudkan Visi Daerah, yaitu **“Padang Pariaman 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas”**, sangat tergantung kepada kesungguhan dan kerja keras dari seluruh aparat yang terlibat bersama-sama masyarakat, secara konsisten dan terpadu. Untuk itu diharapkan kepada seluruh SKPD dapat menterjemahkan RPJPD ini dengan baik dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Pariaman, Maret 2010
BUPATI PADANG PARIAMAN

MUSLIM KASIM

Tabel 5.2 Matrik Arah Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 5.2 Matrik Arah Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang	RPJMD Ke-1 (2005-2010)	RPJMD Ke-2 (2011-2015)	RPJMD Ke-3 (2016-2020)	RPJMD Ke-4 (2021-2025)
A.	Mewujudkan Perekonomian Wilayah yang Kokoh melalui System Agrobisnis berbasis Nagari				
1.	a. Meningkatnya nilai tambah usaha pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Berkembangnya sentra-sentra perkebunan Kakao yang terorganisir dan berbasis Nagari	a. Semakin lengkapnya prasarana peribadatan. b. Terlaksananya sosialisasi pencerahan pemahaman agama dan adat yang terpadu bagi para tokoh masyarakat.	a. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana peribadatan. b. Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat yang terpadu bagi para mubalig tokoh agama.	a. Semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan. b. Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat untuk masyarakat.	a. Semakin meningkatnya kualitas sarana dan prasarana peribadatan serta pemeliharaannya yang semakin berkesinambungan. b. Semakin membaiknya pemahaman agama dan adat bagi masyarakat.
2.	Berkembangnya pusat-pusat pendidikan islam.	c. Pembinaan lembaga pendidikan islam berbasis nagari. d. Membina sinergitas kelembagaan pendidikan agama antar nagari.	c. Sosialisasi revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari. d. Menumbuhkan kekuatan kelembagaan	c. Terciptanya revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari. d. Meningkatnya peranan kelembagaan	c. Meningkatkan dan pemantapan revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari. d. Memantapkan sinergitas

			pendidikan agama antar nagari.	pendidikan agama antar nagari.	kelembagaan pendidikan agama antar nagari.
3.	Meningkatnya derajat kesalehan sosial.	<p>e. Memberikan kesadaran kepada umat terhadap kesalehan sosial (seperti; zakat, infak dan sadakah, serta kepedulian sosial lainnya).</p> <p>f. Sosialisasi tata kehidupan yang berbasis syariah.</p>	<p>e. Terbentuknya system pengelolaan kesalehan sosial yang transparan dan akuntabel.</p> <p>f. Menjalankan tata kehidupan yang berbasis syariah.</p>	<p>e. Meningkatkan jumlah dana yang bersumber dari zakat, infak dan sadakah.</p> <p>f. Meningkatnya tata kehidupan yang berbasis syariah.</p>	<p>e. Pemanfaatan sumberdana kesalehan sosial yang tepat sasaran.</p> <p>f. Terciptanya tata kehidupan yang berbasis syariah.</p>
B. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa					
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang berorientasi "Good governance" dan "Clean Government"	<p>a. Terlaksananya pengembangan karir aparatur daerah,</p> <p>b. Pengelolaan pemerintahan sesuai perencanaan</p> <p>c. Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah</p>	<p>a. Meningkatnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD</p> <p>b. Terwujudnya tata-kelola kerjasama antar Kabupaten dan Kota</p> <p>c. Mantapnya system pengembangan</p>	<p>a. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan program SKPD</p> <p>b. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD</p>	Terwujudnya tata pemerintahan yang berorientasi " <i>Good governance</i> "

		sesuai kebijakan nasional	karir aparatur		
--	--	---------------------------	----------------	--	--

2.	Terbangunnya sinergitas antar elemen pelaksana pemerintahan	Terlaksananya keterpaduan program dan kegiatan antara SKPD yang ada	Meningaktnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD	Mantapnya koordinasi pelaksanaan program SKPD	Terbangunnya sinergitas antar elemen pelaksana pemerintahan
3.	Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pembaharuan produk hokum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan b. Terbangunnya kapasiatas kelembagaan hokum, adat dan social daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembnagunan struktur dan kelembagaan hokum daerah b. Pemantapan system pemantauan konsflik social dan kerawanan politik c. Melanjtkan penyuluhan sadar hukum 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan system pemantau kerawanan konflik politik b. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa c. Melaksanakan penyuluhan hokum dan hak azasi manusia 	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis
4.	Mewujudkan aparatur yang kapabel, bersih dan berwibawa.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya perbaikan manajemen kepegawaian (rekrutmen, promosi, mutasi berdasarkan karir) b. Meningkatkan kualitas dan standar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penataan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui system penggajian pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melanjutkan pembenahan manajemen pegawai b. Pendayagunaan aparatur yang makin efisien dan efektif c. Pemantapan kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tertatanya manajemen kepegawaian yang professional b. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggungjawab c. Terlaksananya

		<ul style="list-style-type: none"> c. penyelenggaraan diklat pegawai c. Terlaksannya penataan struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah d. Penataan dan pengelolaan dokumen / arsip daerah 	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyempurnaan SOTK yang efektif, ramping dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan d. Terbnagunnya suatu system data base yang lengkap dan mudah diakses 	<ul style="list-style-type: none"> SOTK dalam setiap lini birokrasi d. Pemanfaatan system database untuk internal dan eksternal birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> suatu system birokrasi yang berorientasi prestasi dan non-paternalistik d. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian
5.	Penanggulangan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan strategi penanggulangan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan / pengadaan berbagai fasilitas penanggulangan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi berbagai fasilitas penanggulangan bencana alam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya sistem penanggulangan bencana alam yang efektif dan efisien
C.	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas				
1.	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh sekolah terakreditasi b. Tersedianya labor ilmu dasar, dan jumlah guru c. Terlaksananya program wajib blajar 12 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya manajemen sekolah dan eksternal b. Tercapainya target MDG's dalam hal pemerataan SMP 99% c. Pemantapan kurikulum sekolah berstandar nasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional b. Meratifikasi sekolah-sekolah kejuruan berstandar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pendidikan berakreditasi internasional b. Terwujudnya SMA dan SMP berstandar nasional

2.	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar b. Persiapan rumah sakit daerah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penuntasan penyakit utama b. Peningkatan peran rumah sakit daerah dan puskesmas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbebasnya Padang Pariaman dari penyakit utama b. Terkreditasinya rumah sakit daerah berstandar nasional 	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik
D. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni					
1.	Meningkatnya penguasaan IPTEKS yang berdaya guna dan tepat guna.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan produk-produk baru dan perkembangan kebutuhan rakyat b. Pendirian lembaga dan system pengembangan teknologi dan inovasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memilih dan mendisain teknologi tepat guna untuk mendorong pembangunan b. Membangun sains park untuk pengembangan IPTEKS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan dan mempatenkan teknologi tepat guna untuk pembangunan daerah b. Peningkatan manajemen Sains Park 	Terwujudnya kemampuan IPTEK yang tinggi dan tepat guna.
E.					
1.	Terlaksananya usaha pertanian modern dan agrobisnis maju	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman pola usaha pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Pembinaan sentra-sentra perkebunan Kakao 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya usaha pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Terbentuknya kelembagaan sentra-sentra perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya produksi pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Terciptanya kekuatan 	

			Kakao yang terorganisir dan berbasis Nagari	kelembagaan sentra perkebunan Kakao sebagai pusat pertumbuhan di Nagari	
2.	Pemanfaatan potensi subsektor perikanan laut dan subsektor perkebunan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	a. Terbangunnya sarana dan prasarana penangkauan, pendaratan. b. Terbangunnya jejaring bisnis komoditi perkebunan.	a. Terbangunnya kelembagaan perikanan laut. b. Meningkatnya transaksi bisnis komoditi perkebunan yang menguntungkan.	a. Meningkatnya produksi perikanan laut. b. Semakin mantapnya subsektor perkebunan sebagai potensi ekonomi.	a. Meningkatnya produksi dan kualitas perikanan laut serta diversifikasi produk perikanan laut. b. Terpeliharanya kesinambungan eksisten potensi subsektor perkebunan.
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah	a. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang efisien	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai kebutuhan	a. Melengkapi Sarana dan Prasarana Wilayah	a. Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang modern
F.	Mewujudkan Agroindustri yang Tangguh didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir				
1.	Mewujudkan agroindustri yang tangguh	Penataan agroindustri berbasis komoditas	Perumusan manajemen agroindustri yang tangguh	Peningkatan agroindustri yang tangguh, berbasiskan teknologi informasi	Terwujudnya agroindustri yang tangguh

G. Mewujudkan Padang Pariaman sebagai Daerah Tujuan Pariwisata					
1.	Terciptanya Padang Pariaman tujuan wisata yang islami	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi masyarakat yang sadar wisata melalui penyuluhan yang islami b. Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pemugaran dan pengembangan objek wisata b. Terbangunnya pusat informasi wisata dilengkapi dengan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatnya kualitas objek wisata dan kesadaran masyarakat terhadap wisata d. Meningkatnya kualitas sarana & prasarana objek wisata dan mutu pemandu wisata 	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai Daerah Tujuan Wisata yang islami
H. Penataan Sistem Perdagangan yang Tangguh					
1.	Terciptanya perdagangan yang berbasis nagari	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya kelembagaan perdagangan yang berbasis nagari. b. Terbentuknya pusat-pusat perdagangan sebagai pusat pertumbuhan berbasis nagari. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbentuknya manajemen perdagangan yang berbasis nagari. b. Terbinanya secara baik pusat-pusat perdagangan berbasis nagari. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap daerah. b. Semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan sebagai pusat pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya perdagangan interregional dan internasional. b. Terwujudnya kekuatan ekonomi yang bersumber dari pusat-pusat perdagangan.
I. Mewujudkan Jiwa Entrepreneurship					
1.	Terciptanya iklim wirausaha yang	a. Terbentuknya motivasi	a. Terbentuknya lembaga	a. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di	Terwujudnya jiwa

	berbasis potensi daerah	kewirausahaan b. Terbentuknya sekolah-sekolah kejuruan	kewirausahaan b. Terbentuknya sekolah-sekolah kejuruan	masyarakat b. Terbentuknya lembaga-lembaga bisnis dan Pusat Inkubator Bisnis	entrepreneurship pada setiap pelaku ekonomi di masrakarat
J	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan				
1	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	a. Tersusunnya tata aturan pengelolaan lingkungan hidup	a. Penysadaran kepada seluruh instansi (pemerintah, swasta dan masyarakat) melaksanakan tata kelola lingkungan hidup	a. Terlaksananya penata kelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik
2	Mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan	a. Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan mulai pendidikan dasar	a. Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan	a. Meningkatnya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan

No.	Arah Pembangunan Jangka Panjang	RPJMD Ke-1 (2005-2010)	RPJMD Ke-2 (2011-2015)	RPJMD Ke-3 (2016-2020)	RPJMD Ke-4 (2021-2025)
A.	Mewujudkan Perekonomian Wilayah yang Kokoh melalui System Agrobisnis berbasis Nagari				
1.	a. Meningkatnya nilai tambah usaha	g. Semakin lengkapnya prasarana peribadat-	g. Semakin lengkapnya sarana dan	g. Semakin meningkatnya kualitas sarana	g. Semakin meningkatnya kualitas sarana

	<p>pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan.</p> <p>b. Berkembangnya sentra-sentra perkebunan Kakao yang terorganisir dan berbasis Nagari</p>	<p>an.</p> <p>h. Terlaksananya sosialisasi pencerahan pemahaman agama dan adat yang terpadu bagi para tokoh masyarakat.</p>	<p>prasarana peribadatan.</p> <p>h. Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat yang terpadu bagi para mubalig tokoh agama.</p>	<p>dan prasarana peribadatan.</p> <p>h. Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat untuk masyarakat.</p>	<p>dan prasarana peribadatan serta pemeliharaannya yang semakin berkesinambungan.</p> <p>h. Semakin membaiknya pemahaman agama dan adat bagi masyarakat.</p>
2.	<p>Berkembangnya pusat-pusat pendidikan islam.</p>	<p>i. Pembinaan lembaga pendidikan islam berbasis nagari.</p> <p>j. Membina sinergitas kelembagaan pendidikan agama antar nagari.</p>	<p>i. Sosialisasi revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari.</p> <p>j. Menumbuhkan kekuatan kelembagaan pendidikan agama antar nagari.</p>	<p>i. Terciptanya revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari.</p> <p>j. Meningkatkan peranan kelembagaan pendidikan agama antar nagari.</p>	<p>i. Meningkatkan dan pemantapan revitalisasi lembaga pendidikan islam berbasis nagari.</p> <p>j. Memantapkan sinergitas kelembagaan pendidikan agama antar nagari.</p>
3.	<p>Meningkatnya derajat kesalehan sosial.</p>	<p>k. Memberikan kesadaran kepada umat terhadap kesalehan sosial (seperti; zakat, infak dan sadakah, serta</p>	<p>k. Terbentuknya system pengelolaan kesalehan sosial yang transparan dan akuntabel.</p> <p>l. Menjalankan tata</p>	<p>k. Meningkatkan jumlah dana yang bersumber dari zakat, infak dan sadakah.</p> <p>l. Meningkatnya tata</p>	<p>k. Pemanfaatan sumberdana kesalehan sosial yang tepat sasaran.</p> <p>l. Terciptanya tata kehidupan yang</p>

		kepedulian sosial lainnya). l. Sosialisasi tata kehidupan yang berbasis syariah.	kehidupan yang berbasis syariah.	kehidupan yang berbasis syariah.	berbasis syariah.
B. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa					
1.	Terwujudnya tata pemerintahan yang berorientasi "Good governance" dan "Clean Government"	d. Terlaksananya pengembangan karir aparatur daerah, e. Pengelolaan pemerintahan sesuai perencanaan f. Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional	d. Meningkatnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD e. Terwujudnya tata-kelola kerjasama antar Kabupaten dan Kota f. Mantapnya system pengembangan karir aparatur	c. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan program SKPD d. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD	Terwujudnya tata pemerintahan yang berorientasi " <i>Good governance</i> "

2.	Terbangunnya sinergitas antar elemen pelaksana pemerintahan	Terlaksananya keterpaduan program dan kegiatan antara SKPD yang ada	Meningaktnya koordinasi pengelolaan program antar SKPD	Mantapnya koordinasi pelaksanaan program SKPD	Terbangunnya sinergitas antar elemen pelaksana pemerintahan
3.	Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis.	c. Terlaksananya pembaharuan produk hokum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan d. Terbangunnya kapasiatas kelembagaan hokum, adat dan social daerah	d. Melakukan pembnagunan struktur dan kelembagaan hokum daerah e. Pemantapan system pemantauan konsflik social dan kerawanan politik f. Melanjtkan penyuluhan sadar hukum	d. Memantapkan system pemantau kerawanan konflik politik e. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa f. Melaksanakan penyuluhan hokum dan hak azasi manusia	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis
4.	Mewujudkan aparatur yang kapabel, bersih dan berwibawa.	e. Terlaksananya perbaikan manajemen kepegawaian (rekrutmen, promosi, mutasi berdasarkan karir) f. Meningkatkan kualitas dan standar	e. Penataan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan f. Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui system penggajian pegawai	e. Melanjutkan pembenahan manajemen pegawai f. Pendayagunaan aparatur yang makin efisien dan efektif g. Pemantapan kinerja	e. Tertatanya manajemen kepegawaian yang professional f. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggungjawab g. Terlaksananya

		<p>penyelenggaraan diklat pegawai</p> <p>g. Terlaksannya penataan struktur organisasi tata kerja pemerintah daerah</p> <p>h. Penataan dan pengelolaan dokumen / arsip daerah</p>	<p>g. Penyempurnaan SOTK yang efektif, ramping dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan</p> <p>h. Terbnagunnya suatu system data base yang lengkap dan mudah diakses</p>	<p>SOTK dalam setiap lini birokrasi</p> <p>h. Pemanfaatan system database untuk internal dan eksternal birokrasi</p>	<p>suatu system birokrasi yang berorientasi prestasi dan non-paternalistik</p> <p>h. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian</p>
5.	Penanggulangan Bencana Alam	b. Penyusunan strategi penanggulangan bencana alam	b. Pembangunan / pengadaan berbagai fasilitas penanggulangan bencana alam	b. Melengkapi berbagai fasilitas penanggulangan bencana alam	b. Terwujudnya sistem penanggulangan bencana alam yang efektif dan efisien
C.	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas				
1.	Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas	<p>d. Seluruh sekolah terakreditasi</p> <p>e. Tersedianya labor ilmu dasar, dan jumlah guru</p> <p>f. Terlaksananya program wajib blajar 12 tahun</p>	<p>d. Terlaksananya manajemen sekolah dan eksternal</p> <p>e. Tercapainya target MDG's dalam hal pemerataan SMP 99%</p> <p>f. Pemantapan kurikulum sekolah berstandar nasional</p>	<p>c. Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional</p> <p>d. Meratifikasi sekolah-sekolah kejuruan berstandar internasional</p>	<p>c. Terlaksananya pendidikan berakreditasi internasional</p> <p>d. Terwujudnya SMA dan SMP berstandar nasional</p>

2.	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	c. Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan dasar d. Persiapan rumah sakit daerah	c. Penuntasan penyakit utama d. Peningkatan peran rumah sakit daerah dan puskesmas	c. Terbebasnya Padang Pariaman dari penyakit utama d. Terkreditasinya rumah sakit daerah berstandar nasional	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang baik
D. Peningkatan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni					
1.	Meningkatnya penguasaan IPTEKS yang berdaya guna dan tepat guna.	c. Pemetaan produk-produk baru dan perkembangan kebutuhan rakyat d. Pendirian lembaga dan system pengembangan teknologi dan inovasi	c. Memilih dan mendisain teknologi tepat guna untuk mendorong pembangunan d. Membangun sains park untuk pengembangan IPTEKS	c. Meningkatkan dan mempatenkan teknologi tepat guna untuk pembangunan daerah d. Peningkatan manajemen Sains Park	Terwujudnya kemampuan IPTEK yang tinggi dan tepat guna.
E.					
1.	Terlaksananya usaha pertanian modern dan agrobisnis maju	c. Pemahaman pola usaha pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. d. Pembinaan sentra-sentra perkebunan Kakao	a. Terlaksananya usaha pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Terbentuknya kelembagaan sentra-sentra perkebunan	a. Meningkatkan produksi pertanian rakyat yang berbasis ilmu pengetahuan. b. Terciptanya kekuatan	

			Kakao yang terorganisir dan berbasis Nagari	kelembagaan sentra perkebunan Kakao sebagai pusat pertumbuhan di Nagari	
2.	Pemanfaatan potensi subsektor perikanan laut dan subsektor perkebunan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi	c. Terbangunnya sarana dan prasarana penangkauan, pendaratan. d. Terbangunnya jejaring bisnis komoditi perkebunan.	c. Terbangunnya kelembagaan perikanan laut. d. Meningkatnya transaksi bisnis komoditi perkebunan yang menguntungkan.	c. Meningkatnya produksi perikanan laut. d. Semakin mantapnya subsektor perkebunan sebagai potensi ekonomi.	c. Meningkatnya produksi dan kualitas perikanan laut serta diversifikasi produk perikanan laut. d. Terpeliharanya kesinambungan eksisten potensi subsektor perkebunan.
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah	b. Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah yang efisien	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah sesuai kebutuhan	b. Melengkapi Sarana dan Prasarana Wilayah	b. Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang modern
F.	Mewujudkan Agroindustri yang Tangguh didukung oleh Teknologi dan Informasi Mutakhir				
1.	Mewujudkan agroindustri yang tangguh	Penataan agroindustri berbasis komoditas	Perumusan manajemen agroindustri yang tangguh	Peningkatan agroindustri yang tangguh, berbasiskan teknologi informasi	Terwujudnya agroindustri yang tangguh

G. Mewujudkan Padang Pariaman sebagai Daerah Tujuan Pariwisata						
1.	Terciptanya Padang Pariaman tujuan wisata yang islami	e. Sosialisasi masyarakat yang sadar wisata melalui penyuluhan yang islami f. Pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata	c. Terlaksananya pemugaran dan pengembangan objek wisata d. Terbangunnya pusat informasi wisata dilengkapi dengan teknologi informasi	g. Meningkatnya kualitas objek wisata dan kesadaran masyarakat terhadap wisata h. Meningkatnya kualitas sarana & prasarana objek wisata dan mutu pemandu wisata	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai Daerah Tujuan Wisata yang islami	
H. Penataan Sistem Perdagangan yang Tangguh						
1.	Terciptanya perdagangan yang berbasis nagari	c. Terbentuknya kelembagaan perdagangan yang berbasis nagari. d. Terbentuknya pusat-pusat perdagangan sebagai pusat pertumbuhan berbasis nagari.	c. Terbentuknya manajemen perdagangan yang berbasis nagari. d. Terbinanya secara baik pusat-pusat perdagangan berbasis nagari.	c. Semakin besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap daerah. d. Semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan sebagai pusat pertumbuhan.	c. Terwujudnya perdagangan interregional dan internasional. d. Terwujudnya kekuatan ekonomi yang bersumber dari pusat-pusat perdagangan.	
I. Mewujudkan Jiwa Entrepreneurship						
1.	Terciptanya iklim wirausaha yang	c. Terbentuknya motivasi	c. Terbentuknya lembaga	c. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di	Terwujudnya jiwa	

	berbasis potensi daerah	kewirausahaan d. Terbentuknya sekolah-sekolah kejuruan	kewirausahaan d. Terbentuknya sekolah-sekolah kejuruan	masyarakat d. Terbentuknya lembaga-lembaga bisnis dan Pusat Inkubator Bisnis	entrepreneurship pada setiap pelaku ekonomi di masrakarat
J	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan				
1	Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	b. Tersusunnya tata aturan pengelolaan lingkungan hidup	b. Penysadaran kepada seluruh instansi (pemerintah, swasta dan masyarakat) melaksanakan tata kelola lingkungan hidup	b. Terlaksananya penata kelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik
2	Mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan	b. Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan mulai pendidikan dasar	b. Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan	b. Meningkatnya pendidikan dan penyuluhan sadang lingkungan	Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan